MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

LAPORAN PENELITIAN

FENOMENA KEMISKINAN DI PEDESAAN SUMATERA BARAT

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL. : 13 JULI '98
SUMBER / HARGA : H /
KOLEKSI : K
NO. INVENTARIS : 647/K/98 f.1/1
KLASIFIKASI : 362.5 Ama f1

OLEH

DRS. SYAMSUL AMAR, MS

Penelitian ini dibiayai oleh :
Harian Kompas Jakarta
Surat Persetujuan No. 168/TBP/III/97
Tanggal 18 Februari 1997

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PADANG
1998

PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa penulis telah dapat menyelesaikan sebuah penelitian dengan judul **Fenomena kemiskinan Rumah Tangga di Pedesaan Sumatera Barat**. Penelitian ini disponsori oleh Harian Kompas dengan objek penelitian empat puluh (40) desa miskin dan 720 rumah tangga di Sumatera Barat. Pengumpulan data lapangan dilakukan selama enam (6 bulan) dibantu oleh tiga orang surveyor yang terdiri dari: 1 orang sarjana ekonomi dan 2 orang sarjana sosial ekonomi pertanian.

Dengan selesainya penulisan laporan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Jacub Utama pimpinan redaksi Harian Kompas yang telah mensponsori penelitian ini;
2. Bapak P. Swantoro dan Dr. Daniel sebagai tim penilai kelayakan proposal penelitian;
3. Staf ahli ekonomi Harian Kompas yang memberikan masukan dalam penyempurnaan proposal dan laporan hasil penelitian;
4. Wartawan ekonomi Harian Kompas yang telah memberikan tanggapan dalam penyempurnaan laporan penelitian ini.
5. Teman-Teman pada Pusat Kajian Pedesaan Koperasi Lembaga Penelitian IKIP Padang dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas telah memberikan sumbangan pemikiran sampai terwujudkan laporan penelitian ini.

Penulis berharap agar penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dalam menyusun perencanaan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Namun, peneliti menyadari laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti mohon kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi perbaikan di masa yang akan datang.

Padang, Maret 1998

Peneliti,

Syamsul Amar

ABSTRAK

Kemiskinan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kadang-kadang saling mengkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena dalam penelitian ini dicoba mengkaji permasalahaan kemiskinan, kasus di pedesaan Sumatera Barat. Secara operasional tujuan tersebut terdiri atas: (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pedesaan Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut yaitu: penguasaan lahan pertanian, tingkat teknologi, tingkat kesehatan, aksesibilitas terhadap kelembagaan dan mata pencaharian di luar pertanian (alternatif). (2) mengkaji masalah kemiskinan relatif yang ditunjukkan oleh distribusi penguasaan lahan dan distribusi pendapatan tumah tangga, (3) menganalisis perbedaan distribusi penguasaan lahan dan distribusi pendapatan antara rumah tangga miskin dengan rumah tangga yang tidak berstatus miskin, (4) menganalisis perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang mempunyai mata pencaharian alternatif dengan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif, dan (5) menganalisis pengaruh distribusi penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga. Dengan demikian dalam penelitian ini ada lima masalah dan lima hipotesis yang akan diuji secara empiris.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu ekonomi. Di samping itu diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan terutama dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik survey; data yang diperlukan dikumpulkan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kuantitatif yang terdiri atas: (1) Model Multiple Logistic Regression dengan Metode Maximum Likelihood, (2) Model Uji-t dan Analisis Varians,serta (3) Model Regresi Sederhana dengan metode Ordinary Least Square.

Hasil penelitian menunjukkan dari lima hipotes yang diajukan dua di antaranya tidak didukung oleh data penelitian. Tidak terdapat perbedaan berarti antara distribusi penguasaan lahan pada rumah tangga miskin dengan distribusi penguasaan lahan pada rumah tangga yang bukan berstatus miskin. Terjadinya hal ini diduga karena penelitian dilakukan pada desa-desa yang sama dengan demikian variasi penguasaan lahan antar dua kelompok rumah tangga cenderung tidak menunjukkan perbedaan secara statistik. (2) Tidak signifikannya pengaruh distribusi penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan di pedesaan Sumatera Barat,

diduga disebabkan oleh beberapa faktor: (a) Sumber pendapatan dari kegiatan usaha tani bukan lagi satu-satunya sumber pendapatan bagi rumah tangga. Berarti di samping ada sumber pendapatan dari kegiatan usahatani ada pula pendapatan dari luar usahatani. Dengan adanya sumbangan pendapatan dari luar usahatani sebagai pekerjaan alternatif, maka variasi pendapatan antar rumah tangga cenderung menjadi besar demikian juga dengan distribusi pendapatan mereka meskipun luas lahan yang mereka usahakan adalah sama.(b) Variasi teknologi yang diadopsi masing-masing rumah tangga relatif tinggi, sementara tingkat adopsinya relatif rendah. (c) Sebagian besar rumah tangga di pedesaan masih belum akses terhadap kelembagaan ekonomi secara optimal. Sementara, semakin akses sebuah rumah tangga terhadap kelembagaan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kemiskinan.

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRAK		i
PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	14
	A. Tinjauan Pustaka	14
	B. Kerangka Pemikiran	47
	C. Hipotesis	50
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	52
	A. Populasi dan Sampel	52
	B. Definisi Operasional	59
	C. Teknik Pengumpulan Data	63
	D. Teknik Analisis	64
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	70
	A. Deskripsi Data	70
	B. Analisis	109
	C. Pembahasan	123
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	135
	A. Kesimpulan	135
	B. Saran-Saran	141
DAFTAR PUSTAKA		145
LAMPIRAN		150

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tebel 1.1	Produk Domistik Bruto Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Priode 1990-1994	6
Tebel 2.1	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Keadaan Tahun 1993	36
Tabel 3.1	Jumlah Desa Miskin, Rumah Tangga Berstatus Miskin dan Rumah Tangga Tidak Berstatus Miskin di Sumatera Barat	52
Tabel 3.2	Jumlah Desa Miskin di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam	55
Tabel 3.3	Nama-Nama Desa sampel Penelitian	56
Tabel 3.4	Analisis Ukuran Sampel Penelitian	57
Tabel 4.1	Luas Penguasaan Lahan Rata-Rata Rumah Tangga dan Lahan Perkapita Pada Beberapa Kecamatam di Sumatera Barat	70
Tabel 4.2	Luas Penguasaan Lahan Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Di Pedesaan Sumatera Barat	73
Tebel 4.3	Indeks Gini Penguasaan Lahan Rata-Rata dan Perkapita Rumah Tanga Pada Beberapa Kecamatam di Sumatera Barat	74
Tebel 4.4	Distribusi Penguasaan Lahan Rata-Rata Rumah Tangga Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	76
Tabel 4.5	Indeks Gini Penguasaan Lahan Berdasarkan Status Rumah Tangga Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat	78
Tebel 4.6	Tingkat Adopsi Teknologi Rumah Tangga Pada Beberapa Kecamatam di Sumatera Barat	80
Tebel 4.7	Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Di Pedesaan Sumatera Barat	84
Tabel 4.8	Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan Sumatera Barat	86

Tabel 4.9 Jenis Pekerjaan Alternatif Yang Dilakukan Rumah Tangga di Pedesaan Sumatera Barat 90

Tebel 4.10 Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga dan Perkapita Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat 92

Tebel 4.11 Perolehan Pendapatan Perkapita Rumah Tangga di Pedesaan Sumatera Barat 96

Tabel 4.12 Kontribusi Masing-Masing Sumber Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Rumah Tangga Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat 97

Tebel 4.13 Indeks Gini Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga dan Perkapita Pada Beberapa Kecamatam di Sumatera Barat 101

Tebel 4.14 Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Pada beberapa Kecamatan di Sumatera Barat Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 103

Tebel 4.15 Indeks Gini Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Pendapatan Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat 104

Tebel 4.16 Indeks Gini Pendapatan Perkapita Rumah Tangga Berdasarkan Status Rumah Tangga Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat 107

Tabel 4.17 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Pedesaan Sumatera Barat 109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Selama lima Pelita Indonesia telah mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, terutama selama lima tahun terakhir, priode 1987 - 1992 dengan tingkat pertumbuhan produk Domistik Bruto rata-rata 6,73 persen pertahun. Menurut Hananto (1993:1) pada priode tersebut pendapatan per kapita rata-rata Indonesia telah mencapai Rp. 1.380.000,- atau sebesar US $ 680 dan berdasarkan kriteria Bank Dunia (1974), Indonesia telah bergeser dari kelompok negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Meskipun Indonesia telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi namun kita belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan walaupun sebenarnya jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu telah menunjukan penurunan secara berarti.

Menurut Mubiyarto (1993:4) pada tahun 1967 jumlah penduduk miskin sebanyak 54,2 juta (29 %), sementara pada tahun 1993 tinggal sebanyak 25,9 juta (13,70 %), sebagian besar diantara mereka bermukim di pedesaan. Dengan demikian pedesaan haruslah ditangani secara lebih serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri tingkat kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia relatif lebih rendah (miskin) jika dibandingkan dengan kehidupan perkotaan, pada hal pedesaan memberikan andil yang cukup besar terhadap perekonomian

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

nasional. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada di pedesaan, akibatnya kemiskinan pedesaan juga merupakan kemiskinan negara. Kemiskinan pedesaan juga merupakan salah satu penyebab timbulnya urbanisasi yang sebenarnya kurang diinginkan dalam proses pembangunan karena dengan proses urbanisasi mengakibatkan terjadinya ragional disparity.

Menurut Ismawan (1991:4), kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang disebabkan oleh berbagai kondisi yang menekan kehidupan, satu sama lainnya saling berpengaruh dan mensejarah. Keadaan tersebut bukan sesuatu yang dinginkan oleh si miskin, melainkan suatu hal yang tidak dapat mereka hindari dengan kekuatan sendiri. Untuk mengentaskan masalah kemiskinan pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti mengintrodusir berbagai macam paket teknologi pertanian ke pedesaan, membentuk kelembagaan formal pada tingkat desa. Kehadiran semuanya ini diharapkan dapat membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mereka terlepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ternyata belum membuahkan hasil optimal. Sebahagian besar masyarakat lapisan terbawah masih belum tersentuh oleh program tersebut dan kehidupan mereka nyaris tidak mengalami perubahan. Mereka masih subsisten dan involtif. Kondisi tersebut barangkali disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah yang kurang tepat. Selama ini kebijaksanaan pembangunan cenderung bersifat sektoral dan kurang memperhatikan dimensi tata ruang wilayah. Di samping itu

pemerintah juga menganggap masalah kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh faktor yang sama dan karakteristik masyarakat miskin juga dianggap sama. Pada hal dari segi tata ruang bukanlah demikian, karena setiap wilayah mempunyai karakteristik sumberdaya alami dan insani yang berbeda.

Untuk menghindari hal tersebut dewasa ini pemerintah telah memperkenalkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatannya. Program pembangunan tersebut merupakan kebijaksanaan terpadu untuk meningkatkan potensi dan dinamika ekonomi masyarakat miskin. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat miskin akan terangsang untuk mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi insani dan wilayahnya masing-masing.

Di Sumatera Barat masih terdapat sebanyak 464.064 orang (15,56%) yang berada di bawah garis kemiskinan yang tersebar pada 674 desa dan 94.233 rumah tangga dengan mata pencaharian pada umumnya sebagai petani (Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat 1994). Secara teoritis kondisi kemiskinan yang melilit masyarakat Sumatera Barat diduga berasal dari: (a) kapasitas wilayah yang rendah yang ditunjukan oleh sumberdaya alam yang rendah, teknologi yang rendah dan kelembagaan yang masih belum berfungsi, (b) sumberdaya manusia yang rendah ditunjukkan oleh tingkat pendidikan yang rendah,

keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, aksessibilitas terhadap kelembagaan yang rendah dan kurangnya mata pencaharian alternatif, di samping faktor geografis dan sistem nilai budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat.

Sejauh pengamatan peneliti belum ada studi yang dapat menjelaskan keabsahan dari pandangan tersebut. Peneliti baru menemukan hasil studi mengenai masalah kemiskinan dan faktor penyebabnya untuk kasus pulau Jawa seperti hasil studi Boeke (1951 dalam Soewardi 1982), Sinaga dan White (1984) dan White dan Sinaga (1986), Syukur (1988), Sihaan (1984) dan Wahyuni (1993). Hasil studi tersebut tentu tidak dapat dijenaralisasi untuk daerah lain khususnya untuk Sumatera Barat berhubung perbedaan kondisi wilayah, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Di satu sisi, faktor sosial budaya memang sulit dipisahkan dengan masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan, ada di antara sistem nilai budaya tersebut yang menghambat aktivitas perekonomian masyarakat apalagi di pedesaan yang masih kuat tatanan sosial budayanya. Hambatan budaya tersebut akan turut memperburuk keadaan dan mempersulit masyarakat untuk keluar dari belenggu kemisikinan. Jika hal tersebut dibiarkan akibatnya masyarakat akan tetap berada dalam kemiskinan karena mereka telah dibentuk oleh sistem nilai budaya yang ada untuk menjadi miskin.

Menurut Navis (1986:78) di Sumatera Barat terdapat dua subsistem nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yaitu subsistem budaya Luhak Nan Tigo yang dianut oleh masyarakat

yang tinggal di daerah darek (daratan) dan sub sistem nilai budaya rantau (daerah pesisir) yang dianut oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai lautan Indonesia. Sub-sistem nilai budaya tersebut secara antropologis akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berbunyi "Alam Takambang Manjadi Guru" artinya manusia harus belajar dari alam dan lingkungan. Dengan demikian keadaan alam sekitar akan ikut menentukan sikap, perilaku dan persepsi masyarakat MinangKabau terhadap suatu objek tertentu termasuk juga di dalamnya mengenai masalah kemiskinan. Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitiaan mengenai masalah kemiskinan di pedesaan Sumatera Barat karena ingin mengetahui bagaimanakah karakteristik kemiskinan di wilayah ini.

B. Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa tahun terakhir menunjukan angka yang cukup menggembirakan, tetapi di sisi lain kita masih dihadapkan kepada masalah kemiskinan baik secara absolut maupun relatif. Memang suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa pada awal-awal pembangunan dilaksanakan pemerintah cenderung menekankan pembangunan pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan pada periode berikutnya akan

kekuasaan. Sebagai akibat dari faktor tersebut orang miskin kurang akses dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam mempertahankan kehidupannya. Mereka cenderung pasrah menerima keadaan dan sulit bagi mereka untuk keluar dari perangkap tersebut karena rendahnya faktor sosial ekonomi yang mereka miliki. Salim (1984:42) mengemukakan orang tersebut miskin karena memang dia miskin dari segala aspek kehidupan. Dengan kemiskinan tersebut sangat terbatas aktivitas ekonomi yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki tingkat kehidupan mereka, karena rendahnya sumberdaya yang mereka miliki.

Menurut BPS (1990) lebih-kurang 65 persen dari masyarakat yang menderita kemiskinan absolut berdomisili di pedesaan dengan tingkat kehidupan yang memprihatinkan. Jika diamati kemiskinan tersebut dicirikan oleh sosial ekonomi dan potensi wilayah yang relatif rendah sebagaimana ditunjukan oleh tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, sempitnya lahan pertanian, teknologi yang rendah, rendahnya aksessibilitas terhadap kelembagaan yang ada dan kurangnya mata pencaharian alternatif di luar kegiatan bertani. Scoot (1976:269-273) mengemukakan, rendahnya sosial ekonomi masyarakat mengakibatkan mereka tidak responsif dan akses dalam setiap gerakan pembangunan. Berarti sedikit sekali peluang-peluang ekonomi yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan kehidupannya.

Lahan pertanian, teknologi, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan sebenarnya adalah masukan dalam

proses produksi Demikian juga bagi masyarakat desa yang pekerjaannya pada umumnya adalah sebagai petani. Dengan demikian luasnya penguasaan lahan, tingkat teknologi yang digunakan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan akan menentukan jenis dan besar kecilnya usahatani yang dapat mereka lakukan. Seterusnya hal tersebut juga akan menentukan besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga.

Rumah tangga miskin cenderung menguasai lahan pertanian relatif sempit, tingkat teknologi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat kesehatan yang rendah. Berarti jenis kegiatan dan skala usaha tani yang dapat mereka lakukan relatif kecil dengan cara yang sangat sederhana tentunya. Hal ini disebabkan tidak dikelola oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, sudah cukup banyak kelembagaan ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah seperti Koperasi Unit Desa, Bank, dan Kelompok tani. Kelembagaan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, namun kenyataannya yang akses dalam memanfaatkan kelembagaan tersebut terbatas hanya kepada petani-petani yang tergolong kuat dalam arti ekonomi. Demikian juga dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti KUT, Program Banpres dan Kredit Umum Pedesaan.

Kurang berhasilnya kelembagaan ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan diduga disebabkan oleh asumsi yang dipakai oleh

pemerintah sebelum melaksanakan program tersebut tidak terpenuhi. Seperti; pemerintah menduga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa dan karakteristik masyarakat pedesaan adalah sama, ternyata bukanlah demikian. Dengan rendahnya aksessibilitas masyarakat dalam memanfaatkan kelembagaan ekonomi yang ada, berarti kecil pula peluang ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Dengan rendahnya pendapatan maka mustahil masyarakat desa akan dapat meningkatkan kesejehteraannya.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat desa, menyebabkan mereka cenderung mencari mata pencaharian alternatif di luar kegiatan bertani. Dengan demikian sangat beralasan secara ekonomis terjadinya pergeseran pola nafkah masyarakat desa dari pola nafkah tunggal menjadi pola ganda, meskipun produktivitasnya sangat rendah sekali. Namun yang penting bagi mereka kegiatan tersebut dapat menambah pendapatan rumah tangganya. Dengan adanya pola nafkah ganda tingkat pendapatan masyarakat desa akan dapat ditingkatkan, karena masing-masing rumah tangga tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan dari kegiatan bertani.

Di sisi lain dengan semakin banyaknya pendapatan tambahan yang berasal dari kegiatan nonpertanian sebagai pekerjaan alternatif akan mengakibatkan distribusi pendapatan antar rumah tangga cenderung menjadi tidak merata. Hal ini disebabkan pekerjaan alternatif di luar bidang pertanian cenderung beragam, demikian juga dengan

imbalan yang diterima.

Pelaksanaan pola nafkah ganda di pedesaan Sumatera Barat cenderung berbeda dengan pola nafkah ganda yang ada di Jawa. Di Jawa relatif banyak industri, lancarnya transportasi dan luasnya pasar tenaga kerja yang dapat menampung migrasi musiman di saat pekerjaan di bidang pertanian sedang sepi seperti di saat menunggu panen dan setelah selesai bertanam. Hal tersebut akan sangat menunjang terjadinya pola nafkah ganda atau mata penaharaian alternatif di samping kegiatan bertani. Di pedesaan Sumatera Barat pola nafkah ganda jarang ditemukan karena kurangnya industri, kurang lancarnya transportasi dari pedesaan ke kota dan relatif sempitnya pasar yang dapat menampung tenaga kerja musiman dan penggal waktu. Akibat kurangnya peluang untuk melakukan pekerjaan alternatif maka agak sulit bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatannya.

Di samping itu, kemiskinan relatif terlihat dari ketimpangan pemilikan asset produksi terutama tanah sebagai lahan pertanian dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Meratanya distribusi penguasaan lahan juga akan sangat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat, karena tanah adalah faktor produksi utama bagi masyarakat dalam menciptakan pendapatan rumah tangga (Hayami; 1991:85). Dengan meratanya distribusi penguasaan lahan maka berarti jenis dan skala usahatani yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tidak beragam. Demikian pula dengan tingkat penghasilan yang mereka terima.

Masyarakat miskin hanya menguasai lahan relatif sempit tapi lebih merata jika dibandingkan dengan masyarakat yang bukan berstatus miskin. Demikian juga dengan distribusi pendapatan. Meratanya distribusi pendapatan masyarakat miskin disebabkan usahatani yang dilakukannya berskala kecil dan penggunaan tenaga kerja di luar rumah tangga cenderung tidak dibayar karena adanya, pertukaran tenaga kerja di antara mereka secara resiprokal. Berbeda keadaannya dengan petani mampu yang cenderung mengandalkan modal dengan prinsip efisiensi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ke dalam bentuk yang lebih spesifik dan operasional sebagai berikut:

1. Apakah luas lahan pertanian yang dimiliki, teknologi yang digunakan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, aksessibilitas terhadap kelembagaan yang ada dan mata pencaharian alternatif berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat ?.
2. Apakah terdapat perbedaan distribusi penguasaan lahan pertanian antara rumah tangga yang berstatus miskin dengan distribusi penguasaan lahan rumah tangga yang tidak berstatus miskin di pedesaan Sumatera Barat ?.
3. Apakah terdapat perbedaan distribusi pendapatan antara rumah tangga yang berstatus miskin dengan distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak berstatus miskin di pedesaan Sumatera Barat ?.

4. Apakah terdapat perbedaan distribusi pendapatan antara rumah tanggga yang memiliki pekerjaan alternatif dengan pendapatan rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan alternatif di pedesaan Sumatera Barat ?.
5. Sejauhmanakah distribusi penguasaan lahan pertanian mempengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat.
b. Untuk dapat mengetahui perbedaan distribusi penguasaan lahan pertanian dan pendapatan antara rumah tangga miskin dengan rumah tangga yang bukan berstatus miskin di pedesaan Sumatera Barat.
c. Untuk dapat mengetahui perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif dengan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif di pedesaan Sumatera Barat.
d. Untuk dapat mengetahui pengaruh distribusi penguasaan lahan pertanian terhadap distribusi pendapatan di Sumatera Barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di pedesaan Sumatera Barat. Setelah informasi tersebut diketahui diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi instansi terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di pedesaan Sumatera Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Pedesaan ditandai dengan masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya konsumsi kalori yang diperlukan oleh tubuh manusia dan melebarnya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.

Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cendrung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan produktivitas yang rendah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, tekonologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada. Dengan demikian masyarakat miskin kurang akses dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi untuk menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang kait mengkait antara satu faktor dengan faktor yang lainnya, makanya untuk mengkaji masalah kemiskinan kita harus memperhatikan jalinan tersebut dan faktor-faktor apa yang berada dibalik kemiskinan itu.

Berdasarkan hasil studi Hayami (1985:49-54) di beberapa negara di Asia Tenggara yaitu: Indonesia, Malaysia

dan Thailand, ditemukan bahwa kemiskinan dan ketidak-merataan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : (1) produktivitas tenaga kerja rendah sebagai akibat rendahnya teknologi, penyediaan tanah dan modal jika dibanding tenaga kerja; dan (b) tidak meratanya distribusi kekayaan terutama tanah.

Wiradi dalam Hagul (1985:4) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di pedesaan merupakan resultan dari beberapa faktor antara lain: pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan rendahnya produktivitas. Seterusnya Salim (1984:40) menyatakan bahwa kemiskinan tersebut melekat atas diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki asset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki asset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjerat dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung dan pangkalnya. Secara lebih kongkrit Hadiwegeno dan Pakpahan (1992:25) berpendapat bahwa kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) sumberdaya alam yang rendah, (2) teknologi dan unsur pendukung yang rendah, (3) sumberdaya manusia yang rendah dan (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

Nurkes dalam Jhingan (1988: 43-44) dalam konteks suatu negara telah memperkenalkan konsep lingkaran kemiskinan yang memperlihatkan suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga yang mengakibatkan suatu negara tetap miskin. Selanjutnya Nurkes menyatakan bahwa suatu negara itu miskin karena ia merupakan negara

miskin. Lingkaran kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyebabkan terhambatnya akumulasi kapital, sedangkan akumulasi kapital tersebut disatu pihak ditentukan oleh tabungan dan di pihak lain ditentukan pula oleh insentif dalam menanamkan modal.

Terdapat dua jenis lingkaran kemiskinan yang dihadapi oleh negara berkembang yaitu dari segi penawaran modal dan segi permintaan. Dari sisi penawaran modal, lingkaran kemiskinan dimulai dari tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sebagai akibat produktivitas yang rendah. Rendahnya tingkat pendapatan mengakibatkan hasrat menabung masyarakat juga akan rendah, pada akhirnya tingkat akumulasi kapital juga akan rendah dan seterusnya produktivitas juga akan menjadi rendah. Dalam lingkaran kimiskinan sisi penawaran, rendahnya tingkat produktivitas merupakan pemicu terjadinya kemiskinan.

Jika konsep lingkaran kemiskinan tersebut diadopsi untuk kasus pedesaan akan terlihat, rendahnya produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: sempitnya lahan pertanian, rendahnya teknologi, rendahnya pendidikan, rendahnya aksessibilitas, rendahnya tingkat kesehatan dan kurangya mata pencaharian alternatif masyarakat. Kondisi serba kekuranganlah yang menjadikan masyarakat desa tetap miskin, mereka tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari lingkaran tersebut, kecuali adanya program dari pihak luar terutama pemerintah untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan tersebut.

647/k/98 f'/1)

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

362.5
Ama

Dari sisi permintaan kapital, lingkaran kemiskinan dimulai dari perangsang dalam akumulasi kapital yang rendah karena luas pasar yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah, sementara pendapatan yang rendah disebabkan oleh kurangnya akumulasi kapital di masa lalu sebagai akibat dari rendahnya perangsang dalam mengakumulasi kapital. Di samping itu rendahnya akumulasi kapital juga disebabkan oleh **internal demonstration effect.** Dalam pendekatan ini lingkaran kemiskinan diawali dengan rendahnya insentif dalam akumulasi kapital. Rendahnya insentif disebabkan oleh ukuran pasar yang terbatas, kurangnya aktivitas perekonomian masyarakat. Dengan demikian, tingkat pengembalian investasi, akan rendah pula tentunya. Dengan rendahnya tingkat pengembalian investasi berarti investor akan mencari tempat-tempat lain yang relatif menguntungkan. Jika konsep ini dikaitkan dengan masalah pedesaan dengan segala kekurangannya, maka sudah tentu calon investor tidak akan memilih pedesaan untuk menginvestasikan modalnya. Hal disebabkan rendahnya tingkat keuntungan yang akan mereka terima bila dibandingkan dengan di perkotaan yang dapat memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Dengan kondisi demikian, pedesaan akan tetap tertinggal dan masyarakatnya akan tetap miskin karena sangat kurangya investasi yang ditanamkan.

Meier dan Baldwin (1960:320) berpendapat bahwa lingkaran kemiskinan akan terjadi karena adanya faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Lingkaran kemiskinan tersebut bermula dari sumberdaya alam

yang masih belum dikembangkan karena rendahnya sumberdaya manusia dan kurangnya modal yang dimiliki. Rendahnya sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan modal mengakibatkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas berakibat terhadap rendahnya pendapatan riil yang diterima. Rendahnya pendapatan riil juga menyebabkan tingkat tabungan dan permintaan akan menjadi rendah. Dengan rendahnya tabungan dan permintaan menyebabkan pembentukan modal akan menjadi rendah dan akhirnya terjadinya kekurangan modal. Akibat dari kekurangan modal, maka semberdaya alam yang ada tetap tidak dapat dikembangan dan masyarakat tetap masih terbelakang. Siklus ini akan bergulir selanjutnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

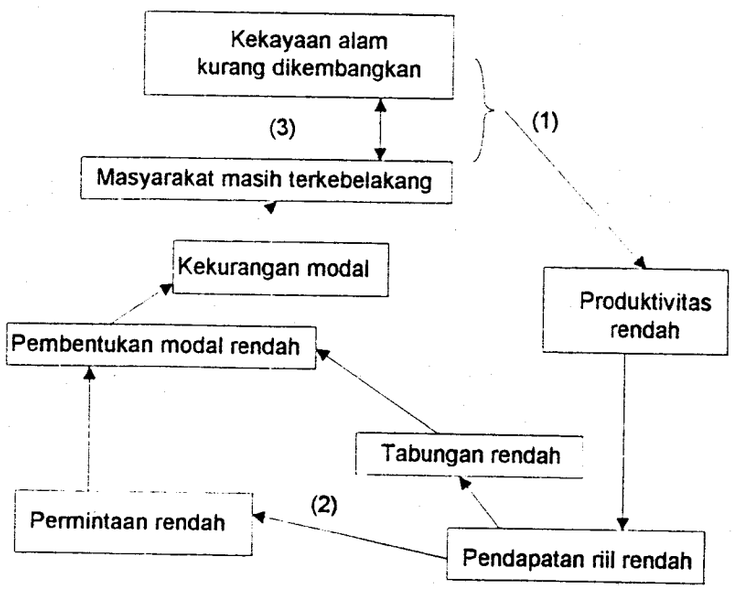

Gambar 2.1: Lingkaran Kemiskinan

Sumber : Meier dan Baldwin (1960). **Economic Development Theory, History, Policy**. New York: John Wiley.

Apabila konsep di atas diadopsi untuk kasus pedesaan akan terlihat bahwa suatu masyarakat berstatus miskin memang diawali oleh kemiskinan mereka dalam memiliki sumberdaya antara lain; sumberdaya alam berupa luas lahan pertanian sebagai faktor produksi, tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan dan aksesibilitas dalam memanfaat kelembagaan ekonomi maupun teknologi. Terbatasnya sumberdaya yang dimiliki akan berakibat sangat terbatas kegiatan ekonomi yang dapat mereka lakukan. Konsep ini dikenal juga dengan istilah kemiskinan struktural.

Menurut Sudjatmoko (1984:47) kemiskinan struktural adalah pola-pola organisasi sosial yang mantap dan luas yang mampu meneruskan kemiskinan seseorang dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, jika seorang yang lahir dalam struktur sosial yang telah mapan, dengan kekuatan sendiri dia tidak akan mampu menguasai dan mengubah struktur tersebut. Dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi dia akan tetap begitu. Menurut Salim (1984:41) hidup dalam perangkap kemiskinan menimbulkan sikap hidup yang pasrah kepada kemiskinan. Karena telah terbiasa hidup dalam lingkungan serba miskin, hal ini kemudian akan menimbulkan sistem nilai yang berkelanjutan. Jika peri kehidupan ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama akibatnya tidak diketahui lagi cara hidup lain. Akibat jalan keluar untuk mendobrak lingkaran kemiskinan sulit ditemukan.

Studi Khusus yang dilakukan oileh Boeke dalam Soewardi (1982:103), khusus untuk Pulau Jawa, ia menemukan bahwa kemiskinan masyarakat Jawa disebabkan oleh sistem

perekonomiannya yang statis. Perekonomian yang statis ditandai oleh keterbatasan masyarakat dalam memiliki faktor produksi seperti tanah dan berbagai sarana produksi lainnya. Selain itu disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti tingkat pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan inilah yang menyebabkan masyarakat kurang akses dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya yang mengakibatkan mereka menjadi miskin. Tetapi Gertz dalam Soewardi (1982:104-105) menyimpulkan bahwa orang Jawa tidak menjadi miskin oleh karena mereka statis; mereka menjadi statis oleh karena mereka miskin. Proses menjadi miskin tersebut kata Gertz disebabkan oleh dua faktor yaitu ekologi persawahan dan kebijaksanaan kolonial Belanda.

Menurut Malasis (1975:186) kemiskinan tersebut terlihat dari pendapatan yang rendah. Hal ini berakibat terhadap rendahnya permintaan perkapita, tingkat tabungan dan investasi baik untuk investasi material maupun pendidikan. Pendapatan yang rendah disebabkan oleh rendahnya produktivitas kerja dan rendahnya produksi. Rendahnya produksi disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli, rendahnya teknologi dan tingginya tingkat pengangguran. Pendapatan dan produksi yang rendah juga akan berpengaruh terhadap rendahnya permintaan. Kerangka pemikiran Malasis tersebut dapat digambarkan seperti berikut;

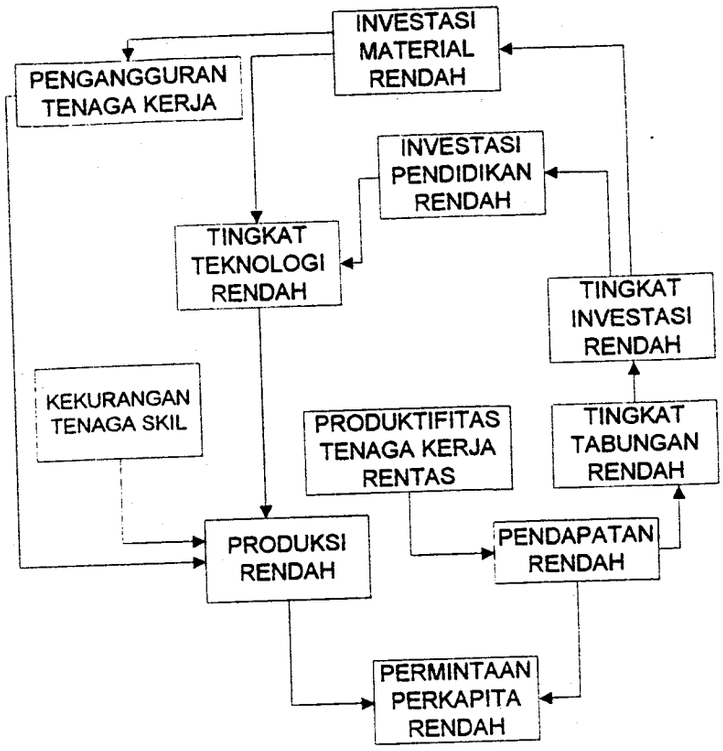

Gambar 2.2 : Diagram Alir Kerangka Pemikiran Malasis

Sumber: Malasis (1975). **Agriculture And Development Proces** Washington: Unesco Press.

Banyak sekali ukuran kemiskinan yang yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain berdasarkan pendapatan per kapita, kebutuhan kalori minimum, konsumsi beras perkapita. Dari ketiga pendekatan tersebut yang paling banyak digunakan adalah kreteria pendapatan perkapita seperti yang digunakan oleh BPS karena datanya mudah dikumpulkan. Di samping, itu para ahli ekonomi sudah sejak lama menggunakan pendapatan perkapita sebagai indikator kesejahteraan masyarakat meskipun hal tersebut masih mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain; pendapatan perkapita cenderung kurang dapat mengambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat yang

sesungguhnya karena masih ada sumber pendapatan masyarakat yang belum diperhitungkan sebagai pendapatan seperti waktu senggang yang dapat dinikmati dan jasa rumah tangga yang dihasilkan. Demikian juga dengan kerugian yang tidak diperhitung seperti polusi dan kongesti (Samuelson dan Nordhaus; 1985:3-5).

Menurut Hananto (1993:11), pendapatan ditentukan oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal dan eksternal. Secara internal pendapatan yang diperoleh merupakan balas jasa dari prestasi kerja yang dilakukan. Dengan demikian, besarnya pendapatan tersebut akan ditentukan oleh lama waktu kerja dan produktivitas. Selanjutnya Hananto (1993:11) menyatakan kesehatan yang baik, pendidikan dan keterampilan yang tinggi akan dapat meningkatnya produktivitas dan selanjutnya akan dapat pula meningkatkan pendapatan. Selain dari hal tersebut tingkat pendapatan ditentukan juga oleh penguasaan asset produksi.

Untuk kasus pedesaan Kikuchi, (1977:158) menggambarkan suatu proses untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Secara ringkas ia mengemukakan bahwa kemakmuran masyarakat akan tercipta berdasarkan perpaduan antara beberapa faktor yaitu: (1) perpaduan antara teknologi dengan program pemerintah melalui satu pranata sosial dan struktus kekuasaan yang ada. Dalam hal ini paranata sosial dan kekuasaan harus memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan perpaduan antara teknologi dengan kebijaksanaan. Jika kelembagaan tidak mampu

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

mengakomodasikan hal tersebut dengan baik, maka teknologi akan berdampak negatif terhadap kehidupan sebagian masyarakatnya. (2) perpaduan teknologi dengan faktor produksi dalam menghasilkan output. Perpaduan dari faktor-faktor tersebut akan terlaksana dalam satu susunan kelembagaan yang ada dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya jika faktor yang ada tidak berperan dengan baik atau perpaduaannya tidak terlaksana secara harmonis, maka kesejahteraan masyarakat tidak dapat diwujudkan atau akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan dalam masyarakat. Kaitan antara faktor-faktor tersebut terlihat pada gambar di bawah ini;

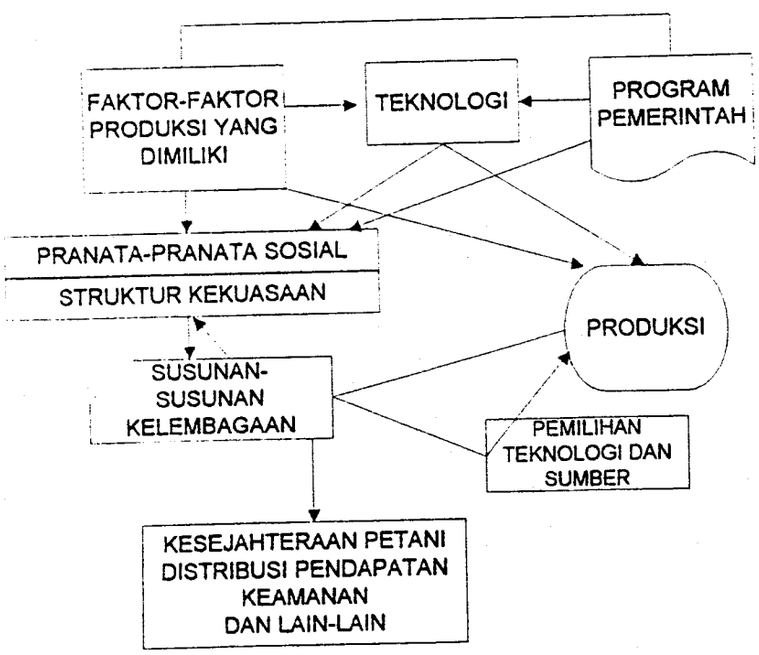

Gambar 2.3 : Faktor-Faktor Penentu Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Sumber : Masao Kikuchi (1977). **Polarization Of Alaguna Village Project**. Dynamicc of Agraria Change Report, Nomor 2.

Secara lebih spesifik faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat dalam studi ini adalah sebagai berikut:

a. Lahan Pertanian

Sektor pertanian merupakan bidang pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat di pedesaan. khususnya bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, faktor produksi tanah mempunyai kedudukan sangat penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat desa karena tanah adalah media untuk terlaksananya kegiatan pertanian maupun kegiatan lainnya. Sejak zaman ekonomi klasik (Ricardo) tanah telah menjadi topik pembicaraan sebagai faktor produksi. Hal ini terbukti dari balas jasa yang diterima oleh tanah jika dibanding dengan faktor produksi lain.

Menurut Wiradi (1984:40) penguasaan tanah menunjukkan penguasaan efektif terhadap tanah, seperti jika seorang memiliki tanah seluas 2 ha, dan menggarap tanah milik orang lain 3 ha melalui sewa, maka ia menguasai tanah seluas 5 ha. Seterusnya Wiradi berpendapat, masalah penguasaan tanah di pedesaan merupakan masalah yang kompleks menyangkut berbagai aspek antara lain hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sebagaimana kita ketahui, saat ini tanah merupakan faktor produksi yang langka karena tidak dapat diperbaharui. Sementara itu kebutuhan akan tanah semakin meningkat, baik untuk keperluan perumahan, usaha tani, perkebunan dan industri. Akibatnya jumlah petani yang memiliki lahan sempit dari waktu ke waktu cenderung

mengalami peningkatan sebagai akibat dari alih kepemilikan. Menurut BPS (1995) jumlah petani yang memiliki lahan kurang dari 0,50 ha mengalami peningkatan dari 10 juta keluarga pada tahun 1983 menjadi 11 juta keluarga tahun tahun 1993.

Bagi petani penguasaan tanah merupakan sesuatu yang amat penting baik melalui pemilikan, sewa dan bagi hasil. Penyebabnya, tanah adalah faktor produksi penting dalam kegiatan pertanian dan mempengaruhi tingkat pendapatan mereka. Di Sumatera Barat kegiatan pertanian masih merupakan sumber penghasilan utama bagi mayoritas penduduknya. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 22,30 persen (Kantor Statistik Sumatera Barat; 1994). Oleh karena itu, penguasaan tanah merupakan faktor yang sangat menentukan pendapatan masyarakat.

Menurut Hayami (1985: 293), sistem penguasaan tanah merupakan penentu alokasi sumberdaya dan distribusi pendapatan dalam komunitas agraris. Demikian juga yang dikemukakan oleh Mintoro (1983:47) bahwa luas penguasaan tanah akan mempengaruhi besarnya pendapatan rumah tangga dari berbagai sumber. Pemilikan tanah yang luas cenderung menyebabkan pendapatan masyarakat petani akan lebih tinggi karena mereka akan dapat melakukan alternatif kegiatan lebih banyak. Sementara petani yang berlahan sempit akan berada dalam kondisi sebaliknya. Selanjutnya studi Mintoro menyimpulkan bahawa pada umumnya rumah tangga yang ditimpa kemiskinan di desa penelitian adalah rumah tangga yang memiliki lahan sempit dan tidak mempunyai lahan. Dengan

demikian rumah tangga yang memiliki lahan sempit memperoleh sumber penghasilan lebih tinggi di luar sektor pertanian ketimbang petani yang memiliki lahan luas.

Hasil studi Gunawan dan Erwidodo (1992:45) dengan menggunakan Model Statistik Korelasi Spearman Rank, menemukan bahwa kemiskinan berkorelasi tinggi dengan penguasaan lahan pertanian. Menurut Sensus Pertanian tahun 1973 di pedesaan Jawa hampir 60 % penduduk tidak memiliki lahan pertanian dan luas rata-rata pemilikan lahan 0,62 ha, sementara menurut Sensus Pertanian 1983 pemilikan lahan pertanian tersebut semakin sempit yaitu 0,61 ha. Sementara di pedesaan di Jawa Barat rata-rata pemilikan lahan per rumahtangga berkisar antara 0,018 - 0,027 ha untuk lahan sawah dan 0,001 - 0,004 ha untuk lahan kering. Jadi, dengan luas lahan yang begitu sempit, petani gurem lebih mengandalkan kegiatan berburuh dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.

Menurut Hayami (1985:294) pertambahan penduduk yang kuat terhadap luas tanah yang terbatas mengakibatkan menurunnya produktivitas marjinal tenaga kerja jika dibandingkan dengan produktivitas marjinal tanah. Sedangkan pemilikan tanah lebih banyak dipunyai oleh elit-elit tertentu. Dengan demikian, aliran pendapatan akan lebih banyak diperoleh oleh orang-orang yang bertanah luas. Dengan menurunnya produktivitas marjinal tenaga kerja mengakibatkan miskinnya penduduk yang tidak memiliki tanah yang kehidupannya banyak tergantung pada penerimaan upah kerja.

b. **Tingkat Teknologi**

Teknologi pertanian baik secara biokimia maupun mekanisasi lebih dikenal dengan istilah revolusi hijau. Penggunaan teknologi baru dapat diartikan sebagai penggunaan input moderen, baik secara kimiawi maupun biologis yang canggih dan mungkin juga lebih mahal. Menurut Sujono dan A.T Birowo (1984:136), kebijaksanaan teknologi baru telah : (a) meningkatkan produksi padi nasional, (b) meningkatkan kesempatan kerja, (c) meningkatkan pendapatan petani dan (d) memperbaiki struktur pendapatan nasional. Selanjutnya Collier dan Sajogyo (1983:45) mengemukakan, penggunaan teknologi yang bercorak biokimia membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk pengolahan tanah, pemupukan dan penyiangan. Dengan dibutuhkan tenaga lebih banyak hal ini berarti akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat pedesaan dan pada gilirannya akan dapat mengurangi kemiskinan.

Studi Hadiwegeno dan Pakpahan (1993:30) menyimpulkan bahwa rendahnya pengenalan dan penerapan teknologi (teknologi produksi usaha tani) merupakan salah satu faktor yang paling menonjol sebagai penyebab kemiskinan di pedesaan. Hal ini juga dikemukakan oleh Gunawan dan Erwidodo (1993:48) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi pertanian telah berperan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan dari sekitar 40 % tahun 1976 menjadi 17 persen 1987. Melalui program Bimas, Inmas dan Supra Insus secara efektif telah meningkatkan produktivitas

padi dari 2,5 ton per ha menjadi 4,5 ton. Dengan meningkatnya produktivitas lahan perhektar, berarti pendapatan petani akan dapat pula ditingkatkan dan sekaligus masalah kemiskinan akan dapat ditanggulangi.

Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Sukarsa (1983: 47) di Kabupaten Tabanan Bali dengan menggunakan **model analisis profit function** ditemukan bahwa pangsa relatif tenaga kerja sebelum penggunaan traktor dalam pengolahan lahan sebesar 18,8 % sedangkan setelah penggunaan traktor menurun menjadi 12,6 %. Pemakaian traktor cenderung menggeser penggunaan tenaga kerja sebesar 118 hari orang kerja (HOK) perkektar menjadi 86 hari orang kerja. Hal yang sama juga dikemukan oleh Sinaga (1978) dan Colier (1974) yang menyatakan bahwa pemakaian teknologi mekanisasi untuk pengolahan tanah dan pengolahan hasil pertanian menimbulkan akibat negatif terhadap kesempatan kerja dan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan dalam struktur agraris pemilikan teknologi mekanis cenderung dimiliki oleh sejumlah kecil orang dan bahkan mereka sering mendapat subsidi untuk membeli teknologi tersebut melalui fasilitas kredit dengan biaya murah.

Sinaga dan White (1984:143) mengemukakan bahwa kemiskinan buatan lebih erat hubungannya dengan perubahan ekonomi, teknologi dan pembangunan itu sendiri. Sebetulnya fenomena tersebut merupakan hal yang wajar karena penerapan teknologi mekanisasi cenderung lebih hemat tenaga kerja. Dengan demikian, para petani haruslah semakin mengerti dengan masalah efisiensi dan skala usaha. Namun Hayami

(1985:114) mengemukakan bahwa sedikit sekali bukti empiris yang menunjukan bahwa pemakaian varitas moderen telah dimonopoli oleh petani besar. Dari 36 desa yang distudi oleh Hayami dengan pendekatan deskriptif ditemukan hanya ada satu desa dimana, petani kecil tidak akses terhadap perubahan teknologi. Artinya penerapan teknologi moderen tidak mengakibatkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, akan tetapi malah sebaliknya yaitu dapat menanggulangi masalah kemiskinan.

Selanjutnya hasil studi deskriptif yang dilakukan Deuster (1988:145-149) di desa Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi baru dapat : (1) meningkatkan produksi padi 140 - 190 %, (2) peningkatan kesempatan kerja dan tingkat upah 30 - 40 %, (3) melalui peningkatkan produksi akan terjadi pula peningkatan keuntungan terhadap pengusaha huller, pengusaha warung kopi dan toko kelontong sekitar 15 % dan (4) distribusi pendapatan secara relatif tetap sama dengan sebelum diperkenalkan teknologi baru.

c. **Kelembagaan**

Kelembagaan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat karena kelembagaan adalah seperangkat aturan yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang dijadikan sebagai pegangan dalam mengadakan bergaining dengan individu maupun dengan kelompok lain (Hayami 1982 dalam Hanafiah 1986: 37). Pakpahan (1989: 24) mengemukakan

kelembagaan muncul sebagai upaya untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu kelembagaan akan berkembang dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kelembagaan dapat lahir secara evolusi yaitu timbul dari masyarakat atau yang lebih dikenal dengan lembaga informal. Selain itu, ada pula kelembagaan yang dibentuk oleh pihak tertentu untuk suatu kepentingan tertentu.

Pakpahan (1989:27) mengemukakan pada dasarnya kelembagaan mengatur tiga hal antara lain penguasaan, pemanfaatan dan transfer sumberdaya. Berperannya suatu lembaga akan sangat tergantung kepada bagaimana lembaga tersebut mengatur ketiga hal di atas. Di samping itu, kelembagaan juga harus mapan dalam satu priode tertentu. Sedangkan kemapanan itu sendiri ditentukan oleh kualitas orang-orang yang berada di dalamnya dan sejauh mana kelembagaan tersebut mampu memenuhi kebutuhan anggota masyarakat.

Kelembagaan formal yang ada di pedesaan dewasa ini antara lain KUD, Bank Perkreditan, Kelompok Tani, Karang Taruna, dan LKMD. Sebagian dari kelembagaan tersebut termasuk ke dalam kelembagaan ekonomi. Kelembagaan ini terbentuk berdasarkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kelembagaan yang ada dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka sebagian dari permasalahan di pedesaan akan dapat dipecahkan.

Kenyataannya belum banyak masyarakat desa yang dapat memanfaat kelembagaan ekonomi yang ada secara efektif, hal

ini disebabkan kurang pahamnya masyarakat terhadap kelembagaan tersebut. Scoot (1967: 269) mengemukakan masyarakat desa tergolong ke dalam lapisan masyarakat yang berlatar belakang sosial ekonomi relatif rendah. Hal ini terlihat dari pendidikannya yang rendah, wawasan pemikiran yang sangat sederhana, kurang memiliki pandangan terhadap masa depan. Akibat dari hal tersebut masyarakat desa kurang akses terhadap kelembagaan yang ada terutama kelembagaan ekonomi.

Dengan kurang aksesnya masyarakat desa terhadap kelembagaan ekonomi yang ada mereka cenderung tidak mendapat manfaat dari kelembagaan tersebut. Akibatnya sebagian masyarakat desa tetap berada dalam keadaan miskin. Sinaga dan Sinaga dan White (1984: 144) mengemukakan, kemiskinan buatan terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Seperti petani yang memperoleh fasilitas kredit dari bank adalah petani yang berlahan luas. Raharjo dalam Hagul (1986:78) mengemukakan program pemerintah melalui Bimas, KUD, Inpres dan sebagainya hanya dinikmati oleh pemilik tanah luas dan elite tertentu saja. Sementara petani kecil kehidupannya hampir tidak mengalami perubahan dari waktu sebelumnya.

Hasil studi diskriptif Sinaga dan White (1984:153) di daerah aliran sungai Cimanuk menyimpulkan bahwa petani yang banyak memperoleh manfaat dari kredit Bimas adalah petani yang memiliki lahan luas (dengan luas >0,50 ha). Sementara

petani dan anggota masyarakat yang tidak bertanah terpaksa mengandalkan kredit dari pihak swasta dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Tidak aksesnya masyarakat miskin dalam memanfaatkan kelembagaan ekonomi yang ada berkaitan dengan kurangnya informasi terhadap kelembagaan yang ada dan terlalu beratnya persyaratan untuk memanfaat kelembagaan tersebut. Dengan kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk memanfaatkan kelembagaan yang ada mengakibatkan kecilnya peluang-peluang ekonomi yang dapat mereka peroleh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Hasil studi deskriptif Hadiwegeno dan Pakpahan (1992:30) menyimpulkan akibat tidak berfungsinya lembaga pelayanan produksi pertanian di beberapa daerah miskin mengakibatkan berkembangnya sistem ijon di lingkungan kegiatan usaha tani. Akibatnya ketergantungan masyarakat terhadap pemilik modal akan semakin kuat dan semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, di samping faktor kesehatan. Menurut Lains (1987:7) kualitas sumberdaaya terdiri atas dua bentuk kualitas fisik dan non fisik. Kualitas fisik seseorang akan terlihat dari kesehatannya, sedangkan kualitas nonfisik seseorang direfleksikan oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang diperolehnya. Payaman (1992:8) mengemukakan bahwa

peningkatan kualitas sumberdaya manusia berkaitan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup umat manusia.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994:64), pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupan mereka secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Satu sama lain akan mendukung terlaksananya pemerataan pendapatan masyarakat. Selanjutnya Payaman (1992:15) mengemukakan pendidikan dan latihan tidak hanya menambah pengetahuan akan tetapi juga akan meningkatkan keterampilan dalam bekerja dan seterusnya akan meningkatkan produktivitas dan akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan.

Para pekerja yang berpendidikan rendah pada umumnya produktivitas kerjanya juga rendah. Hal ini dapat dilihat dari segi jam kerja efektif maupun dari hasil kerja dan pendapatan mereka. Ananta (1988:112) mengemukakan angkatan kerja yang berpendidikan rendah lebih mengandalkan kekuatan fisiknya dari pada daya fikir dan kemampuan intelektualnya. Oleh sebab itu tenaga kerja yang berpendidikan rendah biasanya mampu mengerjakan pekerjaan manual dengan sistem dan peralatan yang sederhana. Dengan demikian kecil sekali peluang bagi mereka untuk dapat melakukan pekerjaan yang berproduktivitas tinggi karena rendahnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Jika tingkat pendidikan dihubungkan dengan tingkat pendapatan Payaman (1992) mengemukakan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja akan menyebabkan rendahnya tingkat pendayagunaan angkatan kerja. Rendahnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja mengakibatkan rendahnya produktivitas dan akhirnya penghasilan keluarga juga akan menjadi rendah.

Sehubungan dengan hal di atas, Allen (1967) dan McComic (1978) dalam Lains (1987:11) mengemukakan, pada umumnya pekerja yang mempunyai pendidikan relatif tinggi akan mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dan karenanya mereka menerima balas jasa (upah) lebih tinggi pula. Menurut Lains (1987) barangkali teori inilah yang diaplikasikan oleh pemerintah Indonesia dalam menetapkan gaji pokok pegawai negeri sipil. Mereka yang memegang gelar sarjana mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri sipil yang berpendidikan lebih rendah dengan masa kerja yang sama.

Gaji pokok pegawai negeri sipil yang berlalu sekarang ini untuk golongan III/a (ijazah sarjana) adalah 2,5 kali lebih besar dari gaji pokok golongan I/a (berijazah sekolah dasar) dengan masa kerja yang sama. Menurut Snogdras dan Wallace (1964) dalam Lains (1987:12) di Amerika Serikat laki-laki dengan pendidikan tinggi selama 4 tahun lebih penerimaannya 4 kali dari mereka yang berpendidikan sekolah dasar kurang dari 8 tahun pada tahun 1958. Meningkatnya pendidikan cenderung akan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya dengan meningkatnya produktivitas akan

meningkatkan pendapatan dan akhirnya juga masalah kemiskinan akan dapat terpecahkan. Dengan demikian, adanya korelasi negatif antara pendidikan dengan kemiskinan masyarakat.

Todaro (1975:363) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan langkah paling strategis dalam usaha mengatasi masalah kemiskinan yang berkaitan erat dengan pendapatan rumah tangga. Selanjutnya Esmara (1986:24) berpendapat bahwa pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Berdasarkan data BPS (1993) terbukti bahwa sebanyak 67,14 % dari rumah tangga miskin di Indonesia (desa dan kota) berasal dari kepala rumah tangga tidak tamat sekolah dasar, sebanyak 26,61 % berasal dari kepala rumah tangga tamat SD, sebanyak 4,20 % kepala rumah tangga berpendikan SLTP dan sebanyak 2,05 % kepala rumah tangga berpendidikan SLTA ke atas. Dari sebaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan kepala keluarga semakin besar peluang bagi mereka untuk berstatus miskin. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil peluang bagi mereka berada dalam kemiskinan. Secara lebih terperinci tingkat pendidikan untuk pedesaan dan perkotaan dapat diikuti pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Persentase Rumah Tangga Miskin di Indonesia
Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Tingkat Pendidikan	Kota	Desa	Kota + Desa
Tidak tamat SD	57,02	72,01	67,14
SD	31,38	24,32	26,61
SLTP	7,03	2,84	4,20
SLTA Ke Atas	4.57	0,83	2,05

Sumber; BPS (1993)

e. Tingkat Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang paling berharga. Untuk itu kesehatan merupakan dambaan seluruh makluk hidup terutama manusia. Dengan tubuh yang sehat manusia dapat melakukan aktivitas dengan baik dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, orang yang sehat akan memperoleh banyak peluang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sementara orang yang kurang sehat sangat terbatas bidang kegiatan yang dapat mereka lakukan. Dengan rendahnya aksesibilitas melakukan kegiatan ekonomi mengakibatkan produktivitas yang dapat dicapai akan menjadi rendah, dan akhirnya yang bersangkutan akan semakin rentan dengan masalah kemiskinan.

Menurut Elfindri (1994:17) pelaksanaan program kesehatan dalam berbagai bentuk pemberian informasi akan mampu menghasilkan keuntungan eksternalitas. Keuntungan eksternalitas yang dimaksud adalah peningkatan

produktivitas sebagai dampak dari peningkatan kesehatan. Dari pendapat tersebut secara implisit tersirat pengertian bahwa tingkat kesehatan merupakan penentu tingkat produktivitas. Semakin baik tingkat kesehatan, akan semakin tinggi tingkat produktivitas dan demikian pula sebaliknya.

Dari data BPS (1994) diperoleh informasi mengenai komposisi jumlah hari sakit masyarakat Sumatera Barat dalam satu bulan seperti berikut; menderita sakit kurang 3 hari (35,20 %), 4 - 7 hari (36,33%), 8 - 14 hari (8,80%), 15 - 21 hari (10,70%) dan 22 - 30 hari (8,89%). Pada umumnya penyakit yang diderita yaitu panas sebanyak 27,78%, batuk sebanyak 16%, pilek sebanyak 17,26%, mencret sebanyak 2,69%, muntaber sebanyak 0,90%, sakit gigi sebanyak 3,18% dan kejang sebanyak 0,88%.

Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan rendahnya produktivitas karena banyak hari kerja yang hilang disebabkan sakit. Dengan rendahnya produktivitas mengakibatkan rentannya suatu rumah tangga dengan kemiskinan. Menurut Lains (1987:9) bagi petani yang kesehatannya rendah, memiliki energi fisik yang tidak mencukupi untuk mengerjakan tugas dan menerima perbaikan/kemajuan teknologi serta terbatasnya perhatian untuk membuat rencana ke depan dan menciptakan sesuatu yang baru yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku.

Masyarakat miskin pada umumnya kurang memperhatikan masalah kesehatan karena rendahnya sosial ekonomi dan relatif jauhnya jarak tempat tinggal dari tempat pelayanan

kesehatan. Di samping juga karena sangat terbatasnya jumlah tempat pelayanan kesehatan. Mereka pada umumnya tinggal pada gubuk-gubuk yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Rumahnya berlantai tanah, tidak mempunyai ventilasi, terbuat dari bahan bangunan yang sangat sederhana sekali dan ukurannya tidak memadai apalagi keadaan sanitasinya. Morley dalam Abbas (1994:26) mengemukakan hubungan antara kesehatan dengan kemiskinan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

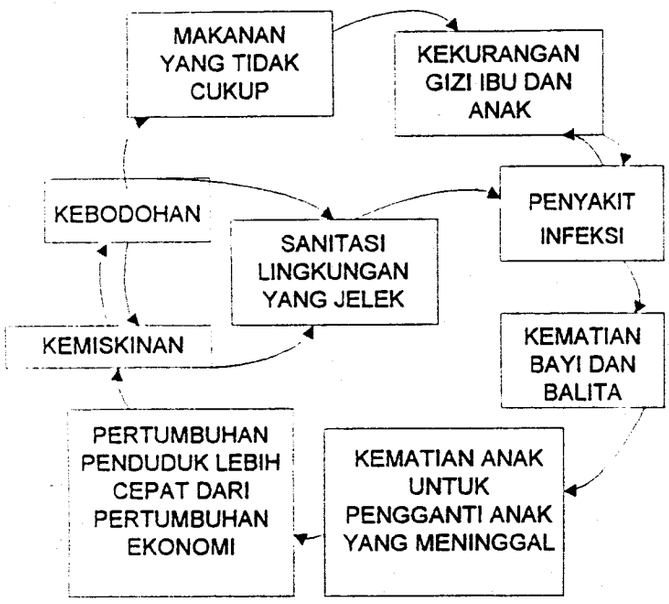

Gambar 2.4 : Hubungan Antara Kesehatan Dengan Kemiskinan Serta Variabel Sosial Lainnya

Sumber : Morley dalam Abbas (1994). **Peranan Kesehatan Dalam Pengentasan Kemiskinan.** Padang: Universitas Andalas.

e. **Mata Pencharian Alternatif**

Mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat pedesaan akan menentukan tingkat kemiskinan atau tingkat

kesejahteraan mereka. Jenis mata pencaharian yang digeluti berhubungan erat dengan tingkat penghasilan mereka. Beberapa waktu belakangan mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat desa tidak lagi bertumpu kepada sektor pertanian tetapi sudah mulai bercampur dengan sektor industri dan jasa. Meskipun demikian, sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak digeluti oleh masyarakat. Sinaga (1984:147) menyatakan bahwa semua golongan rumah tangga di pedesaan cenderung melakukan kegiatan luar pertanian di samping kegiatan bidang pertanian. Tiap golongan pun memiliki alasan masing-masing untuk mengerjakan pekerjaan di luar pertanian.

Kegiatan di luar pertanian berkaitan erat dengan pola pemilikan lahan. Semakin sempit lahan yang dimiliki semakin nyata sumbangan penghasilan di luar kegiatan pertanian terhadap pembentukan penghasilan rumah tangga dan demikian pula sebaliknya. Berdasarkan data BPS (1994) diperoleh informasi bahwa rumah tangga yang memiliki lahan sempit (kurang dari 0,50 ha), penghasilan di luar pertanian memiliki peranan penting terhadap pembentukan pendapatan rumah tangga yaitu sebesar 47,10%. Petani yang memiliki lahan 0,50 - 1 ha sumbangan kegiatan luar pertanian sebesar 39,50 %. Petani yang memiliki lahan di atas 1 ha sumbangan kegiatan di luar pertnian sebesar 16,60 %. Dengan terbuka kesempatan di luar pertanian akan menciptakan peluang lebih besar bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan karena pekerjaan di sektor pertanian bersifat musiman.

Menurut Komalig (1989:98) pada tahun 1988 sektor primer, tetap merupakan sektor yang dominan dalam menyerap tenaga kerja di pedesaan, dengan penyerapannya sebanyak 66,20 % dari jumlah penduduk yang bekerja di pedesaan. Sektor sekunder menyerap sebanyak 10,80 %. Sektor tersier menyerap sebanyak 23,00 %. Selanjutnya menurut BPS (1991) selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi penurunan proporsi angkatan kerja yang bergerak di sektor pertanian dari 54,78 % pada tahun 1980 menjadi 49,25 % tahun 1990. Sektor skunder mengalami peningkatan dari 12,48 % menjadi 16,59 %. Demikian juga sektor tersier dari 32,75 % meningkat menjadi 34,16 pada periode yang sama.

Manning (1984:104) menyatakan pada priode 1971- 1980 koefisien penyerapan tenaga keraja sektor primer jauh lebih rendah dari sektor sekunder dan tersier. Pada priode tersebut koefisien penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menurun dari 0,60 pada priode 1961-1971 menjadi 0,32 pada priode 1971 - 1980. Rendahnya koefisien penyerapan tenaga kerja sektor primer mengakibatkan telah terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Menurunnya proporsi angkatan kerja di sektor primer dan kenaikan di sektor sekunder dan tersier berhubungan erat dengan perkembangan teknologi industri di pedesaan dan semakin lancarnya arus informasi serta transportasi. Dengan lancarnya trasportasi akan memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk melakukan pola nafkah ganda selain

dari bertani seperti berdagang, sopir, tukang sepatu, tukang becak, tukang ojek dan berbagai kegiatan sektor informal lainnya (Sumaryanto; 1989:34).

Pola nafkah ganda adalah strategi bagi rumah tangga dalam menopang kehidupan rumah tangga, apalagi bagi masyarakat miskin dengan segala keterbatasan potensi yang dimilikinya. Pola nafkah ganda artinya anggota rumah tangga terlibat mencari nafkah diberbagai sumber baik di sektor pertanian maupun di luar pertanian sebagai mata pencaharian alternatif (Sajogyo; 1991: 288).

Di Filipina, menurut Quibria (1996:285) pola nafkah ganda merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh rumah tangga miskin dalam menanggulangi kekurangan pendapatan. Pekerjaan yang merendahkan maratabat sekalipun mereka lakukan meskipun penghasilannya tidak seberapa. Dengan demikian pola nafkah ganda merupakan katup pengaman bagi rumah tangga miskin untuk mempertahankan hidup mereka. Secara ekonomis kegiatan tersebut adalah rasional karena tidak adanya pekerjaan lain yang dapat mereka lakukan dengan penghasilan yang relatif lebih tinggi.

Menurut Sitorus (1993:3), pola nafkah ganda, sebagai salah satu unsur dalam strategi sosial ekonomi rumah tangga miskin, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Keterbatasan akses terhadap sumberdaya ekonomi, menyebabkan rumah tangga miskin berupaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi tenaga kerjanya di luar pertanian baik dalam status usaha sendiri maupun buruh;

b. Kegiatan luar pertanian merupakan sumber nafkah yang sangat penting untuk menutup kekurangan di sektor pertanian;

Menurut Wahyuni (1993:12) pola nafkah ganda berbeda antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial ekonomi masyarakat desa yang berbeda satu sama lainnya. Sajogyo (1991:230) mengelompokkannya sebagai berikut:

a. Lapisan Atas ; pola nafkah ganda merupakan strategi untuk mengakumulasikan surplus pertanian di luar sektor pertanian;
b. Lapisan Tengah; pola nafkah ganda merupakan strategi konsolidasi, di mana sektor luar pertanian dipertimbangkan penopang ekonomi;
c. Lapisan Bawah; pola nafkah ganda merupakan strategi bertahan hidup; di mana sektor luar pertanian merupakan sumber nafkah penting untuk menutup kekurangan sektor pertanian.

Pergeseran pola nafkah tunggal ke arah pola nafkah ganda dari sisi pembangunan pedesaan sebetulnya sangat menguntungkan. Pertama, dengan berkembangnya kesempatan kerja di luar pertanian diharapkan dapat menurunkan "man/land ratio". Jika ini terjadi, maka peranan distribusi penguasaan tanah sebagai faktor penentu distribusi pendapatan akan dapat dihilangkan. Dengan demikian ketegangan sosial yang timbul sebagai akibat kepincangan distribusi penguasaan tanah tidak akan terjadi lagi. Kedua,

dengan berkurangnya penggunaan tenaga kerja per hektar dalam kegiatan usahatani, akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Selama ini terjadi luas lahan yang sempit diolah oleh banyak orang akibatnya produktivitas tenaga kerja semakin lama semakin menurun demikian juga dengan pendapatan. Ketiga, pengangguran musiman di pedesaan akan dapat dikurangi pada masa-masa tidak adanya kegiatan di pedesaan seperti setelah selesai bertanam dan menunggu panen. Keempat, akan terjadinya peningkatan permintaan terhadap hasil produksi pertanian karena peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Distribusi Penguasaan Lahan dan Pendapatan

Jhonston dan Clark (1985:210) mengemukakan luas dan distribusi penguasaan tanah serta pilihan teknologi berpengaruh terhadap tingkat dan distibusi pendapatan masyarakat. Seterusnya tingkat dan distribusi pendapatan dan keputusan untuk manabung dan investasi berpengaruh pula terhadap tingkat dan distribusi penguasaan lahan.

Selanjutnya hasil studi Mintoro (1983:45) menyimpulkan bahwa pada desa-desa yang kesempatan kerja di luar pertanian sangat terbatas, distribusi penguasaan lahan berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan, sedangkan bagi desa-desa yang kesempatan kerja di luar pertanian sudah terbuka, distribusi penguasaan lahan tidak berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan. Dengan terbuka kesempatan berusaha di luar pertanian menunjukan bahwa penghasilan petani bukan hanya berasal dari sektor

pertanian tetapi juga berasal dari kegiatan lain. Dengan demikian penguasaan lahan bukan satu-satunya sumber penghasilan bagi petani dan yang menentukan distribusi pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 1990 dapat diketahui bahwa rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga di Indonesia 0,38 ha sementara sebarannya cukup merata sebagaimana ditunjukan oleh Gini Koefisien (0,3213). Kusus untuk Sumatera Barat Hasil studi Karimi (1983:28) memperlihatkan bahwa selama 10 tahun terakhir terjadinya peningkatan pemerataan penguasaan tanah dimana pada tahun 1973 ditunjukan oleh koefisien Gini sebesar 0,51 sedangkan tahun 1983 sebesar 0,41 dan menurut Susenas (1990) ditunjukkan oleh keofisien Gini sebesar 0,2690. Meratanya distribusi penguasaan lahan di Sumatera Barat disebabkan oleh pola pemilikan lahan di daerah ini berbeda dengan di daerah lain. Di Sumatera Barat terdapat dua bentuk pola penguasaan lahan yaitu; (1) lahan pertanian kolektif yang dimiliki oleh satu garis keturunan ibu dinamakan harta pusaka tinggi (pusako tinggi). Lahan jenis ini digunakan secara bersama dan bergantian. Lahan tersebut tidak dapat diperjual belikan kecuali jika dipenuhi persyaratan tertentu secara adat. Dengan cara demikian proses berpindah tangannya, lahan menjadi relatif sulit, namun cara ini mempunyai dampak positif terhadap pemerataan penguasaan lahan di daerah ini, (2) lahan milik pribadi yang dibeli sendiri disebut harta pusaka rendah, dapat digunakan secara pribadi dan dipindah tangankan dengan cara biasa.

Todaro (1985: 306) menyatakan dikebanyakan negara yang struktur pemilikan tanahnya tidak merata merupakan penyebab utama ketidak merataan pembagian pendapatan dan kesejahteraan di pedesaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh hasil studi Syahruddin (1980: 36) bahwa terdapat hubungan yang berarti antara distribusi pemilikan tanah dengan distribusi pendapatan di pedesaan Sumatera Barat.

Hasil studi diskriptif yang dilakukan Hayami (1981: 46) di desa Subang menyimpulkan bahwa luas pemilikan lahan yang tidak merata menyebabkan besarnya pendapatan juga tidak merata. Tidak meratanya distribusi pendapatan disebabkan, kegiatan pertanian merupakan satu-satunya pendapatan bagi masyarakat.

Syukur (1988:54) di pedesaan Sulawesi Selatan menyimpulkan terdapat hubungan searah antara distribusi penguasaaan lahan dengan distribusi pendapatan. Dalam hal ini luas lahan mempunyai peranan penting dalam menciptakan arus masuk pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian distribusi pendapatan akan terefleksi oleh distribusi penguasaan lahan.

Colier (1979: dalam Hayami (1985:280) mengemukakan bahwa pendapatan dari kegiatan di luar pertanian sangat penting sebagai tambahan pendapatan yang bersumber dari kegiatan pertanian. Selanjutnya dia mengemukakan, pendapatan dari kegiatan non pertanian dalam perekonomian agraris secara teoritis dapat berpengaruh positif terhadap pemerataan pendapatan jika pola penguasaan lahan pertanian

relatif tidak merata. Berpengaruh negatif jika pola penguasaan lahan relatif mereta dan netral jika sumbangan penghasilan kegiatan luar pertanian relatif kecil terhadap pendapatan rumah tangga.

Hasil studi yang dilakukan Sinaga dan White (1984: 145) di daerah aliran sungai Cimanuk memperlihatkan semakin besar proporsi pendapatan dan kegiatan non pertanian tidak memperkecil pemerataan tetapi sebaliknya yaitu memperbesar ketidakmerataan pendapatan yang berasal dari pertanian. Lebih lanjut studi tersebut menemukan golongan petani yang berlahan luas memperoleh pendapatan melebihi biaya hidupnya dan mereka mampu menginvestasikan surplus pendapatannya kepada usaha yang bersifat padat modal seperti alat pengolah hasil pertanian, membuka warung. Di lain pihak petani kecil dan buruh tani yang penghasilan tidak cukup untuk membiayai keluarganya, mereka terpaksa mencari pekerjaan yang bersifat padat tenaga kerja yang tidak membutuhkan modal besar seperti pedagang bakulan, kerajinan tangan, bidang jasa dan sektor informal lainnya

Studi yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dalam dalam Kustiah (1983:77) menyimpulkan bahwa semakin miskin suatu daerah maka semakin merata distribusi pendapatannya dan demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan pada usahatani yang dilakukan oleh masyarakat miskin adalah pertanian berlahan sempit, kegiatan pertaniannya cenderung mengandalkan tenaga kerja ketimbang modal. Penggunaan tenaga kerja di luar keluarga cenderung tidak dibayar karena adanya pertukaran tenaga kerja di antara mereka

secara resiprokal. Berbeda halnya dengan petani yang berlahan luas yang pada umumnya mengandalkan faktor modal dan tenaga kerja bayaran dengan berprinsip efisiensi skala usaha. Dengan kondisi demikian pembagian pendapatan pada kelompok petani meskin cenderung akan lebih merata ketimbang petani mampu. Studi tersebut menunjukan bahwa besarnya koefisien Gini untuk daerah hampir miskin sebesar 0,270, daerah miskin sebesar 0,234, daerah sedikit lebih miskin 0,213 dan daerah sangat miskin 0,161.

B. Kerangka Pemikiran

Masalah kemiskinan di pedesaan secara gamblang terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan, tidak meratanya distribusi pendapatan dan pemilikan faktor produksi antar kelompok masyarakat.

Faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat miskin sangat terbatas sekali sebagaimana ditunjukkan oleh luas lahan yang sempit, rendahnya tingkat tekonologi rendah, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya aksessibiltas terhadap kelembagaan dan kurangnya mata pencaharian alternatif. Dengan rendahnya faktor tersebut akibatnya sangat terbatas kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh rumah tangga miskin untuk meningkat pendapatan dan kesejahteraannya.

Dengan terbatasnya faktor produksi yang dimiliki, masyarakat miskin pada umumnya hanya melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki produktivitas rendah. Dengan demikian

masyarakat miskin kurang akses dalam memanfaat peluang ekonomi yang ada, akibatnya mereka hanya sekedar bertahan untuk hidup dan sangat kecil peluang bagi mereka untuk keluar dari kondisi kemiskinan tersebut.

Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, masyarakat desa cenderung melakukan kegiatan nafkah ganda (pencaharian alternatif) apalagi masyarat miskin. Dengan pola nafkah ganda rumah tangga akan dapat menutupi kekurangan penghasilannya. Di sisi lain pola nafkah ganda juga akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan, karena produktivitas usaha, yang dilakukan di luar bertani pada umumnya bervariasi, demikian pula dengan tingkat pendapatan. Dengan demikian rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif akan memiliki distribusi pendapatan yang relatif timpang dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak mimiliki mata pencaharian alternatif.

Kemiskinan relatif di pedesaan berhubungan erat dengan tidak meratanya distribusi penguasaan lahan dan pendapatan. Secara kongkrit kemiskinan relatif akan dapat dideteksi dengan melihat tingkat pemerataan antar kelompok masyarakat dengan menggunakan Koefisien Gini. Dengan tidak meratanya distribusi penguasaan lahan akan berpengaruh pula terhadap distribusi pendapatan. Semakin merata penguasaan lahan akan merata pula distribusi pendapatan, karena lahan pertanian bagi masyarakat desa merupakan faktor produksi utama dan sebagai sumber penghasilan bagi rumah tangga.

Masyarakat yang memiliki lahan luas, akan dapat melakukan usaha tani yang relatif besar dengan investasi

yang cukup besar, sementara petani yang memiliki lahan sempit hanya dapat melakukan kegiatan usaha tani yang relatif kecil pula dengan cara yang amat sederhana. Dengan perbedaan skala usaha mengakibatkan produktivitas yang diperoleh, pasti akan berbeda. akhirnya hal ini akan mempengaruhi penghasilan yang diterima.

Rumah tangga miskin ditandai dengan luas lahan yang sempit, namun distribusinya lebih merata, demikian juga dengan pendapatan mereka. Meratanya distribusi pendapatan pada rumah tangga miskin disebabkan oleh distribusi penguasaan lahannya yang merata dan penggunaan tenaga kerja dalam usaha pertanian cenderung tidak di bayar karena ada pertukaran tenaga kerja diantara mereka secara resiprokal. Berbeda halnya dengan rumah tangga yang bukan miskin, dengan lahan yang relatif luas, teknologi dan modal yang mencukupi akan dapat memilih kegiatan usaha tani yang relatif menguntungkan. Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan alur pemikiran penelitian seperti gambar di bawah ini.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

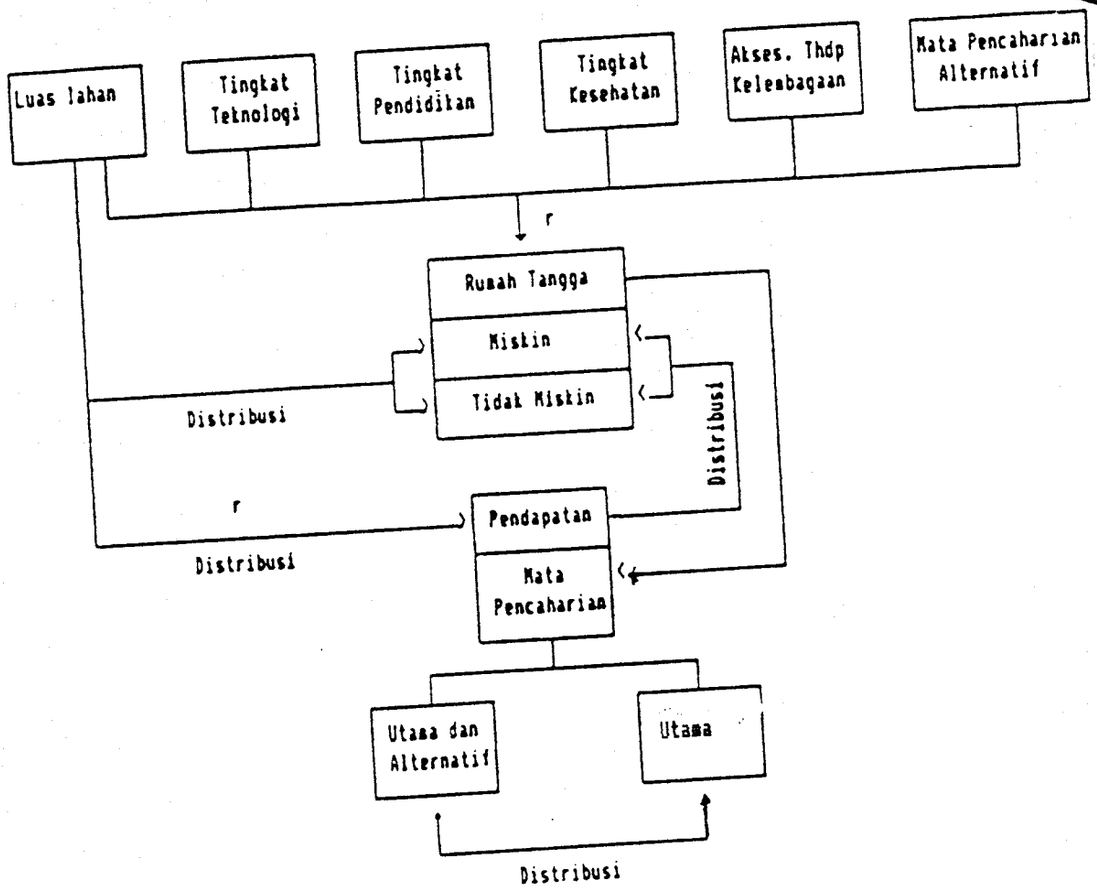

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

C. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dikemukan, dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Luas lahan pertanian, tingkat teknologi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, aksessibilitas terhadap kelembagaan dan mata pencaharian alternatif menunjukkan pengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat;

2. Distribusi penguasaan lahan rumah tangga berstatus miskin cenderung lebih merata dibandingkan dengan distribusi penguasaan lahan rumah tangga yang tidak berstatus tidak miskin;
3. Distribusi pendapatan rumah tangga yang berstatus miskin cenderung lebih merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumah tangga keluarga tidak berstatus miskin;
4. Distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif cenderung lebih merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif;
5. Distribusi penguasaan lahan menunjukkan pengaruh terhadap distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Ruang lingkup penelitian ini adalah rumah tangga yang tersebar pada 674 desa miskin di Sumatera Barat yang terdiri dari 94.233 rumah tangga miskin dan 73.339 rumah tangga yang tidak berstatus miskin, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Desa Miskin, Rumah Tangga Berstatus Miskin
dan Rumah Tangga Tidak Berstatus Miskin di Sumatera Barat

No.	Kabupaten-Kodya	Jml.Desa Miskin	Jml Rumah Tangga Berstatus Miskin	Jml Rumah Tangga Berstatus Tidak Miskin
1	Pesisir Selatan	103	18.062	14.731
2	50 Kota	49	6.286	9.624
3	Pasaman	98	20.062	1.421
4	Tanah Datar	55	4.436	6.751
5	Solok	96	14.177	12.842
6	Sw.Lunto. Sjj	84	9.617	3.870
7	Pd.Pariaman	108	7.806	10.740
8	Kab. Agam	57	10.018	8.703
9	Kodya SW. Lunto	9	1.289	1.757
10	Kodya Padang	18	1.776	3.022
11	Payakumbuh	7	704	508
	JUMLAH	674	94.233	73.339

Sumber: Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Sumatera Barat 1994

2 Sampel

Penarikan sampel dilakukan atas dua langkah yang terdiri dari:

a. Penentuan sampel desa dilakukan atas tiga tahap (multi stage) yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, menetapkan dua Daerah Tingkat II secara purposive dengan

pertimbangan bahwa di Sumatera Barat terdapat dua subsistem nilai budaya yaitu ; subsistem nilai rantau (daerah pesisir pantai) dan sub sistem nilai budaya Luhak Nan Tigo (daerah daratan). Untuk daerah pesisir pantai (rantau) ditetapkan secara porposive Kabupaten Padang Pariaman dan untuk daerah daratan (Luhak Nan Tigo) ditetapkan Kabupaten Agam.

Dipilihnya Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah yang mewakili sub sistem nilai budaya rantau (pesisir pantai), karena daerah ini paling luas daerah pertaniannya, jika dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Di samping itu Kabupaten Padang Pariman pada tahun 1992 pernah dijadikan sebagai proyek percontohan Supra Insus untuk Propinsi Sumatera Barat (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar;1992). Dengan demikian variabel-variabel yang dimunculkan dalam studi ini akan sangat relevan dengan kondisi lapangan. Kabupaten Agam dipilih sebagai daerah yang mewakili subsistem nilai budaya Luhak Nan Tigo (daerah daratan), karena Kabupaten Agam, secara geografis relatif bersamaan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian data yang diperoleh di lapangan diharapkan tidak akan terlalu bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor geografis daerah penelitian.

Tahap kedua menetapkan empat kecamatan pada masing-masing Daerah Tingkat II yang dipilih, Kabupaten Padang Pariaman diwakili oleh Kecamatan Limo Koto Kampung Dalam, Kecamatan Tujuh Koto Sei. Sarik,

Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung . Kabupaten Agam diwakili oleh Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Empat Koto, Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Tanjung Mutiara. Pemilihan kecamatan dilakukan atas dasar pertimbangan, di mana persentase desa miskinnya cukup besar. Kecuali ada empat kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang terletak di Kepulauan Mentawai yaitu Kecamatan Siberut Utara, Siberut Selatan, Sipora dan Pagai Utara-Selatan tidak dipertimbangkan sebagai sampel penelitian karena daerah tersebut masih terisolasi. Dengan demikian dikawatirkan data yang diperlukan dalam studi ini sulit diperoleh. Keterangan lebih lanjutnya dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Desa Miskin Di Kabupaten Padang Pariaman
dan Kabupaten Agam

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Miskin	Persentase
Kabupaten Padang Pariaman			
1. Kec. Pagai Utara-Selatan	10	9	90.00
2. Kec. Sipora	10	7	70.00
3. Kec. Siberut Selatan	10	7	50.00
4. Kec. Siberut Utara	10	6	60.00
5. Bt. Anai	9	3	33,33
6. Kec. Lubuk Alung	18	2	11,11
7. Kec. Nan Sabaris	26	7	26,92
8. Kec. Geringging	45	6	13,33
9. Kec. VII Koto	20	9	45.00
10. Kec. V Koto	18	8	44,44
11. Kec. Sei Limau	24	5	20,83
12. 2 X 11 Lingkung	15	7	46.00
13. Kec. Pariaman Selatan	20	5	25.00
14. Kec. Pariaman Tengah	20	3	15.00
15. Kec. Pariaman Utara	19	8	42.00
Kabupaten Agam			
1. Kec. Tj. Mutiara	11	8	72.73
2. Kec. Lubuk Basung	18	8	44,44
3. Kec. Tanjung Raya	20	7	35.00
4. Kec. Matur	14	2	14,29
5. IV Koto	19	7	36,84
6. Kec. Banuhampu Sei.Puar	29	7	24,14
7. IV Angkat Candung	33	6	18,18
8. Kec. Baso	16	1	6,25
9. Kec. Tilatang Kamang	30	1	3,33
10. Kec. Palembayan	17	4	23,53
15. Kec. Palupuh	24	7	25.00

Sumber: Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (1994)

Tahap ketiga menetapkan secara purposive lima desa miskin pada masing-masing kecamatan terpilih. Dengan demikian jumlah sampel desa adalah 2 x 4 x 5 = 40 desa. Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa jumlah desa miskin pada kecamatan terpilih relatif sedikit (tidak sampai 10 desa). Dengan demikian, memilih lima desa miskin sebagai sampel, sudah sangat mewakili keadaan desa miskin secara keseluruhan. Menurut Arikunto (1992), penepatan ukuran sampel sebesar 25 - 30% sudah

cukup mewakili populasi, apalagi jika keragaman populasinya relatif kecil. Penentuan desa-desa sebagai objek penelitian dilakukan secara sembarang (random) dengan nama-nama desa sebagi berikut:

Tabel 3.3
Nama-Nama Desa Sampel Penelitian

Kecamatan	Desa	Status
1. V Koto Kampung Dalam	- Limpur Barat	Miskin
	- Limpur Utara	sda
	- Kd. Ganting Selatan	sda
	- Kd. Ganting Timur	sda
	- Cimpa Selata	sda
2. VII Koto Sei. Sarik	- Toboh Mandailing	sda
	- Toboh Sikumbang	sda
	- Limau Hantu	sda
	- Kampung Duku	sda
	- Buluh Kasok	sda
3. Pariaman Utara	- Cubadak Air Selatan	sda
	- Cubadak Air Utara	sda
	- Tungkal Selatan	sda
	- Tungkal Utara	sda
	- Sikapak Barat	sda
4. 2 x 11 Enam Lingkung	- Palabihan	sda
	- Aspiran	sda
	- Ladang Laweh	sda
	- Ganting	sda
	- Toboh Ketek	sda
5. Tanjung Raya	- Pandan	sda
	- Belo-Belo	sda
	- Lubuk Gao	sda
	- Dalko	sda
	- Pantai Barat	sda
6. Lubuk Basung	- Anak Air Dadok	sda
	- Kubu Anau	sda
	- Kp. Caniago	sda
	- Ujung Padang	sda
	- Padang Tongga	sda
7. Tanjung Mutiara	- Gasan Kaciak	sda
	- Bukit Malintang	sda
	- Cacang Randah	sda
	- Banda Gadang	sda
	- Sungai Nibuang	sda
8. IV Koto	- Hulu Bandar	sda
	- Paladangan	sda
	- Toboh	sda
	- Jalan Banting	sda
	- Ranah	sda

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

b. Penentuan ukuran sampel rumah rumah tangga dilakukan dengan menggunakan **Model Alokasi Neyment** dalam Nazir (1985:350), model tersebut adalah:

$$n = \frac{(N_i \cdot \sigma_i)^2}{N^2 \cdot D + N_i \sigma_i^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Total Populasi

N_i = Sub populasi starata ke $_i$

σ_i^2 = Variansi pendapatan sub populasi ke $_i$

D = Maksimum salah acak pada taraf kepercayaan 90 % adalah 0,06.

Dengan menggunakan **Model Alokasi Neyment** dan data pendapatan rumah tangga keadaan tahun 1991 yang diperoleh dari Kantor Statistik Sumatera Barat, diperoleh hasil seperti berikut:

Tabel 3.4
Analisis Ukuran Sampel Penelitian

Kelompok	Sub Populasi	Variansi ($_i^2$)	N_i $_i$	N_i $_i^2$
RT. Miskin	94233	7769,56	830617	7321489
RT.Tidak Ber-status Miskin	73339	9893,79	729485	7256007
Σ	167572		1560102	14577496

$$n = \frac{(1560102)^2}{(167572)^2 . 0,06 + 14577496}$$

$$= \frac{24.339.182.500}{31.425.721} = 774,49$$

Berdasarkan analisis di atas diperloleh ukuran sampel sebanyak 774,49 rumah tangga. Sampel tersebut dialokasikan ke dalam dua sub sampel dengan cara berikut;

$$S_i = \frac{N_i \sigma_i}{N_i \sigma_i} . n$$

Dengan demikian dapat diketahui sub sampel masing-masing rumah tangga:

$$\text{Rumah Tangga Miskin} = \frac{830617}{1560102} \times 774,49 = 412,34$$

dibulatkan menjadi 412 rumah tangga

$$\text{Rumah Tangga Tidak Miskin} = \frac{729485}{1560102} \times 774,49 = 362,14$$

dibulatkan menjadi 362 rumah tangga.

Setelah diketahui sampel masing-masing kelompok rumah tangga, selanjutnya dialokasikan kepada jumlah desa sampel yang telah diketahui. Rumah tangga miskin pada masing-masing desa sampel adalah 412 : 40 = 10,3 dibulatkan menjadi 10 rumah tangga dan rumah tangga tidak berstatus meskin sebanyak 362 : 40 = 9,05 dibulatkan menjadi 9 rumah tangga.

B. Definisi Operasional

1. **Kemiskinan** adalah ketidakmampuan sebuah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk Sumatera Barat menurut BPS (1993) sebuah rumah tangga dikatakan miskin jika memiliki pendapatan perkapita/bulan di bawah Rp. 25.384,- untuk perkotaan dan Rp. 16.959,- untuk pedesaan. Selanjutnya sebuah desa dikatakan mikin, jika lebih 60 persen dari rumah tangga di wilayah desa tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Variabel kemiskinan rumah tangga dalam studi ini diukur secara dikotomi yaitu skor 1 untuk rumah tangga miskin dan skor 0 untuk rumah tangga yang tidak berstatus miskin.

2. **Pemilikan lahan** adalah luas lahan yang dikuasi oleh rumah tangga sebagai faktor produksi untuk kegiatan pertanian baik lahan sawah maupun ladang baik yang berasal milik sendiri, sewa dan bagi hasil. Variabel ini diukur dengan cara mengelompokakan penguasaan lahan ke dalam tiga kategori yaitu: di bawah 0,25 ha, >0,25 - 0,50 ha dan di atas 0,50 ha. Masing-masing kategori diberi skor secara polytomous. Skor 1 untuk rumah tangga yang memiliki lahan di bawah 0,25 ha, skor 2 untuk pemilikan lahan > 0,25 - <0,50 ha dan skor 3 untuk pemilikan lahan 0,50 hektar ke atas.

3. **Tingkat teknologi** adalah kesediaan petani dalam menggunakan input-input pertanian moderen seperti bibit unggul, pupuk buatan, racun hama, racun rumput, zat perangsang tumbuh dan menggunakan mekanisasi pertanian. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan rumah tangga untuk pembayaran pembelian input pertanian, biaya penyusutan peralatan dan biaya sewa pada musim tanam sebelum penelitian dilakukan.

4. **Tingkat pendidikan** adalah pendidikan formal yang pernah diduduki oleh kepala keluarga. Variabel ini diukur dengan cara mengelompokan pendidikan ke dalam empat katagori yang terdiri dari : Tidak pernah sekolah skor 0, Sekolah Dasar skor 1, SMTP skor 2 dan SMTA ke atas skor 3. kepala keluarga yang pernah bersekolah dan skor 0 untuk yang tidak pernah bersekolah.

5. **Tingkat kesehatan**, dalam studi ini diukur dengan menggunakan dummy variabel yaitu skor 1 untuk kepala rumah tangga yang pernah mengalami sakit selama satu tahun belakangan dan skor 0 untuk yang tidak pernah mengalami sakit.

6. **Aksessibilitas** adalah kesempatan rumah tangga untuk memanfaatkan kelembagaaan ekonomi yang ada di pedesaan. Kelembagaan ekonomi yang dimaksud adalah KUD, Bank Perkreditan dan Kelompok Tani. Aksessibilitas tersebut diukur dengan menggunakan daftar pernyataan yang terdiri dari beberapa item yang mengacu kepada fungsi masing-

masing kelembagaan tersebut. Setiap item diukur dengan menggunakan skala Likert dengan rentangan 0 - 3. Nilai variabel adalah nilai rata-rata yang berasal dari total skor dibagi dengan jumlah item. Jika hasil bagi di bawah 0,50 di hapuskan dan jika lebih dibulatkan ke atas. Kategori skor masing-masing item sebagai berikut;

- Selalu 3
- Kadang-Kadang 2
- Jarang dengan skor 1
- Tidak pernah dengan skor 0

7. **Mata pencaharian alternatif** adalah kegiatan produktif di luar pertanian yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dalam menunjang kehidupan rumah tangga. Variabel ini diukur dengan menggunakan peubah boneka (dummy) yaitu: skor 1 untuk rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif dan skor 0 untuk rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan alternatif.

8. **Distribusi pendapatan** adalah perbandingan antara proporsi rumah tangga dengan proporsi pendapatan pada tingkat kecamatan. Pendapatan dihitung berdasarkan pendekatan penerimaan yang berasal dari keseluruhan penghasilan yang diterima oleh rumah tangga baik yang berasal dari kegiatan pertanian maupun kegiatan bukan pertanian. Untuk mengetahui distribusi pendapatan digunakan Indeks Gini. Indeks ini mimiliki nilai 0 - 1, jika perhitungan Indeks Gini mendekati 0 berarti distribusi pendapatan sangat

merata dan jika mendekati 1 berarti distribusi pendapatan sangat timpang. Oshima dalam Sigit (1980) mengelompokan Indek Gini ke dalam tiga kategori yaitu:

< 0,30 = Merata

0,30 - 40 = Sedang

> 0,40 = Timpang

Formula yang digunakan untuk mencari Indeks Gini seperti berikut.

$$GK_i = 1 - \sum_{1}^{k} f_i \, (y_i + y_i - 1)$$

Keterangan;

GK_i = Gini Koefisien kecamatan ke i

y_i = Proporsi kumulatif jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke i

f_i = Jumlah rumah tangga dalam kelas i

k = Jumlah kelas

9. **Distribusi penguasaan lahan** adalah perbandingan proporsi rumah tangga dengan proporsi lahan pada tingkat kecamatan. Penguasaan lahan yang diperhitungkan dalam studi ini dibatasi pada luas lahan sawah saja, karena pada umumnya rumah tangga hanya mengusahakan usahatani. Sementara lahan kering relatif sulit untuk mengetahuinya dan juga tidak semua rumah tangga mengusahakannya. Luas lahan yang dihitung adalah luas lahan sawah yang digunakan oleh masing-masing rumah tangga untuk kegiatan pertanian pada musim tanam sebelumnya baik yang berasal

dari milik sendiri, sewa dan bagi hasil. Untuk mengetahui distribusi penguasaan lahan gunakakan Indeks Gini dengan formula seperti berikut;

$$GK_i = 1 - \sum_{1}^{k} f_i \, (y_i + y_i - 1)$$

Keterangan;

GK_i = Gini Koefisien kecamatan ke i

y_i = proporsi kumulatif luas lahan rumah tangga sampai kelas ke i

f_i = Jumlah rumah tangga dalam kelas i

k = Jumlah kelas

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dikumpulkan terdiri dari luas lahan, tingkat teknologi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, aksessibilitas terhadap kelembagaan, mata pencaharian alternatif, tingkat pendapatan rumah tangga. Data ini dikumpulkan dengan teknik survey dengan menggunakan angket dan wawancara ditujukan kepada kepala rumah tangga. Data skunder yang diperlukan antara antara lain data yang berhubungan dengan keadaan wilayah masing-masing desa, kecamatan dan kabupaten terpilih. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik observasi dokumentasi melalui kantor Kepala Desa, kantor Camat dan Kantor Bappeda masing-masing kabupaten terpilih.

D. Teknik Analisis

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Deskripsi Data

Data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan masing-masing variabel sebelum dianalisis secara kuantitatif terlebih dahulu akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan dianalisis secara deskriptif. Hal ini akan sangat berguna dalam menampilkan data yang tidak dianalisis secara kuantitatif.

2. Pendugaan

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas luas lahan, teknologi, aksessibilitas terhadap kelembagaan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan mata penaharian alternatif terhadap kemiskinan dalam studi ini digunakan **Multiple Logistic Regression Model**. Model tersebut dapat menunjukkan probabilitas suatu rumah tangga berada dalam kemiskinan sebagai akibat adanya variabel-variabel bebas yang diduga sebagai faktor penyebab kemiskinan. Probabilitas tersebut merupakan suatu **conditional probability** yang didasarkan kepada suatu asumsi mengenai variabel random yang diteliti berbentuk **logistic distribution function**. Menurut Arief (1993:66) model ini telah digunakan oleh Ghaiha (1985) dalam studinya tentang kemiskinan di pedesaan India. Selanjutnya Gujarati (1993:554) menyatakan logit model berasal dari

kata **Logistic distribution function** dengan persamaan, seperti berikut;

$$P_i = EY=1|X_i = \frac{1}{1 + e^{-(B1+B2Xi)}} \qquad (1)$$

Persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut;

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Zi}} \qquad (2)$$

Keterangan;

Z_i adalah $B_1 + B_nX_i$

Range P_i berkisar antara 0 - 1 dan P_i berhubungan secara non linier dengan Z_i

Jika P_i adalah notasi untuk rumah tangga yang berstatus miskin dan $1-P_i$ adalah notasi untuk rumah tangga yang tidak berstatus miskin, maka peluang untuk sebuah rumah tangga tidak berstatus miskin adalah seperti berikut;

$$1 - P_i = \frac{1}{1 + e^{Zi}} \qquad (3)$$

Seterusnya dengan menggabungkan persamaan (2) dengan persamaan (3) diperoleh persamaan berikut;

$$\frac{P_i}{1-P_i} = \frac{1 + e^{Zi}}{1 + e^{-Zi}} = e^{Zi} \qquad (4)$$

Untuk menduga persamaan (4) terlebih dahulu persamaan tersebut harus ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan logaritma natural seperti berikut;

$$L_i = Ln \left(\frac{P_i}{1- P_i} \right) = Z_i \qquad (5)$$

Model spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat adalah seperti berikut:

$$L_i = Ln \left(\frac{P_i}{1-P_i} \right) = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + \ldots\ldots B_6X_6 + U_i \qquad (6)$$

Keterangan:

$Ln \frac{P_i}{1-P_i}$ = Kemungkinan sebuah rumah berstatus miskin

B_0 = Intersep garis regresi

X_1 = Luas lahan

X_2 = Teknologi

X_3 = Pendidikan kepala rumah tangga

X_4 = Tingkat Kesehatan

X_5 = Aksesibilitas terhadap kelembagaan ekonomi

X_6 = Mata pencaharian alternatif

U_i = Kesalahan Penganggu

Metode penaksiran persamaam (6) dilakukan dengan menggunakan pendekatan **Maximum Likelihood**, dengan bantuan program kumputer SPSS.

b. Untuk mengetahui kemungkinan sebuah rumah tangga berstatus miskin sebagai akibat pengaruh satu variabel bebas digunakan model statistik Odds Ratio dengan formula seperti berikut;

$$OR = e^{bi}$$

Keterangan:

OR = Odds Ratio

e = Log Natural = 2,71828

b_i = Koefisien Regresi Variabel ke i

c. Untuk mengetahui pengaruh distribusi penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan digunakan model regresi linier sederhana seperti berikut;

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = Distribusi Pendapatan

X = Distribusi Penguasaan Lahan

3. **Pengujian Hipotesis**

a Untuk menguji hipotesis nomor 1 yang berhubungan dengan **Multiple Logistic Regression Model** digunakan model statistik Chi-Square dengan formula seperti berikut.

$$X^2 = \sum_{t=1}^{G} \frac{N_i (P_i - P_i*)^2}{P_i* (1 - P_i*)}$$

Keterangan:

X^2 = Chi-Square

N_i = Frekuensi pada masing-masing sel

P_i = Probabilitas yang aktual

P_i* = Probabilitas yang diharapkan

G = Jumlah sel

b Untuk menguji hipotesis nomor 2,3 dan 4 digunakan model statistik **Pooled Variance t Model** dengan formula seperti berikut;

$$t = \frac{\bar{G}_1 - \bar{G}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Keterangan:

$\bar{G}_1$ = Nilai rata-rata kelompok pertama

G_2 = Nilai rata-rata kelompok dua

S_1^2 = Variansi kelompok satu

S_2^2 = Variansi kelompok dua

n_1 = Banyak sampel kelompok satu

n_2 = Banyak sampel kelompok dua

c Untuk menguji hipotesis nomor 5 yang berhubungan dengan model regresi linier sederhana digunakan model statistik t-test dengan formula seperti berikut;

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Keterangan:

b = Koefisien Regresi

S_b = Galat Baku

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian akan dideskripsikan selengkapnya pada tabel di bawah ini.

1. Luas Penguasaan Lahan Pertanian

Lahan pertanian merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan usahatani. Demikian juga bagi masyarakat di daerah penelitian, karena pada umumnya masyarakat di daerah ini adalah sebagai petani. Gambaran luas penguasaan lahan pertanian pada kecamatan sampel terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Luas Pengusahan Lahan Rata-Rata Rumah Tangga dan Lahan Perkapita Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat

Kecamatan	Luas Lahan Rata-Rata Rumah Tangga (ha)	Luas Lahan Perkapita(ha)
Tanjung Mutiara	0,316	0,043
Kecamatan IV Koto	0,329	0,071
Lubuk Basung	0,315	0,028
Tanjung Raya	0,326	0,074
VII Koto Sei Sariak	0,348	0,079
Pariaman Utara	0,374	0,076
2x11 Enam Lingkung	0,394	0,079
V Koto Kampung Dalam	0,342	0,080
Rata-rata	0,343	0,066
Simpangan Baku	0,026	0,019

Sumber : Diolah dari data primer

Luas penguasaan lahan rata-rata rumah tangga pada beberapa kecamatan sampel relatif sempit (rata-rata = 0,343 ha) demikian juga dengan tingkat penguasaan lahan rata-rata perkapita seluas 0,006 ha. Penguasaan lahan rata-rata rumah tangga relatif agak seragam sebagaimana ditunjukkan oleh nilai simpangan baku 0,026 atau koefisien variansi 7,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat karagaman pemilikan lahan antar kecamatan sebesar 7,5 % dari nilai rata-rata penguasaan lahan. Sementara keragaman pemilikan lahan perkapita relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pemilikan lahan rata-rata rumah tangga. Tingkat keragaman tersebut sebesar 28,78 % dari nilai rata-rata pemilikan lahan perkapita sebagaimana ditunjukan oleh nilai simpangan baku sebesar 0,019.

Tingginya tingkat keragaman pemilihan lahan perkapita disebabkan oleh dua faktor yaitu; luas lahan yang dimiliki dan jumlah anggota rumah tangga. Ada rumah tangga yang memiliki lahan relatif luas tetapi jumlah anggota keluarganya relatif kecil. Di sisi lain ada rumah tangga yang pemilikan lahannya relatif sempit tetapi jumlah anggotanya relatif besar. Sempitnya penguasaan lahan rata-rata rumah tangga di Sumatera Barat disebabkan oleh faktor geografis daerah. Di daerah ini cukup banyak ditemukan perbukitan dengan lereng yang terjal dengan kelerengan >40°. Di Kabupaten Agam dengan luas wilayah 213.904 ha, hanya sebanyak 79.550 ha (27,19 %) saja yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. 2Demikian juga di Kabupaten Padang Pariaman dengan luas

740.350 ha . Hanya sebanyak 17 % saja di antaranya yang telah dimanfaatkan, sementara 75 % diantaranya terdiri dari hutan, 5 % terdiri tanah rawa dan selebihnya adalah laut. Dengan kurang menguntungkannya kondisi geografis daerah akibatnya sangat sempit lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian.

Sebaran rumah tangga dalam menguasai lahan di daerah penelitian adalah sebagai berikut; sebanyak 672 (87,10 %) rumah tangga menguasai lahan dengan luas 0.50 ha ke bawah dan sebanyak 98 rumah tangga (12,9 %) menguasai lahan di atas 0.50 ha (> 0,50). Dari sebaran data tersebut ternyata pada umumnya rumah tangga di desa penelitian tergolong petani berlahan sempit, dengan sempitnya lahan mengakibatkan pendapatan rumah tangga menjadi relatif rendah, karena lahan merupakan faktor produksi utama bagi masyarakat pedesaan. Dengan rendahnya pendapatan pada gilirannya masyarakat cenderung mencari mata penharian alternatif akibat tidak memadainya penghasilan dari kegiatan bertani.

Disisi lain jika dilihat pola penguasaan lahan yang diusahakan oleh rumah tangga dapat dikelompokan ke dalam empat kelompok yaitu; lahan milik sendiri sebanyak 407 rumah tangga (53,55 %), sewa 26 rumah tangga (3,42 %), bagi hasil 144 rumah tangga (18,94 %) dan gadai sebanyak 63 rumah tangga (8,28 %) dan sebanyak 30 rumah tangga (3.94 %) adalah penguasaan lahan gabungan yaitu gabungan antara lahan milik sendiri dengan sewa, bagi hasil dan gadai. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Luas Penguasaan Lahan Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga di Pedesaan Sumatera Barat

Luas Penguasaan Lahan	Jumlah Rumah Tangga	Persentase
Di bawah 0.25 ha	345	45,40
> 0.25 - 0.50 ha	317	41,70
> 0.50 - 0.75 ha	55	7,2
Di atas 0.75 ha	43	5,7
J u m l a h	760	100

Sumber : Diolah dari data primer

2. Distribusi Penguasaan Lahan

Distribusi penguasaaan lahan menunjukkan perbandingan antara proporsi lahan yang dikuasai dengan jumlah rumah tangga yang mengusahakannya. Di bawah ini akan dikemukan tingkat pemerataan penguasaan lahan secara total maupun perkapita pada beberapa kecamatan di Sumatera Barat.

Tabel 4.3
Indeks Gini Penguasaan Lahan Rata-Rata Rumah Tangga dan Perkapita Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat

Kecamatan	Indeks Gini Total Lahan	Indeks Gini Lahan.Perkapita
Tanjung Mutiara	0,4855	0,2549
Kecamatan IV Koto	0,4356	0,3451
Lubuk Basung	0,4508	0,4242
Tanjung Raya	0,2777	0,3275
VII Koto Sei Sariak	0,4646	0,3412
Pariaman Utara	0,2546	0,2489
2x11 Enam Lingkung	0,2125	0,1976
V Koto Kampung Dalam	0,3147	0,3363
Rata-rata	0,3620	0,3095
Simpangan Baku	0,1084	0,0714

Sumber : Diolah dari data primer

Distribusi penguasaan lahan rata-rata rumah tangga dan distribusi lahan perkapita perkecamatan termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang sebagaimana diperlihatkan oleh nilai rata-rata Indeks Gini sebesar 0,3620 untuk total penguasaan lahan rumah tangga dan 0,3095 untuk penguasaan lahan perkapita. Tingkat keragaman distribusi total penguasan lahan antarkecamatan cukup bervariasi sebagaimana diperlihatkan oleh nilai simpangan baku sebesar 0,1084 atau koefisien variasi 29,94 %. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat keragaman pemilihan lahan total antarkecamatan sebesar 29.94 % dari nilai rata-rata pemilikan lahan. Demikian juga dengan keragaman distribusi penguasaan lahan perkapita antar kecamatan yaitu sebesar 23 % dari nilai

rata-rata distribusi penguasaan lahan perkapita.

Di sisi lain dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, diperoleh informasi bahwa 40 % rumah tangga pada kecamatan sampel yang menguasai lahan sebanyak 21,84 %. 40 % rumah tangga yang menguasai lahan menengah memiliki sebanyak 42,745 % dan 20 % persen rumah tangga yang menguasai lahan terluas menguasai 36,21 % dari total lahan yang ada. Dengan menggunakan dua pendekatan ternyata tingkat pemerataan penguasaan lahan di daerah penelitian termasuk ke dalam kategori sedang. Terjadinya kondisi yang seperti ini diduga disebabkan oleh dua faktor yaitu; (1) Di Sumatera Barat tidak ditemukan polarisasi pemilihan lahan pada sekelompok orang. Hal ini adalah sebagai dampak posisitif dari sistem pemilikan lahan yang relatif di Sumatera Barat, namun pada umumnya rumah tangga di pedesaan tergolong kepada petani berlahan sempit. (2) Dalam studi ini yang dilihat adalah penguasaan lahan, bukanlah pemilikan lahan. Penguasaan lahan dapat dilakukan dengan cara sewa, bagi hasil dan gadai. Mungkin saja terjadi sebuah rumah tangga tidak memiliki lahan tetapi dapat menguasai lahan dengan cara sewa, bagi hasil. Dengan demikian yang membedakan luas lahan yang kuasai oleh masing-masing rumah tangga adalah kemampuan mereka untuk menyelenggarakan usahatani dan pekerjaan lain yang dimilikinya.

Menurut kriteria Bank Dunia (1980), suatu ketimpangan dikatakan tinggi jika 40 persen kelompok pada suatu masyarakat hanya memperoleh bagian kurang 17 % dari total

pendapatan. Sementara ketimpangan dikatakan sedang jika 40 persen kelompok masyarakat memperoleh 17 - 22 %. Ketimpangan dikatakan rendah jika 40 % kelompok masyarakat memperoleh di atas 22 persen. Menurut Hananto (1980) Indek Gini 0,30 - 0,40 setara dengan 40 % penduduk memperoleh bagian sekitar 17 - 22 persen [illegible] pendapatan.

Tabel [illegible]
Distribusi Penguasaan Lahan Rumah Tangga Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat Dengan Menggunakan Kriteria Bank Dunia

Kecamatan / Lahan	40 % R.T Dgn. Lahan Sempit	40 % R.T Dgn. Lahan Sedang	20 % R.T Dgn. Lahan Terluas
Tanjung Mutiara	19,46 %	41,06 %	42,60 %
Kecamatan IV Koto	17,67 %	47,70 %	36,63 %
Lubuk Basung	18,34 %	42,90 %	39,10 %
Tanjung Raya	21,49 %	39,27 %	39,24 %
VII Koto Sei Sariak	20,05 %	38,76 %	42,19 %
Pariaman Utara	23,36 %	41,19%	35,45 %
2 x11 Enam Lingkung	25,04 %	44,20 %	30,76 %
V Koto Kampung Dalam	26,36 %	41,90 %	31,74 %
Rata-rata	21,84	42,75	36,21
Simpangan Baku	7,39	14,51	11,39

Sumber : Diolah dari data primer

Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 ditemukan empat kecamatan yang memiliki tingkat ketimpangan lahan yang relatif tinggi. Kecamatan tersebut antara lain; Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Koto dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. untuk penguasaan lahan rata-rata. Sementara kecamatan yang memiliki ketimpangan yang relatif

tinggi berdasarkan penguasaan lahan perkapita adalah Kecamatan Lubuk Basung.

Relatif tingginya tingkat ketimpangan penguasaan lahan di beberapa kecamatan di Sumatera Barat disebabkan adanya sekelompok rumah tangga dengan proporsi yang lebih sedikit tetapi menguasai proprosi lahan dengan jumlah yang relatif tinggi. Hal berkaitan dengan kemampuan rumah masing-masing rumah tangga tangga dalam mendapatkan lahan melalui sewa, gadai dan bagi hasil. Dari 760 rumah tangga sampel sebanyak 233 (30,64 %) di antaranya menguasai lahan dengan cara tersebut. Di samping itu ditentukan juga oleh jenis pekerjaan lain yang digelutinya. Jika sebuah rumah tangga tidak memiliki pekerjaan selain bertani, maka cenderung rumah tangga tersebut menguasahakan lahan relatif luas, karena pekerjaan bertani merupakan tumpuan dan sumber nafkah keluarga mereka. Berbeda dengan rumah tangga yang memiliki pekerjaan di luar bertani seperti berdagang dan industri cenderung mengusahakan lahan dengan ukuran yang relatif sempit karena memiliki dua sumber nafkah keluarga.

3. Distribusi Penguasaan Lahan Berdasarkan Status Rumah Tangga

Status rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga miskin dan rumah tangga bukan miskin. Distribusi pennguasaan lahan pada dua kelompok rumah tangga tersebut terlihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Indeks Gini Penguasaan Lahan Berdasarkan Status Rumah Tangga Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat

Kecamatan	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Bukan Miskin
Tanjung Mutiara	0,3311	0,3769
Kecamatan IV Koto	0,2174	0,3518
Lubuk Basung	0,2412	0,3161
Tanjung Raya	0,3536	0,2734
VII Koto Sei Sariak	0,3449	0,3887
Pariaman Utara	0,3464	0,2383
2 x 11 Enam Lingkung	0,3128	0,1399
V Koto Kampung Dalam	0,2037	0,3373
Rata-rata	0,2939	0,3028
Simpangan Baku	0,0626	0,0830

Sumber : Diolah dari data primer

Distribusi penguasaan lahan pada kelompok rumah tangga miskin kelihatannya sedikit lebih merata jika dibandingkan dengan distribusi penguasaan lahan pada rumah tangga bukan berstatus miskin sebagaimana ditunjukkan oleh nilai rata-rata hitung Indeks Gini, masing-masing sebesar 0,2939 dan 0,3028. Kedua indeks tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori distribusi penguasaan lahan sedang.

Tingkat keragaman distribusi penguasaan lahan antar kecamatan pada kelompok rumah tangga bukan berstatus miskin cenderung lebih bervariasi jika dibandingkan dengan rumah tangga yang bukan berstatus miskin sebagaimana ditunjukan oleh nilai simpangan baku masing-masing yaitu sebesar 0,0830 dan 0,0626. Keragaman distribusi penguasaan lahan pada

kelompok rumah tangga bukan berstatus miskin adalah sebesar 0,0830 atau 27,41 % dari rata-rata hitung, sedangkan pada kelompok rumah tangga miskin sebesar 0,1626 atau 21,29 % dari nilai rata-rata hitung.

Tingginya tingkat keragaman distribusi penguasaan lahan pada kelompok rumah tangga yang bukan berstatus miskin merupakan refleksi dari variasi distribusi penguasaan lahan antarkecamatan. Di satu sisi ada kecamatan, yang pemerataan penguasaan lahannya relatif baik, sedangkan di sisi lain ada pula kecamatan yang distribusi penguasaan lahannya relatif jelek. Dari tabel di atas terlihat bahwa kecamatan 2 X 11, Enam Lingkung adalah kecamatan yang distibusi penguasaan lahannya relatif baik (Indeks Gininya 0,1399) sedangkan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak salah satu kecamatan, yang distribusi penguasaan lahannya cukup jelek (Indeks Gininya sebesar 0,3887).

4. Tingkat Teknologi

Tingkat teknologi dalam penelitian ini menggambarkan respon masyarakat terhadap teknologi pertanian yang telah diperkenalkan oleh pemerintah. Hal ini akan terlihat pada penggunaan pupuk pestisida, bibit unggul dan penggunaan mekanisasi pertanian. Tingkat teknologi yang diadopsi oleh rumah tangga diproksikan dengan kemampuan rumah tangga dalam mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli teknologi pertanian yang mereka butuhkan (ability to pay). Informasi mengenai tingkat teknologi yang digunakan oleh rumah tangga terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Tingkat Adopsi Teknologi Rata-rata per Rumah Tangga
Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat

Kecamatan	Adopsi Teknologi (Rp)	Simpangan Baku (Rp)
Tanjung Mutiara	97.523	17.571
Kecamatan IV Koto	68.572	31.703
Lubuk Basung	76.070	25.113
Tanjung Raya	61.526	38.054
VII Koto Sei Sariak	70.300	45.172
Pariaman Utara	75.134	39.674
2x11 Enam Lingkung	94.761	33.616
V Koto Kampung Dalam	86.202	34.346
Rata-rata	70.010	
Simpangan Baku	27.224	

Sumber : Diolah dari data primer

Tingkat adopsi teknologi yang telah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga ternyata masih rendah sebagaimana ditunjukkan rata -rata pengeluaran untuk maksud tersebut sebesar Rp.70.010,-. Jika hal ini dikaitkan dengan penguasaan lahan rata-rata (0,343 ha), maka berarti total pengeluaran yang relevan dengan kemampuan teknologi untuk 1 ha lahan adalah Rp. 204.110,-. Sedangkan menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat (1995) standar biaya rata-rata pengolahaan tanah dengan alat mesin pertanian dan penggunaan teknologi moderen untuk 1 ha lahan setengah teknis sebesar Rp. 560.000,- terdiri dari pupuk, pestisida, bibit, pengolahan tanah dan sampai panen. Dengan cara membandingkan teknologi yang diadopsi dengan standar

yang seharus dilaksanakan oleh petani, maka berarti tingkat adopsi teknologi yang telah dilaksanakan di desa penelitian adalah (204.110/560.000 x 100 %) = 36,45 %). Dengan rendahnya tingkat adopsi teknologi mengakibatkan produktivitas lahan per ha cenderung tidak optimal yang akhirnya mengakibatkan rendahnya pendapatan rumah tangga. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh bahwa produktivitas rata-rata lahan per ha 3, 17 ton gabah kering panen sementara hasil pada Supra Insus tahun 1995 menunjukan sebanyak 8 - 12 ton/ha gabah kering panen.

Rendahnya tingkat adopsi rumah tangga terhadap teknologi berkaitan dengan tiga hal: Pertama menyangkut faktor sosial dan institusional. Di daerah penelitian masih ditemukan sekompok rumah tangga yang enggan menggunakan pupuk kimia. Masih ada di antara masyarakat yang beranggapan lahan pertanian yang mereka memiliki masih subur dan tidak perlu dipupuk. Ada juga diantara mereka yang beranggapan jika di pupuk rasa berasnya kurang enak dan sebagainya. Faktor ini tentu tidak terlepas dari kurang efektifnya sistem penyuluhan yang diberikan oleh tenaga penyuluh pertanian lapangan. Kedua, berhubungan dengan kekurang mampuan sebagian rumah tangga untuk membeli input pertanian saat diperlukan seperti pupuk, racun, bibit dan zat perangsan tumbuh karena rendahnya pendapatan rumah tangga. Ketiga, belum efektifnya koperasi unit desa (KUD) dalam melaksanakan salah satu [illegible] sebagai penyalur [illegible] produksi pertanian bagi masyarakat. Keempat, [illegible]yangkut dengan penggunaan mekanisasi pertanian seperti

mesin traktor, perontok gabah. Di daerah penelitian ditemukan masih sangat sedikit masyarakat yang menggunakan peralatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (1) pada umumnya petani mengerjakan lahannnya dengan tenaga manusia dan hewan. Dengan cara ini mereka dapat melakukan secara kerjasama dengan sistem arisan tenaga kerja (julo-julo),sementara jika diolah dengan mesin traktor harus dibayar tunai, dan (2) faktor geografis, di Kabupaten Agam pada umumnya permukaan tanah tidak datar dan petak-petak sawah relatif kecil. Kondisi lahan yang demikian menyulitkan untuk diolah dengan menggunakan mesin traktor, sementara untuk penggunaan mesin perontok gabah sudah mulai memasyarakat.

Dalam mengadopsi teknologi ditemukan beberapa keragaman baik keragaman antarrumah tangga maupun keragaman antar kecamatan. Keragaman dalam kecamatan ditemukan tingkat adopsi teknologi yang cukup bervariasi, sementara ada kecamatan yang mengadopsi teknologi relatif tinggi yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara (rata-rata = Rp. 97.523 sementara yang rendah adalah Kecamatan Tanjung Raya (rata-rata = Rp. 61.526).

Ditemukan juga tingkat adopsi teknologi antar kecamatan yang sangat bervariasi antara lain; IV Koto, Tanjung Raya, VII Koto Sei Sariak dan Pariaman Utara. Tingginya tingkat variasi antarrumah tangga memberikan indikasi bahwa penggunaan teknologi antarrumah tangga relatif tidak merata. Di satu pihak ada rumah tangga yang mampu mengeluarkan biaya

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

untuk teknologi dengan relatif besar. Sementara ada pula yang mengeluarkan biaya dengan jumlah yang relatif kecil. Perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga merupakan cerminan dari kemampuan membayar (ability to pay) dari masing-masing rumah tangga.

Kecamatan Tanjung Mutiara mempunyai tingkat adopsi teknologi relatif tinggi dan variasi adopsi teknologi antar rumah tangga relatif rendah. Hal ini membuktikan bahwa masing-masing rumah tangga telah mengadopsi teknologi secara merata dan masyarakat Kecamatan Tanjung Mutiara berarti telah memahami penggunakan teknologi pertanian. Disisi lain Tanjung Raya dengan tingkat penggunaan teknologi yang sangat rendah, sementara variasi adopsi teknologi antarrumah tangga sangat tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran dan tingkat adoptif masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya dalam menggunakan teknologi pertanian relatif masih rendah.

Rendahnya tingkat adopsi tenologi di Kecamatan Tanjung Raya disebabkan adanya dua desa sampel yaitu Dalko dan Pantai Barat di kecamatan ini yang masih terisoilasi. Untuk mencapai desa tersebut kita harus melalui jalan setapak sejauh 7 km. Desa tersebut terletak di atas bukit dengan kelerengan yang cukup tinggi, kondisi seperti ini yang menyulitkan bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi pertanian menurut semestinyanya. Dengan demikian, penggunaan teknologi pertanian pada dua desa ini sangat rendah. Apalagi dalam menggunakan sistem mekanisasi pertanian. Faktor ini juga sebagai penyebab tingginya variasi tingkat adopsi teknologi antar rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya.

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kepala rumah tangga dikelompokan ke dalam empat kategori seperti terlihat pada tabel berikut;

Tabel 4.7
Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Sampel
di Pedesaan Sumatera Barat

Tingkat Teknologi	Jumlah Rumah Tangga	Persentase
Tidak Pernah Sekolah	59	7,80
Sekolah Dasar	574	75,50
SLTP	105	13,80
SMTA	20	2,60
Perguruan Tinggi	2	0,30
J u m l a h	760	100

Sumber : Diolah dari data primer

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kepala rumah tangga cukup bervariasi yaitu sejak dari kepala rumah tangga tidak pernah bersekolah sampai perguruan tinggi. Namun jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh kepala rumah tangga adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 574 kepala rumah tangga (75,50 %). Dari 574 orang yang berpendidikan Sekolah dasar sebanyak 251 orang (47,72 %) di antaranya tidak menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Jika dikaitkan dengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah maka tingkat pendidikan kepala rumah tangga pada umumnya di desa sampel masih sangat rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan

kemungkinan menyebabkan rendahnya tingkat adopsi masyarakat terhadap teknologi dan akses terhadap kelembagaan ekonomi yang ada.

6. Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan kepala rumah tangga berkaitan erat dengan produktivitas dan pendapatan rumah tangga, berhubung kepala rumah tangga yang sehat cenderung memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam studi ini ditemukan sebanyak 274 orang (36,1 %) kepala rumah tangga yang pernah menderita sakit salama satu tahun belakangan dan sebanyak 486 orang (63,9 %) kepala rumah tangga menyatakan tidak pernah menderita sakit.

Penyakit yang diderita terdiri dari, influenza, pusing, demam berdarah, batuk, diare, TBC, radang tenggorokan, cacingan dan rematik. Rata-rata hari kerja yang hilang akibat menderita sakit, selama tahun 1996 adalah 5, 61 hari. Dalam pengobatan pada umumnya mereka telah memanfaatkan jasa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Bidan Desa, berhubung pada setiap kecamatan telah ada satu Puskesmas dan ada juga beberapa kecamatan di samping telah miliki Puskesmas juga memiliki Puskesmas pembantu. Dengan demikian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat cukup baik di samping itu jaraknya relatif dapat dijangkau oleh masyarakat.

Tidak begitu besarnya persentase kepala rumah tangga yang menderita sakit dan relatif kecilnya hari kerja yang hilang akibat menderita sakit merupakan indikasi dari

keberhasilan program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari informasi yang diperoleh pada umumnya masyarakat telah memanfaatkan jasa Puskesmas dalam melakukan perawatan kesehatan. Nyaris tidak ditemukan lagi masyarakat yang mengobatkan penyakitnya kepada dukun-dukun kampung. Kecuali untuk penyakit-penyakit tertentu.

7. Aksesibiltas Terhadap Kelembagaan

Pada umumnya masyarakat di daerah penelitian masih kurang memanfaatkan kelembagaan ekonomi yang ada di pedesaan. Dengan rendahnya pemanfaatan kelembagaan ekonomi tersebut akibatnya kecil pula peluang ekonomi yang dapat mereka manfaatkan. Apalagi dengan keterbatasan rumah tangga dalam berbagai fasilitas. Aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan kelembagaan ekonomi yang ada dalam studi ini dikatagorikan ke dalam empat kelompok sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Kelembagaan Ekonomi Di Pedesaan Sumatera Barat

Aksesibilitas	Jumlah Rumah Tangga	Persentase
Tidak Akses	376	49,50
Kurang Akses	50	6,50
Sedang	160	21,10
Tinggi	174	22,90
J u m l a h	760	100

Sumber : Diolah dari data primer

Tabel di atas memberikan petunjuk bahwa pemanfaatkan kelembagaan ekonomi yang ada di desa penelitian relatif masih rendah. Hanya sebanyak 334 (44%) rumah tangga yang telah memanfaatkan kelembagaan ekonomi dengan katagori sedang dan tinggi. Lebih separoh dari rumah tangga yang ada 426 (56 %) belum memanfaatkan kelambagaan ekonomi. Tidak optimalnya pemanfaatan kelembagaan ekonomi yang ada disebabkan oleh dua hal : Pertama, erat kaitannya dengan penguaasaan lahan pertanian yang relatif sempit. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat yang akses terhadap kelembagaan ekonomi adalah petani yang berlahan luas. Sementara hampir separoh 345 (45,40%) rumah tangga yang ada hanya memiliki lahan sempit (< 0,25 ha). Dengan sempitnya lahan, memperkecil kesempatan atau peluang yang dapat mereka peroleh. Dengan demikian, kelompok ini seolah-olah telah diisolasi oleh sistem untuk memanfaatkan kelambagaan yang ada. Hal ini disebabkan, mereka tidak cukup persyaratan untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di kelembagaan sebagaimana yang ditetapkan. Disisi lain masyarakat desa cenderung akan tertarik untuk memanfaatkan kelembagaan, jika mereka merasakan manfaat langsung dari kelembagaan tersebut.

Kedua, disebabkan oleh relatif jauhnya jarak kelembagaan ekonomi yang ada dengan desa tempat tinggal masyarakat. Umpamanya, Koperasi Unit Desa memiliki wilayah kerja untuk beberapa desa. Pada umumnya Koperasi Unit Desa tersebut tidak berada di desa miskin. Begitu juga dengan Bank Rakya Indonesia pada umumnya terletak di Pusat kecamatan. Jauhnya jarak kelembagaan dengan desa tempat

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

tinggal masyarakat merupakan salah satu kesulitan bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Demikian juga dengan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang pada umumnya tidak berdomisili di wilayah kerja mereka. Hal seperti ini akan mempersulit masyarakat dalam mendapatkan bimbingan. Semestinya PPL harus secara rutin mengunjungi petani untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan.

8. Mata Pencaharian Alternatif

Mata pencaharian alternatif adalah mata pencaharian tambahan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga di luar kegiatan bertani. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala rumah tangga jika pekerjaan di bidang pertanian sedang tidak ada. Namun, dapat juga dilakukan oleh anggota rumah tangga pada saat yang bersamaan oleh anggota rumah tangganya.

Rumah tangga yang terlibat dengan pekerjaan alternatif sebanyak 418 (55 %) rumah tangga. Pada umumnya mereka menyatakan melakukan pekerjaan alternatif dengan alasan sebagai penambah pendapatan rumah tangga karena tidak mencukupinya penghasilan dari kegiatan bertani. Hal ini dikemukakan oleh 404 orang (96,65) kepala rumah tangga. Sementara ada juga yang menjawab melakukan pekerjaan alternatif untuk mengisi waktu senggang yaitu sebanyak 8 orang (1,92 %). Sebanyak 6 orang (1,43 %) kepala rumah tangga menyatakan ingin mengembangkan usaha.

Jika pekerjaan alternatif dikaitkan dengan penguasaan lahan. Fakta memperlihatkan bahwa 88,11 % dari seluruh rumah

tangga yang ada menguasai lahan lebih kecil dari seperempat hektar (< 0.25 ha) memiliki pekerjaan alternatif. Di lain pihak 29,02 % dari rumah tangga yang menguasai lahan lebih besar dari seperempat hektar, tetapi lebih kecil dari setengah hektar (> 0.25 - <0.50 ha) juga memiliki pekerjaan alternatif. Di samping itu hanya sebanyak 22,44 % rumah tangga yang menguasai lahan lebih besar dari setengah hektar memiliki pekerjaan alternatif.

Dengan memperhatikan informasi di atas dapat di simpulkan bahwa semakin kecil luas lahan yang dikuasi oleh sekelompok rumah tangga semakin besar perentase rumah tangga tersebut melakukan mata pencaharian alternatif. Sebaliknya semakin luas, lahan yang dimiliki oleh sekelompok rumah tangga semakin kecil persentase rumah tangga tersebut melakukan pekerjaan alternatif.

Pekerjaan alternatif yang dilakukan oleh rumah tangga cukup beragam antara lain: buruh tani/industri, jasa perdagangan, industri, seperti sopir, montir, bengkel, knek oplet, tukang jahit, tukang bordir dan tukang sepatu. Proporsi pekerjaan alternatif yang ditekuni oleh masing-masing rumah tangga dapat diikuti adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9
Jenis Pekerjaan Alternatif Yang Dilakukan Oleh Rumah Tangga Di Pedesaan Sumatera Barat

Jenis Pekerjaan	Jumlah Rumah Tangga	Persentase
Buruh tani/pabrik	342	45,00
Dagang	210	27,70
Industri Kecil	54	7,10
Dan lain-lain	154	20.30
J u m l a h	760	100

Sumber : Diolah dari data primer

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan alternatif yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga di desa miskin Sumatera Barat adalah kegiatan berburuh tani dan industri kecil. Karena kegiatan tersebut tidak memerlukan skill dan modal, cukup hanya dengan tenaga. Jika dikaitkan dengan kualitas sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi rumah tangga di pedesaan. Cukup beralasan kegiatan ini merupakan pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat.

Kegiatan berburuh tani bisanya dilakukan jika pekerjaan di lahan sendiri telah selesai, atau setelah lahan selesai ditanam. Di Pedesaan Sumatera Barat, jika lahan telah ditanami sampai menunggu saat panen iti adalah pekerjaan wanita. Kegiatan berburuh tani yang dilakukan oleh kepala rumah tangga ada yang berada di dalam desa sendiri dan kadang-kadang ada juga yang sampai ke luar desa.

Kegiatan berdagang yang dilakukan oleh kepala rumah tangga, adalah kegiatan dagang skala sangat kecil. Kegiatan

tersebut seperti warung-warung, menjual ikan berjaja (keliling kampung), berdagang dari pasar ke pasar, membeli gabah pada musim panen, membeli kopra dan kelapa dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan waktu dan tenaga yang dikorbankan kegiatan berdagangan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga hasilnya tidak memuaskan. Karena sangat rendahnya produktivitas yang diperoleh jika dibandingkan dengan korbanan waktu yang dilakukan.

Kegiatan industri yang dilakukan di desa miskin Sumatera Barat terbatas untuk industri kecil. Kegiatan industri dengan cara sangat sederhana dan dengan modal yang tidak terlalu besar. Industri tersebut antara lain: pabrik batu bata, kue-kuean, pabrik sepatu, dan usaha penggilingan padi. Kegiatan industri kecil tersebut relatif cukup banyak ditemukan, di Kecamatan VII Koto Sei Sarik, Pariaman Utara dan Kecamatan Lubuk Basung.

9. Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tanggga dihitung dengan menggunakan pendekatan penghasilan (earning approach). Penghasilan tersebut berasal dari kegiatan pertanian maupun kegiatan non pertanian. Penghasilan yang berasal dan kegiatan non pertanian terdiri atas; hasil dagang, sewa, dan transfer (kiriman dari rantau), upah, gaji dan bunga uang.

Pendapatan rata-rata rumah tangga pada masing-masing kecamatan sampel dan keragamannya terlihat pada tabel 4.10 .

Tabel 4.10
Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga dan Perkapita
Beberapa Kecamatan Di Sumatera Barat

Kecamatan	Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga (Rp)	Pendapatan Perkapita (Rp)
Tanjung Mutiara	1.587.532	295.673
Kecamatan IV Koto	1.737.855	335.510
Lubuk Basung	1.656.224	299.230
Tanjung Raya	2.140.041	377.795
VII Koto Sei Sariak	1.988.549	388.930
Pariaman Utara	2.090.059	427.628
2x11 Enam Lingkung	1.858.002	356.952
V Koto Kampung Dalam	1.915.891	410.788
Rata-rata	1.876.672	354.063
Simpangan Baku	187.852	45.928

Sumber : Diolah dari data primer

Tingkat keragaman pendapatan rata-rata rumah tangga antar kecamatan sampel relatif rendah. Secara jelas, hal ini ditunjukkan oleh nilai simpangan baku Rp.187.852 atau koefisien variasi 10%. Angka tersebut memberikan petunjuk bahwa tingkat keragaman pendapatan rumah tangga antar kecamatan sebesar 10 % dari nilai rata-rata pendapatan. Dari delapan kecamatan yang menjadi sampel penelitian, dua kecamatan di antaranya memiliki pendapatan rata-rata rumah tangganya relatif tinggi. Kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Pariaman Utara.

Rata-rata pendapatan perkapita delapan kecamatan sampel relatif rendah. Hal ini jika dibanding dengan pendapatan perkapita Kabupeten Padang Pariman dan Kabupaten

Agam pada tahun 1995 masing-masing adalah Rp 984.737,- dan Rp. 1.096.934. Tingkat keragaman pendapatan perkapita antara kecamatan cukup merata yaitu sebesar 12,97 % dari nilai rata pendapatan perkapita atau simpangan baku sebesar. Rp.45.928,-

Jika pendapatan perkapita dikaitkan dengan jumlah rumah tangga sampel maka akan diperoleh informasi tentang distribusi pendapatan perkapita berdasarkan rumah tangga. Dari 760 rumah tangga yang diteliti, sebanyak 81 rumah tangga (10,70 %) di antaranya memiliki pendapatan perkapita di atas Rp. 600.000,- angka inipun masih berada di bawah pendapatan perkapita Kabupaten sampel keadaan tahun 1995. Pada umumnya rumah tangga memiliki pendapatan perkapita antara 150.000 sampai dengan Rp. 300.000,- . Jumlah rumah tangga tersebut sebanyak 362 rumah tangga (47,60 %). Informasi tentang distribusi pendapatan perkapita dapat diikuti pada tebel 4.11.

Tabel 4.11
Perolehan Pendapatan Perkapita Rumah Tangga
Di Pedesaan Sumatera Barat

Jumlah Pendapatan (Rp.)	Jumlah Rumah Tangga	Persentase
< 150.000,-	26	3,40
>150.000 - 300.000	362	47,60
>300.000 - 450.000	199	26,20
>450.000 - 600.000	92	12,10
> 600.000	81	10.70
J u m l a h	760	100

Sumber : Diolah dari data primer

Rendahnya tingkat pendapatan perkapita rata-rata rumah tangga di desa miskin Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, pada umumnya rumah tangga masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Dengan mata pencaharian utama yaitu usaha tani tanaman pangan (padi) dengan produktivitas yang relatif rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh : 1) tidak seimbangannya antara jumlah lahan yang tersedia sebagai input tetap dengan tenaga kerja sebagai input variabel. Hasil yang sama juga ditemukan oleh studi yang dilakukan oleh White dan Gunawan (1989: 49) di daerah aliran sungai Cimanuk dan studi Hayami (1987: 119) di pedesaan Asia. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang berlimpah dibandingkan dengan luas lahan yang terbatas mengakibatkan marginal produktivitas tenaga kerja hampir mendekati nol. Dalam ekonomi produksi hal ini dikenal dengan konsep **Diminishing Returns**. 2) Masih rendahnya tingkat teknologi yang digunakan seperti penggunaan pupuk masih di bawah standar yang direkomendasi oleh Dinas Pertanian tanaman pangan. Di samping itu pengolahan tanah maupun hasil pada umumnya masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan meneggunakan cangkul, bajak, sabit, merontok dengan kaki (mengirik) dan memukul dengan menggunakan tong (malambuik). Hal semacam ini mengakibatkan biaya produksi cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan mesin (traktor, perontok gabah). Rendahnya teknologi saat panen dan pasca panen mengakibatkan banyaknya gabah yang hilang dan rusak.

Temuan ini didukung studi Sukarsa (1983; 48) menyatakan dengan menggunakan traktor dalam pengolahan tanah akan dapat menghemat penggunaan tenaga kerja dari 18 % menjadi 12,6 %, sementara menggunakan alat perontok gabah akan dapat menghindari kehilangan gabah sebesar 2 - 4 %. Studi Deuster (1988:145-149), Prabowo (1995:59) menyimpulkan bahwa pengunaan pupuk dan beberapa input lainnya akan mampu meningkatkan output sebesar 14,3 - 62,20 %. (3) Sampai saat ini pada umumnya rumah tangga masih melakukan satu jenis tanaman (mono culture) yaitu padi. Masih sangat sedikit masyarakat yang menyelenggarakan tanaman plawija seperti kacang, cabe, bawang, kacang hijau dsb. Pada hal, secara finansil tanaman plawija relatif lebih menguntung dari pada tanaman padi. Studi Indra (1990: 88) menemukan kegiatan pertanian tanaman pangan yang dilakukan dengan cara **multi crops** dengan cara dua kali padi dan satu kali plawija dalam satu tahun akan dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar 80 - 120 %. Dengan cara satu kali padi dan dua kali pelawija dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar 240 - 310 %. 4) Di beberapa kecamatan antara lain; VII koto Sei Sarik, Kecamatan V Koto Kampung Dalam , Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan IV Koto masih ditemukan rumah tangga menggarap lahan yang diairi dengan air hujan (tadah hujan). Hal ini mengakibatkan rendahnya produksi lahan perhektar.

Kedua, masih belum terbukanya kegiatan usaha di luar pertanian, sebagai mata pencaharian alternatif yang relatif baik. Meskipun telah ada pekerjaan di luar pertanian, tetapi masih terbatas pada kegiatan berproduktivitas rendah.

Kegiatan tersebut antara lain: berburuh tani/ industri, hasil juga tidak memadai.

Ketiga, belum berfungsinya kelembagaan ekonomi dengan baik terutama Koperasi Unit Desa dan Bank Rakya Indonesia. Kondisi ini, mengakibatkan masih ditemukan rumah tangga yang terjerat dengan sejenis sistem ijon dan rentenir (pelepas uang). Kegiatan tersebut biasanya dilakukan sebelum panen dan dibayar setelah panen dengan harga gabah yang lebih rendah.

Keempat, masih belum efektifnya sistem operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog. Akibatnya pada saat musim panen harga pasar gabah cenderung sangat rendah di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada musim panen pasar cenderung berbentuk monopsoni, harga bukan dibentuk berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaan, tetapi ditentukan oleh pedagang. Pada saat harga gabah mengalami penurunan petani bukannya mengurangi pasokan tetapi malah meningkatkan pasokannya guna untuk memenuhi kebutuhan waktu itu. Studi yang sama juga ditemukan oleh Sumaryanto (1989: 45-49) dalam penelitiaannya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk. Sumaryanto menyimpulkan dengan tidak berfungsinya sistem operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog akibatnya petani tidak mempunyai pilihan selain dari menjual gabahnya kepada pedagang pengumpul dengan harga yang jauh di bawah harga yang ditetapkan oleh Bulog.

10. Kontribusi Beberapa Sumber Pendapatan Rumah Tangga

Sumber pendapatan rumah tangga terdiri dari kegiatan pertanian dan kegiatan non pertanian. Kontribusi masing-masing sumber terhadap pembentukan pendapatan rata-rata rumah tangga per kecamatan terlihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Kontribusi Masing-Masing Sumber Pendapatan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat

Sumber Pendapatan	Kecamatan (%)								Rata-Rata (%)	Simpangan Baku (%)	Koefisien Variasi
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Usahatani											
-Sawah	22,00	37,12	25,05	16,99	19,00	19,10	33,04	39,51	26,48	8,35	0,33
-Ladang	9,14	7,06	11,34	8,21	7,25	8,56	12,45	5,21	9,70	2,12	0,22
-Plawija	7,45	10,52	10,25	9,23	5,81	5,51	14,45	5,27	8,71	2,95	0,35
-Peternakan/ Perikanan	4,98	2,28	5,57	4,37	4,77	5,57	4,86	7,25	4,37	0,99	0,22
Sub.Total	43,57	57,48	52,01	39,02	37,49	38,54	64,00	54,04	48,27	9,99	0,21
2. Pekerjaan Luar Pertani											
-Buruh	25,38	17,35	20,68	19,32	22,26	30,56	12,63	17,38	20,69	5,48	0,26
-Dagang/ industri	25,10	16,13	26,58	26,14	31,40	25,97	16,15	18,01	23,19	5,67	0,24
Sub. Total	50,48	33,48	47,26	45,46	53,66	56,53	28,78	35,39	43,88	10,15	0,23
3. Pendapatan Lain-Lain	5,95	9,04	0,73	15,52	8,85	4,93	7,22	10,57	7,85	4,34	0,55
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-

Sumber: Diolah dari data primer

Keterangan:
1. Kecamatan Tanjung Mutiara
2. Kecamatan IV Koto
3. Kecamatan Lubuk Basung
4. Kecamatan Tanjung Mutiara
5. Kecamatan VII Koto Sei. Sariak
6. Kecamatan Pariaman Utara
7. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung
8. Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Sumber pendapatan yang paling besar kontribusinya terhadap pembentukan pendapatan rumah tangga pada kecamatan sampel adalah kegiatan usahatani. Dengan sumbangan rata-rata sebesar 48,27 %. Kegiatan di luar pertanian adalah sumber pendapatan kedua terbesar setelah pertanian. Dengan sumbangan rata-rata sebesar 43,88 %.

Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung adalah kecamatan yang paling besar kontribusi kegiatan usahataninya terhadap total pendapatan rumah tangga (64,00 %). Di antara kegiatan usahatani tersebut subkegiatan tanaman padi sawah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan rumah tangga yaitu sebesar 33,04 %. Hal ini, karena didukung oleh kondisi topografi daerah ini yang relatif datar dan subur.

Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung adalah daerah yang paling luas lahan pertaniannya di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan kondisi demikian pada 1992 kecamatan ini merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai Pilot Proyek Supra Insus di samping Kecamatan Lubuk Alung. Di Kabupaten Agam, Kecamatan IV Koto adalah kecamatan yang paling besar kontribusi kegiatan usahataninya dalam membentuk pendapatan rata-rata rumah tangga.

Besarnya kontribusi kegiatan usahatani dalam pembentukan pendapatan rumah tangga berkaitan erat dengan luas lahan rata-rata yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga. Kecamatan 2 x 11, Enam Lingkung merupakan kecamatan yang paling luas penguasaan lahan rata-rata rumah tangga di daerah penelitian (lihat tabel 4.1).

Sumbangan kegiatan usahatani antar kecamatan cukup beragam, dengan tingkat variasi sebesar 21 % dari nilai rata-rata hitung (lihat nilai simpangan baku dan koefisien variasi). Dalam kegiatan usaha tani, kegiatan usahatani padi sawah merupakan sumber pendapatan paling besar dalam membentuk pendapatan rumah tangga. Dengan sumbangan rata-rata sebesar 26,48 %.. Keragaman antar kecamatan cukup tinggi yaitu sebesar 33 % dari nilai rata-rata hitung. Besarnya tingkat keragaman antar kecamatan disebabkan oleh perbedaan faktor geografis dan luas lahan rata-rata yang dimiliki oleh rumah tangga pada masing-masing kecamatan. Kegiatan peternakan dan perikanan merupakan sumber pendapatan paling kecil. Hal ini disebabkan kegiatan peternakan dan perikanan masih dilakukan secara sambilan dan skala sangat kecil. Dengan demikian kegiatan ini tidak dapat diharapkan sebagai penopang ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa pada umumnya ternak (sapi atau kerbau) yang dipelihara oleh petani berasal dari ternak bagi hasil (paduo). Dengan demikian sangat berasalan sumbangan kegiatan ini sangat kecil terhadap pendapatan rumah tangga.

Pekerjaan di luar bertani (pekerjaan alternatif), sumbangan rata-ratanya terhadap pembnetukan pendapatan rumah tangga sebesar 43,88 %. Variasi antar kecamatan cukup tinggi yaitu sebesar 23 % dari nilai rata-rata hitung. Besarnya tingkat keragaman ini disebabkan oleh perbedaan kegiatan luar bertani yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga. Karena kegiatan di luar bertani memiliki produktivitas yang

berbeda-beda. Besar kecilnya sumbangan kegiatan luar pertanian berhubungan juga dengan luas lahan yang dimiliki oleh rumah tangga. Rumah tangga memiliki sempit cenderung sumbangan kegiatan luar pertaniannya relatif besar. Demikian pula sebaliknya.

Sumbangan sumber pendapatan lain-lain (transfer, bunga uang dan sewa) relatif kecil terhadap pendapatan rumah tangga (rata-rata 7,85 %). Keragaman sumber pendapatan antar kecamatan sangat tinggi yaitu sebesar 55 % dari rata-rata hitung. Kecamatan Tanjung Raya adalah kecamatan yang paling besar sumbangan pendapatan lain-lainnya terhadap pendapatan rumah tangga yaitu sebesar 15,52 %. Hal ini disebabkan di kecamatan ini cukup banyak masyarakat yang tinggal di desa menerima kiriman uang dari rantau. Demikian juga Kecamatan V Koto dan Kecamatan IV koto. Kecamatan Lubuk Basung adalah kecamatan yang paling kecil kontribusi pendapatan lain-lainnya terhadap pendapatan rumah tangga yaitu sebesar 0,73 %. Kecilnya sumbangan pendapatan lain-lain di Kecamatan Lubuk Basung disebabkan dalunya daerah ini adalah tempat merantau bagi masyarakat di daerah sekitar Kabupaten Agam. Karena daerah ini dulunya memiliki lahan yang cukup luas.

11. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan antar rumah tangga. Pendapatan dikatakan merata jika proporsi rumah tangga pada satu kelompok masyarakat harus sama dengan proporsi pendapatannya. Untuk mengetahui

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

pemerataan pendapatan dalam studi ini diukur dengan menggunakan Indeks Gini atas dasar pendapatan (earning appraoch). Nilai Indeks Gini tersebut berkisar 0 - 1, Jika Indeks Gini berada di bawah 0,30 dinamakan ketimpangan rendah, 0,30 - 0,40 ketimpangan dinamakan sedang dan di atas 0,40 dinamakan ketimpangan tinggi. Indeks Gini untuk masing-masing kecamatan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Indeks Gini Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga dan Perkapita Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat

Kecamatan	Indeks Gini Total Pendapatan	Indeks Gini Pend. Perkapita
Tanjung Mutiara	0,2404	0,1724
Kecamatan IV Koto	0,3232	0,2872
Lubuk Basung	0,2758	0,2487
Tanjung Raya	0,2622	0,2456
VII Koto Sei Sariak	0,3324	0,3905
Pariaman Utara	0,2763	0,2565
2 x 11 Enam Lingkung	0,2256	0,2229
V Koto Kampung Dalam	0,3169	0,2779
Rata-rata	0,2702	0,2627
Simpangan Baku	0,0388	0,0626

Sumber : Diolah dari data primer

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh informasi bahwa Indeks Gini rata-rata pendapatan total pada masing-masing kecamatan ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Gini rata-rata pendapatan perkapita. Hal ini memberikan petunjuk bahwa distribusi pendapatan perkapita

cenderung lebih merata jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan total. Disi lain, ditemukan satu kecamatan yaitu Kecamatan VII Koto, dimana Indeks Gini pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari Indeks Gini pendapatan total. Relatif meratanya distribusi pendapatan perkapita karena dalam menghitungnya telah dimasukan faktor jumlah anggota keluarga. Dengan demikian, menggunakan informasi pendapatan perkapita sepertinya akan lebih akurat untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari pada pendapatan total.

Di samping itu dengan menggunakan kreteria Bank Dunia (1980) diperoleh informasi yaitu: 40 % rumah tangga pada kecamatan sampel dengan kelompok pendapatan terendah memperoleh sebesar 22,42 % dari total pendapatan. 40 % rumah tangga dengan pendapatan menengah memperoleh pendapatan sebesar 38,54 %. 20 % rumah tangga dengan pendapatan tertinggi memperoleh pendapatan sebesar 39,50 % dari total pendapatan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada kecamatan sampel tergolong ke dalam tingkat ketimpangan yang ringan karena 40 persen penduduk memperoleh pendapatan lebih dari 19 % dari total pendapatan. Hasil perhitungan pemerataan dengan Kriteria Bank Dunia cukup konsisten dengan hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Gini. Informasi selanjutnya dapat diikuti pada tabel 4.14

Tabel 4.14
Distribusi Total Pendapatan Rumah Tangga Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat Dengan Menggunakan Kriteria Bank Dunia

Kecamatan Rumah Tangga	40 % R.T Pendapatan Terendah	40 % R.T Pendapatan Menengah	20 % R.T Pendapatan Tertinggi
Tanjung Mutiara	17,83 %	36,60 %	45,57 %
Kecamatan IV Koto	20,91 %	38,49 %	40,60 %
Lubuk Basung	22,00 %	41,90 %	36,10 %
Tanjung Raya	26,95 %	40,08 %	32,97 %
VII Koto Sei Sariak	19,47 %	36,04 %	44,49 %
Pariaman Utara	20,40 %	36,45 %	43,15 %
2 x11 Enam Lingkung	21,74 %	40,73 %	37,53 %
V Koto Kampung Dalam	26,26 %	38,28 %	35,56 %
Rata-rata	22,42	38,54	39,50
Simpangan Baku	3,11	1,91	4,33

Sumber : Diolah dari data primer

11. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Sumber Pendapatan

Kegiatan pertanian adalah mata pencaharian dan sebagai sumber pendapatan utama bagi rumah tangga di pedesaan. Bagi sekelompok rumah tangga penghasilan dari kegiatan pertanian tidak memadai untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga tersebut harus mencari pekerjaan di luar bertani yang disebut dengan mata pencaharian alternatif. Mata pencaharian alternatif memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam menopang kehidupan rumah tangga. Di sisi lain pekerjaan alternatif dapat pula berdampak kurang baik terhadap distribusi

pendapatan antar rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif tingkat ketimpangan pendapatannya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif. Secara faktual pemerataan pendapatan antara dua kelompok rumah tangga tersebut terlihat pada tabel berikut;

Tabel 4.15
Indeks Gini Pendapatan Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Pendapatan Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat

Kecamatan	Rumah Tangga Mem. Penc. Alt.	Rumah Tangga Tdk. Mem. Alt.
Tanjung Mutiara	0,3279	0,1698
Kecamatan IV Koto	0,3360	0,3074
Lubuk Basung	0,3419	0,2202
Tanjung Raya	0,2703	0,1900
VII Koto Sei Sariak	0,3616	0,3435
Pariaman Utara	0,3332	0,2241
2 x 11 Enam Lingkung	0,2516	0,1575
V Koto Kampung Dalam	0,3436	0,2858
Rata-rata	0,3208	0,2373
Simpangan Baku	0,0386	0,0678

Sumber : Diolah dari data primer

Distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif cenderung lebih timpang jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif. Berdasarkan nilai rata-rata hitung dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif tergolong ke dalam kategori sedang. Sementara pada rumah tangga yang tidak memimiliki mata pencarian alternatif dikelompokan ke dalam kategori rendah.

Rendahnya tingkat pemerataan pendapatan pada rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif. Hal tersebut disebabkan suatu rumah tangga tidak lagi memiliki satu sumber pendapatan yaitu dari bertani. Dengan mata pencaharian alternatif yang berbeda maka produktivitasnya juga akan berbeda. Demikian juga dengan tingkat pendapatan masing-masing rumah tangga. Jenis mata pencaharian alternatif yang ditekuni petani antara lain; buruh tani/industri, pedagang, industri, sopir, kenek, tukang jahit, montir dan sebaginya.

Berbeda dengan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif yang hanya mengandalkan pada satu sumber penghasilan. Jika sekelompok rumah tangga mengusahakan lahan dengan luas yang relatif sama maka cenderung penghasilan yang akan diterima meraka akan sama pula tentunya. Demikian juga dengan distribusi pendapatannya.

Jika diamati keragaman distribusi pendapatan antar kecamatan ditemukan informasi seperti berikut: Distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif cenderung lebih beragam, jika dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif.

Tingginya tingkat karagaman Indeks Gini pada kelompok rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif

barangkali disebabkan oleh oleh timpangnya distribusi penguasaan lahan pada masing-masing kecamatan. Dengan demikian, jika lahan terdistribusi secara merata dan tidak ada penghasilan alternatif maka pendapatan akan terdistribusi pula secara merata. Demikian pula sebaliknya.

Mata pencaharian alternatif berdampak cukup luas terhadap distribusi pendapatan. Dampak mata pencaharian alternatif tersebut bisa, negatif, positif dan netral. Hal ini sangat ditentukan oleh kondisi distribusi lahan dan jenis kegiatan pencaharian alternatif yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga.

12. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Sumber Pendapatan

Untuk membandingkan distribusi pendapatan pada kelompok rumah tangga miskin dan kelompok rumah tangga bukan miskin pada delapan kecamatan sampel terlihat pada tabel berikut;

Tabel 4.16
Indeks Gini Pendapatan Berdasarkan Status Rumah Tangga Pada Beberapa Kecamatan di Sumatera Barat

Kecamatan	Rumah Tangga Miskin	Rumah Tangga Bukan Miskin
Tanjung Mutiara	0,1753	0,2261
Kecamatan IV Koto	0,1774	0,1791
Lubuk Basung	0,2352	0,2636
Tanjung Raya	0,1702	0,1810
VII Koto Sei Sariak	0,1872	0,2401
Pariaman Utara	0,1700	0,2369
2 x 11 Enam Lingkung	0,1757	0,2523
V Koto Kampung Dalam	0,1748	0,2832
Rata-rata	0,1832	0,2328
Simpangan Baku	0,0217	0,0369

Sumber : Diolah dari data primer

Distribusi pendapatan pada rumah tangga miskin pada masing-masing kecamatan cenderung lebih merata jika dibandingkan distribusi pendapatan rumah tangga yang bukan miskin. Hal ini diperlihatkan oleh nilai rata-rata indeks Gini untuk rumah tangga miskin sebesar 0,1832 dan untuk rumah tangga bukan miskin 0,2328. Keragaman indeks Gini pada kelompok rumah tangga miskin relatif lebih rendah, bila dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang bukan berstatus miskin. Hal ini ditunjukan oleh nilai simpangan baku masing-masing sebesar 0,0217 dan 0,0369 dari nilai rata-rata hitung.

Tingkat ketimpangan pada dua kelompok rumah tangga tersebut tergolongan kepada tingkat ketimpangan yang rendah.

Lebih tingginya tingkat ketidakmerataan pendapatan pada rumah tangga bukan berstatus miskin diduga berasal dari dua faktor yaitu: Pertama, berasal dari ketimpangan penguasaan lahan sebagai sumber pendapatan. Dari analisis data ditemukan informasi bahwa rumah tangga yang bukan berstatus miskin, distribusi penguasaan lahannya cenderung agak timpang (Indeks Gini rata-rata = 0,3028) jika dibandingkan dengan rumah tangga miskin (Indeks Gini rata-rata = 0,2939. Timpangnya distribusi penguasaan lahan menyebabkan timpang pula distribusi pendapatan, karena kegiatan pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama bagi rumah tangga di pedesaan.

Kedua, dari sisi mata pencaharian alternatif. Kedua kelompok rumah tangga tersebut sama-sama memiliki mata pencaharian alternatif. Namun berbeda dalam memilih mata pencaharian alternatif tersebut. Rumah tangga miskin lebih banyak memilih mata pencaharian alternatif yang tidak memerlukan skill dan modal. Mata pencaharian alternatif tersebut antara lain: buruh tani, buruh industri, kenek mobil dan pedagang asongan dengan produktivitas rendah. Pendapatan sebagai buruh cenderung sama, apalagi kalau bekerja dengan sistem gaji harian. Dengan meratanya tambahan pendapatan di luar bertani akibatnya pendapatan total rumah tangga juga akan merata.

Berbeda keadaanya dengan rumah tangga yang bukan berstatus miskin lebih banyak mimilih mata pencaharaian alternatif yang memerlukan modal. Kegiatan tersebut antara lain: perdagangan, industri pengolahan, bengkel dan tukang

dengan produktivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu variasi tingkat pendapatan pada rumah tangga yang berstatus bukan miskin cenderung lebih tinggi disebabkan oleh perbedaan produktivitas masing-masing rumah tangga yang cukup tinggi.

B. Analisis Data

1. Pendugaan

Untuk mengetahui sejauhmanakah pengaruh tingkat penguasaan lahan, teknologi, pendidikan, kesehatan, aksesibilitas kelembagaan dan mata pencaharian alternatif terhadap kemiskinan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat digunakan **Model Multiple Logistic Regression**. Hasil analisis dengan menggunakan model tersebut diperoleh vektor masing-masing -masing desain variabel (sub variabel) seperti berikut:

Tabel 4.17
Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Pedesaan Sumatera Barat

Variabel	Nilai Dugaan	Nilai Wald Test	Signifikansi	Odds Ratio
Luas Lahan 2	-0,3926**	3,4872	0,0618	0,6753
Luas lahan 3	-1,6934*	16,2627	0,0001	0,1839
Teknologi	-0,00001*	8,6916	0,0032	1,0000
Pendidikan 1	0,1149	0,1164	0,7330	1,1218
Pendidikan 2	-0,3157	0,6066	0,4361	0,7293
Pendidikan 3	-1,0064	2,3676	0,1239	0,3655
Kesehatan	0.8801*	21.7908	0,0000	2,4111
Aksessibilitas 1	-0,0526	0,0228	0,8800	0,9487
Aksessibilitas 2	-0,5140*	5,6422	0,0175	0,5981
Aksessibilitas 3	-1,6260*	38,2742	0,0000	0.1967
Mt.Penc.Alternati	-0,7288*	0,1893	0,0001	0,4825
Konstanta	1,8286*	22,8532	0,0000	

*): Signifikan pada derjat keberartian 1 %
**): Signifikan pada derjat keberartian 10 %

Dari sebelas desain variabel yang ada dalam model, lima diantaranya tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (outcome variabel) pada derjat kepercayaan 1 %. Subvariabel tersebut antara lain; lahan 2, pendidikan 1,2 dan 3 serta akses 1. Tidak signinifikannya pengaruh beberapa subvariabel tersebut terhadap kemiskinan merupakan sesuatu yang menarik untuk di bahas lebih lanjut.

Lahan 2 adalah luas penguasaan lahan lebih besar dari seperempat hektar tetapi lebih kecil dari setengah hektar (>0,25- < 0,50 ha). Luas lahan ini menunjukkan hubungan yang negatif dengan kemiskinan rumah tangga. Dari bentuk hubungan tersebut dapat diartikan bahwa rumah tangga yang menguasai lahan lebih besar dari seperempat hektar tetapi lebih kecil dari setengah hektar (>0,25 - <0,50 ha) tidak berada dalam kemiskinan. Hubungan antara penguasaan lahan terhadap kemiskinan tidak signifikan pada derjat keberartian 5 %, tetapi cukup signifikan pada derjat keberartian 10 %.

Tidak signifikannya hubungan tersebut pada derjat keberartian 5 % memberikan petunjuk bahwa kelompok rumah tangga yang menguasai lahan pada katagori tersebut masih rentan terhadap ancaman kemiskinan. Karena luas lahan sebesar itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk keluar dari batas kemiskinan. Secara probabilitas kelompok rumah tangga tersebut memiliki peluang untuk berada dalam kemiskinan sebesar 0,68 kali (68 %) jika dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang memiliki lahan di bawah 0,25 ha, ceteris paribus. Hal ini ditunjukkan

oleh nilai Odds Ratio sebesar 0,6753.

Luas penguasaan lahan 3 (0,50 ha ke atas) mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan (vektor = -1.6934) dan sangat signifikan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Jika dibandingkan dengan kelompok rumah tangga yang memiliki lahan di bawah 0,25 ha, kelompok rumah tangga ini, memiliki pelung untuk berada dalam kemiskinan sebesar 0,18 kali. Hal ini akan terjadi jika diasumsikan variabel-variabel lain tidak mengalami perubahan.

Tinggi atau dan rendahnya tingkat teknologi yang diadopsi oleh rumah tangga sangat menentukan sebuah rumah tangga untuk berada dalam kemiskinan. Pengaruh tingkat teknologi yang diadopsi rumah tangga terhadap kemiskinan ditunjukkan oleh bentuk hubungan yang negatif. Hubungan kedua variabel tersebut mununjukkan hubungan yang sangat signifikan. Hasil analisis dapat diartikan, semakin tinggi tingkat teknologi yang diadopsi oleh suatu rumah tangga, akan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut untuk berada dalam kemiskinan. Tingkat teknologi yang diadopsi oleh rumah tangga dalam studi ini diukur berdasarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga untuk membeli sarana produksi pertanian (pupuk, bibit, racun dan sewa mekanisasi pertanian). Dari data yang dianalisis ternyata tingkat adopsi teknologi rata-rata yang dilakukan rumah tangga relatif masih rendah jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi yang direkomendasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Pendidikan dalam berbagai jenjang pendidikan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Rumah tangga yang kepala keluarganya berpendidikan 1 (SD) cenderung berada dalam kemiskinan sebagaimana ditunjukan oleh nilai vektor 0,1149. Hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan pada derjat keberartian 5 %. Penemuan tersebut memberikan petunjuk bahwa rumah tangga yang kepala rumah tangganya memiliki pendidikan Sekolah Dasar masih rentan terhadap kemiskinan. Hal ini karena masih sangat minimnya pengetahuan dasar yang mereka punyai apalagi untuk melaksanakan kegiatan ekonomi terutama di bidang pertanian.

Tidak sigifikannya hubungan ke dua variabel tersebut barangkali disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masuk ke dalam kategori ini sangat bervariasi. Tingkat pendidikan yang masuk ke dalam kategori tersebut adalah dari kepala rumah tangga yang hanya berpendidikan 1 tahun sampai 6 tahun. Dengan demikian diduga besarnya variasi pada kelompok ini menyebabkan tingkat pendidikan 1 (Sekolah Dasar) tidak menunjukkan pengaruh berarti terhadap kemiskinan rumah tangga.

Dua tingkat pendidikan yaitu SMTP dan SMTA ke atas menunjukkan hubungan negatif dengan kemiskinan. Hubungan kedua tingkat pendidikan tersebut juga tidak signifikan terhadap kemiskinan. Secara lebih jauh penemuan tersebut memberikan petunjuk bahwa tingkat pendidikan di pedesaan tidak menentukan besar atau kecilnya pendapatan rumah tangga dan untuk terlepasnya sebuah rumah tangga dari belenggu

kemiskinan. Hal ini barangkali disebabkan bidang pekerjaan yang digeluti oleh masing-masing kepala rumah tangga di pedesaan nyaris tidak berbeda. Baik pekerjaan utama maupun pada pekerjaan alternatif, meskipun tingkat pendidikan yang pernah mereka duduki berbeda. Berbeda dengan sistem gaji diterapkan pada pegawai negeri maupun swasta yang memberikan penghargaan terhadap pendidikan di saat seseorang diterima sebagai pegawai.

Berdasarkan analisis Odds Ratio dapat ditafsirkan bahwa kelompok rumah tangga yang berpendidikan SD mempunyai peluang untuk berada dalam kemiskinan sebesar 1,12 kali. Rumah tangga yang berpendidikan SMTP memiliki peluang sebesar 0,73 kali. Rumah tangga yang kepala keluarganya berpendidikan SMTA ke atas memiliki peluang sebesar 0,37 kali untuk berada dalam kemiskinan jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak berpendidikan. Kondisi tersebut akan terjadi jika variabel-variabel lain tidak mengalami perubahan (ceteris paribus).

Lebih besarnya peluang, rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan SD berada dalam kemiskinan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangga yang tidak berpendidikan, berangkali ada kaitannya dengan besarnya variasi tingkat pendidikan pada katagori ini. Pendidikan yang termasuk ke dalam katagorikan ini adalah pendidikan satu tahun sampai kepada pendidikan enam tahun (tamat SD).

Dari 574 kepala rumah tangga yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 496 orang (86,41 %) di antaranya berpendidikan di bawah 4 tahun. Hasil studi Sayuti (1994: 48) menyimpulkan bahwa seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai kelas empat Sekolah Dasar setelah lima tahun meninggalkan sekolah, maka pengetahuan dasar yang telah mereka perolah di sekolah tidak berbeda secara berarti dengan orang-orang yang tidak pernah menduduki bangku pendidikan. Barangkali cukup besarnya proporsi kepala rumah tangga yang berpendidikan 4 tahun, besar kemungkinan pengetahuan dasarnya telah sama dengan kepala rumah tangga yang tidak berpendidikan. Dengan demikian kemampuan menyesuaikan diri, mengambil keputusan, tingkat responsi terhadap pembaharuan akan sama pula tentunya.

Disisi lain jika tingkat pendidikan dikaitkan dengan luas lahan yang dikuasi oleh masing-masing rumah tangga ditemukan informasi sebagai berikut: Dari 59 orang kepala rumah tangga yang tidak berpendidikan, sebanyak 12 orang (20,88 %) di antaranya memiliki lahan di bawah 0,25 hektar. Sebanyak 574 orang kepala rumah tangga yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 214 kepala rumah tangga (37,28 %) di antaranya memiliki lahan di bawah 0,25 hektar. Dengan memperhatikan dua hal tersebut. Ternyata kepala keluarga yang berpendidikan Sekolah Dasar persentase memiliki lahan di bawah 0,25 hektar lebih besar jika dibandingkan dengan kepala keluarga yang tidak berpendidikan.

Dengan besarnya persentase kepala rumah tangga yang berpendidikan Sekolah Dasar memiliki lahan di bawah 0,25 hektar diduga turut mempengaruhi besarnya peluang rumah tangga tersebut untuk berada dalam kemiskinan. Jika dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala keluarganya tidak berpendidikan.

Variabel kesehatan yang ditampilkan pada tabel 5.24 adalah kepala rumah tangga yang pernah mengalami sakit satu tahun terakhir saat penelitian dilakukan. Variabel kesehatan menunjukkan hubungan positif terhadap kemiskinan. Rumah tangga yang kepala rumah tangganya pernah mengalami sakit sangat signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Kelompok rumah tangga tersebut secara probabilitas akan berada dalam kemiskinan sebesar 2,41 kali jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak pernah mengalami sakit. Dengan demikian kepala rumah tangga yang pernah mengalami sakit cenderung semakin rentan dengan kemiskinan. Demikian pula sebaliknya.

Dengan rendahnya tingkat kesehatan yang dimiliki oleh kepala rumah tangga, berarti jumlah waktu yang dapat digunakan untuk mencari nafkah keluarga cenderung berkurang. Dengan demikian produktivitas rumah tangga akan menjadi rendah. Akhirnya pendapatan rumah tangga juga akan menjadi kecil.

Rendahnya tingkat kesehatan berakibat kecilnya peluang-pelung ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh kepala rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Di pedesaan dewasa ini cukup banyak peluang-peluang ekonomi di luar pertanian yang dapat dilakukan. Tetapi, dengan

rendahnya tingkat kesehatan, berarti peluang semacam ini tidak dapat mereka manfaatkan. Di sisi lai, sumbangan di luar kegiatan bertani cukup besar kontribusinya dalam membentuk pendapatan rumah tangga.

Aksesibilitas terhadap kelembagaan ekonomi dalam studi ini terdiri atas tiga subvariabel yaitu: akses 1, akses 2 dan akses 3. Ketiga subvariabel tersebut memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Hasil analisis memberikan informasi bahwa aksesibitas rumah tangga terhadap kelembagaan ekonomi memberikan peluang kepada sebuah rumah tangga untuk tidak berada dalam kemiskinan.

Akses 1 tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap kemiskinan, berbeda dengan akses 2 dan 3. Tidak signifikan aksesibilitas 1 terhadap kemiskinan berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan kelembagaan ekonomi. Masyarakat yang tidak memanfaatkan kelembagaan ekonomi secara konsisten berarti sedikit keuntungan yang dapat mereka peroleh dari kelembagaan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh alat ukur yang digunakan dalam studi ini, bahwa aksesibilitas 1 (rata-rata skor 1), menunjukkan sebuah rumah tangga hanya memanfaatkan kelembagaan dengan kategori **jarang** . Dengan kata lain rumah tangga tersebut lebih banyak tidak mengakses dari pada mengakses kelembagaan yang ada.

Berdasarkan analisis Odds Ratio diperoleh informasi bahwa rumah tangga yang memimiliki aksesibilitas 1 kemungkinan berada dalam kemiskinan sebesar 0,95 kali. Rumah tangga yang memiliki aksesibilitas 2 sebesar 0,60 kali dan

rumah tangga yang memiliki aksesibilitas 3 sebesar 0,20 kali jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki aksesibilitas .

Dengan demikian, semakin tinggi aksesibilitas rumah tangga terhadap kelembagaan ekonomi yang ada, akan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kemiskinan. Temuan ini memiliki implikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kelembagaan ekonomi yang ada perlu ditumbuhkan. Di samping itu, perlu diberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat agar dapat mengakses kelembagaan ekonomi yang ada. Karena aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi akandapat membantu mereka untuk terhindar dari ancaman kemiskinan.

Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif sangat signifikan untuk tidak berada dalam kemiskinan (vektor= - 0,7288 dan Wald Test = 14,8192). Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif secara probabilitas berada dalam kemiskinan sebesar 0,48 kali jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif.

Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif cenderung memiliki pendapatan relatif tinggi. Karena pendapatan mereka tidak hanya berasal dari satu sumber yaitu bertani. Dengan tingginya tingkat pendapatan rumah tangga maka berarti berarti mereka akan terhindar dari kemiskinan. Di daerah penelitian lebih separoh (55 %) rumah tangga terlibat dengan pekerjaan alternatif dalam berbagai bentuk pekerjaan. Dilihat dari kontribusi pekerjaan alternatif

terhadap pendapatan rumah tangga ternyata keberadaannya sangat berarti dalam menunjang pendapatan rumah tangga. Kegiatan tersewbut sekaligus membebaskan mereka dari kemiskinan.

Permasalahan penelitian yang kelima bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat distribusi penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis **Regresi Sederhana**, diperoleh nilai koefisien regresi seperti berikut;

$$Y = 0,1483 + 0,3697\ X$$

$$t_{test} = 1,1385$$
$$r^2 = 0,1776$$

Dari persamaan di atas dapat ditafsirkan bahwa terdapatnya hubungan positif antara distribusi penguasaan lahan dengan distribusi pendapatan rumah tangga. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,3697. Koefisien regresi dapat ditafsirkan jika terjadi kenaikan distribusi penguasaan lahan sebesar satu satuan, maka distribusi pendapatan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,37 satuan.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa kontribusi distribusi penguasaan lahan tidak cukup besar terhadap distribusi pendapatan. Terjadi hal ini, disebabkan masih banyaknya faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga. Kontribusi distribusi penguasaan lahan terhadap keragaman distribusi pendapatan

rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat ditunjukkan oleh nilai Koefisien Diterminasi sebesar 0,1776. Hal ini menunjukkan bahwa 17,76 persen dari keragaman pemerataan pendapatan diterangkan oleh distribusi penguasaan lahan. Sedangkan, selebihnya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Hal ini tentu, tidak terlepas dari kompleksitas masalah sosial ekonomi yang ada di pedesaan.

2. Uji Hipotesis

Pada bagian sebelumnya telah dikemukan bahwa ada lima hipotesis yang akan diuji dalam studi ini. Pengujian Masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut.

Hipotesis Pertama

Luas pertanian, tingkat teknologi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, aksesibilitas terhadap kelembagaan dan mata pencaharian alternatif secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisisis dengan menggunakan **Model Chi-Square** diperoleh nilai hitung sebesar 259,536. Pada tingkat kebebasan 11 dan derjat keberartian 1 % ditemukan X^2 tabel sebesar 24,75. Dengan membandingkan kedua besaran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kerja yang dikemukan ternyata dapat diterima.

Hipotesis Kedua

Distribusi Penguasaan lahan pada rumah tangga yang berstatus miskin lebih merata dibandingkan dengan distribusi penguasaan lahan pada rumah tangga yang tidak berstatus miskin.

Distribusi rata-rata penguasaan lahan pada rumah tangga yang bersatutus miskin ditunjukkan oleh nilai rata-rata Indeks Gini sebesar 0,29. Nilai simpangan baku sebesar 0,0626. Distribusi rata-rata penguasaan lahan rumah tangga tidak berstatus miskin sebesar 0,3028 dengan nilai simpangan baku sebesar 0,0830.

Dengan menggunakan Model Statistik t-test diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,2429. Dengan meggunakan tes dua ujung (two tail test) pada derjat bebas 14 dan derjat keberartian 5 % diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,145. Dengan memperhatikan kedua besaran tersebut ternyata nilai t hitung berada di daerah penerimaan H_0, karena t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif yang telah dikemukan ternyata ditolak*.

Hipotesis Ketiga

Distribusi Pendapatan rumah tangga yang berstatus miskin lebih merata jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak berstatus miskin.

Distribusi rata-rata pendapatan rumah tangga yang bersatutus miskin ditunjukkan oleh nilai rata-rata Indeks Gini sebesar 0,1832. Nilai simpangan baku sebesar 0,0217. Distribusi rata-rata pendapatan rumah tangga yang bukan berstatus miskin sebesar 0,2328. Nilai simpangan bakunya sebesar 0,0369.

Dengan menggunakan model statistk t- test diperoleh nilai hitung sebesar -3,2735. Nilai t-tabel dengan tes dua ujung (two tail test) pada derjat bebas 14 dan derjat keberartian 5 % adalah -2,145. Dengan memperhatikan kedua besaran tersebut ternyata nilai t-hitung berada di luar daerah penerimaan hipotesis nol. Dengan demikian, hasil analisis memberikan pentunjuk bahwa hipotesis alternatif yang diajukan ternyata dapat diterima*.

Hipotesis Keempat

Distribusi Pendapatan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif lebih merata jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan distribusi rata-rata pendapatan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif sebesar 0,2373. Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif sebesar 0,3208. Masing-masing memiliki nilai simpangan baku sebesar 0,0386 dan 0,0678.

Hasil analisis statitik t-test memperlihat nilai hitung sebesar 3,0274. Nilai t-tabel sebesar 2,145 pada derjat bebas 14 dan derjat keberartian 5 %. Dengan memperhatikan hasil analisis ternyata nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis alternatif yang diajukan ternyata dapat diterima*.

Hipotesis Kelima

Distribusi penguasaan lahan berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat.

Dari analisis analisis ditemukan nilai t-hitung, lebih kecil dari t-tabel (1,138<2,447) pada derjat bebas 6 dan derjat keberartian 5 %. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang menyatakan distribusi penguasaan lahan berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan ternyata ditolak*.

* Analisis Anova juga menunjukkan hasil yang sama.

C. Pembahasan

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukan. Dari lima hipotesis yang diajukan, dua diantaranya tidak didukung oleh data penelitian. Hipotesis pertama yang terdiri dari enam variabel dengan sebelas desain variabel yaitu luas penguasaan lahan, tingkat teknologi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, aksesibilitas terhadap kelembagaan dan mata pencaharian alternatif. Dengan menggunakan model statistik Chi-Square ternyata secara bersama-sama desain variabel tersebut berpengaruh sangat berarti terhadap kemiskinan rumah tangga. Namun jika dilihat secara sendiri-sendiri dengan menggunakan model statistik Wald Test ditemukan lima desain variabel diantaranya tidak menunjukan pengaruh berarti terhadap kemiskinan. Desain variabel tersebut adalah pendidikan dalam berbagai tingkat (SD, SMTP dan SMTA ke atas) dan aksesibilitas terhadap kelembagaan dengan skor rata rata sebesar 1.

Kurang konsistennya analisis Chi-Square dengan Wald Test dapat dilihat dari dua aspek yaitu ; aspek analisis statitik dan keadaaan data di lapangan. Secara statistik tidak siginifikannya beberapa variabel bebas dengan kemiskinan sebagai outcome variabel berkaitan dengan model yang digunakan dalam studi ini adalah Model Stokastik. Dalam Model Stokastik cenderung masing-masing

UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

variabel mempunyai distribusi probabilitas. Dengan demikian nilai suatu variabel dapat berada pada sekelompok nilai dengan probabilitas tertentu.

Kondisi seperti ini akan mengakibatnya besarnya keragaman nilai satu variabel, karena nilai variabel sesungguhnya (X_i) berbeda jauh dengan nilai rata-rata ($\bar{X}$). Dengan besarnya nilai keragaman tersebut mengakibatkan relatif besarnya nilai standar eror yang berakibat relatif kecilnya nilai Wald Test.

Besarnya nilai standar eror dapat disebabkan oleh ketidaktepatan dalam mengukur variabel penelitian. Di samping itu dapat juga disebabkan oleh bias dalam pengumpulan data, baik yang berasal dari peneliti maupun responden. Hal demikian akan menyebabkan rendahnya validitas data penelitian.

Di sisi lain, jika dilihat berdasarkan keadaan data di lapangan, tidak signifikanya beberapa desain variabel terhadap kemiskinan seperti: (1) tingkat pendidikan. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat ekonomis maupun yang bersifat sosiologis yang ada di pedesaan. Faktor -faktor tersebut antara lain:

(a) Bidang pekerjaan yang digeluti oleh masing-masing rumah tangga di pedesaan tidak begitu menunjukkan keragaman. Dengan bertumpunya rumah tangga pada satu jenis kegiatan yang sama sepertinya bertani atau kegiatan lain. Akibatnya pendapatan yang diperoleh rumah tangga cenderung tidak berbeda karena perbedaan pendidikan. Temuan ini relevan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Latif (1990: 76) di

Kabupaten Tanah Datar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada desa-desa pedalaman tidak terdapat pengaruh berarti antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga dengan tingkat pendapatannya. Berbeda dengan desa-desa pinggiran yang memperlihatkan terdapatnya hubungan berarti antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan rumah tangga.

(b) Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga di pedesaan dewasa ini, sepertinya belum memerlukan orang-orang berpendidikan relatif lebih tinggi. Hal ini disebabkan, kegiatan ekonomi di pedesaan masih berskala kecil dan tradisional. Kondisi demikian akan menyebabkan produktivitas orang-orang yang berpendidikan tinggi cenderung tidak mengalami peningkatan atau tidak akan berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan lebih rendah. Karena tingkat pendidikan tersebut tidak diimbangi dengan faktor-faktor produksi lain yang juga lebih berkualitas.

(c) Pendidikan kepala rumah tangga di pedesaan dewasa ini masih didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan tidak bersekolah. Akibatnya, keberadaan kepala rumah tangga yang berpendidikan relatif lebih tinggi pada umumnya terbawa arus dengan orang yang berpendidikan rendah. Terjadinya hal ini, barangkali disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat di pedesaan secara sosiologis masih bersifat kolektif dan paternalistis.

(d) Secara sosiologis masyarakat desa cenderung tidak mau bersifat eksklusif dan melebihi anggota kelompoknya (Chitambar 1982: 208). Dengan demikian orang-orang yang

berpendidikan lebih tinggi tidak mau berbuat banyak sesuai dengan ilmu dan keahliaan yang dimilikinya. Karena mereka pada umumnya takut dikucilkan oleh anggota kelompoknya. Apalagi yang berpendidikan lebih tinggi tersebut adalah kepala rumah tangga yang berusia masih muda.

(e) Kurang relevannya materi pendidikan yang diterima diberbagai jenjang pendidikan formal dengan kebutuhan di pedesaan. Kurikulum pendidikan selama ini lebih berorientasi kepada kebutuhan tenaga kerja untuk sektor industri dan perkotaan dari pada kebutuhan pedesaan. Sementara jumlah penduduk lebih banyak berada di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian sistem pendidikan nasional kurang efektif dalam memajukan pembangunan pedesaan. Di samping itu, sistem pendidikan cenderung menyebabkan terjadi urban bias dan mempercepat arus migrasi orang terdidik dari desa ke kota.

Rumah tangga, yang kepala rumah tangganya berpendidikan Sekolah Dasar berpeluang lebih besar untuk berada dalam kemiskinan jika dibandingkan dengan rumah tangga, yang kepala rumah tangganya tidak berpendidikan. Temuan ini agak bertolak belakang dengan teori yang dianut selama ini, yang menyatakan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan produktivitas dan pendapatan. Namun hal tersebut tidaklah berlaku secara umum.

Terjadinya hal semacam ini, kemungkinan ada kaitannya dengan faktor lain seperti penguasaan lahan. Dari data yang ada ditemukan bahwa rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan Sekolah Dasar lebih besar persentasenya

memiliki lahan di bawah 0,25 ha jika dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak berpendidikan. Disisi lain ditemukan cukup besar persentase rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak berpendidikan memiliki lahan di atas 0,50 ha jika dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan Sekolah Dasar. Dengan demikian, kemungkinan faktor penguasaaan lahan yang cenderung lebih berperan dalam menentukan kemiskinan sebuah rumah tangga di pedesaan jika dabandingkan dengan pendidikan. Karena di pedesaan, lahan masih berperan sebagai faktor produksi yang cukup menentukan pendapatan rumah tangga

(2) Tidak siginifikannya pengaruh akses kelembagaan dengan skor 1 (akses 1) terhadap kemiskinan. Barangkali disebabkan masih rendahnya aksesibilitas yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga terhadap kelembagaan yang ada. Jika dipedomani instrumen penelitian yang digunakan, ternyata bahwa aksesibilitas dengan skor 1, merefleksikan sebuah rumah tangga berada dalam kategori **"Jarang"** dalam memanfaatkan kelembagaan yang ada. Dengan rendahnya akses terhadap kelembagaan maka berarti kelompok rumah tangga tersebut belum memanfaatkan fasilitas kelembagaan yang ada secara baik. Apalagi membebaskan mereka dari kemiskinan. Dengan demikian kesempatan dan suasana kondusif dalam memanfaatkan kelembagaan ekonomi di pedesaan sangat penting artinya dan perlu ditumbuhkan. Agar masyarakat terbebas dari kemiskinan.

Distribusi penguasaan lahan pada rumah tangga miskin ternyata tidak berbeda secara signifikan dengan distribusi penguasaan lahan pada rumah tangga yang bukan berstatus miskin. Tidak berbedanya distribusi penguasaan lahan secara statistik pada dua kelompok rumah tangga tersebut, karena yang diteliti daam studi ini adalah penguasaan lahan. Penguasaan dapat dilakukan dengan cara sewa, bagi hasil dan gadai. Melaksanakan usahatani dengan cara sewa dan bagi hasil harus melalui pertimbangan yang cukup matang dari pengusahatani. Karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan dalam bentuk sewa dan bagian hasil untuk pemilik lahan.

Pemilihan luas lahan bagi rumah tangga berkaitan dengan skala usaha. Skala usaha berkaitan dengan biaya usahatani yang diperlukan. Biaya berkaitan dengan kemampuan keuangan atau budget rumah tangga. Dengan demikian berapa luas lahan yang akan dikuasai dalam kegiatan usahatani harus disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan dana yang dimiliki oleh rumah tangga. Pertimbangan seperti ini akan dilakukan oleh masing-masing kelompok rumah tangga, baik rumah tangga miskin maupun pada rumah tangga yang bukan bersatus miskin.

Pendapatan adalah sebagai proksi dari kemampuan ekonomi rumah tangga. Pendapatan rumah tangga berasal dari dua sumber yaitu dari kegiatan bertani dan dari kegiatan luar pertanian. Bagi petani di pedesaan, budget yang akan digunakan untuk melakukan usahatani adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan bertani pada periode sebelumnya.

Bagi rumah tangga yang memiliki sumber pendapatan tambahan dari luar bertani biasanya pendapatan tersebut digunakan untuk menutupi biaya rutin.

Pendapatan yang berasal dari kegiatan bertani pada kelompok rumah tangga miskin maupun pada kelompok rumah tangga bukan miskin tidak bergitu bervariasi. Karena pendapatan tersebut berasal dari sumber yang sama. Dengan relatif samanya tingkat pendapatan dalam satu kelompok rumah tangga, berarti skala usaha dan luas lahan yang akan dipilih oleh masing-masing rumah tangga akan sama pula tentunya.

Dengan relatif samanya luas lahan yang kuasai oleh masing-masing rumah tangga pada satu kelompok rumah tangga, maka berarti penguasaan lahan akan terdistribusi pula secara merata. Pada rumah tangga yang bukan berstatus miskin karena pendapatannya relatif tinggi, mereka dapat menguasai lahan relatif luas luas. Sementara bagi kelompok rumah tangga miskin kerana pendapatannya rendah maka mereka akan memilih luas lahan relatif kecil.

Di sisi lain tidak signifikannya perbedaan distribusi penguasaan lahan rumah tangga miskin dengan rumah tangga yang bukan berstatus miskin barangkali disebabkan juga oleh sistem pemilikan lahan yang ada di daerah penelitian. Di pedesaan Sumatera Barat proses pemindahan hak atas lahan agak sulit dilakukan. Apalagi yang menyangkut dengan harta pusaka (pusako tinggi). Kecuali terpenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh adat. Penggunaan lahan akan dibagi dalam satu garis keturunan sesuai dengan jumlah anggota

keluarga perempuan. Dengan cara demikian hak atas tanah akan terbagi secara merata dalam ukuran maupun dalam penggunaan.

Terjadinya perbedaan distribusi pendapatan pada rumah tangga miskin dengan rumah tangga yang bukan berstatus miskin, berasal dari sumber pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga. Besarnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga pada kelompok rumah tangga miskin cendrung lebih homogen. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber pendapatannya yang relatif merata. Jika dilihat dalam kegiatan bertani, pada umumnya rumah tanggga miskin mengusahakan lahan relatif sempit, tapi distibusinya relatif merata. Demikian juga tingkat teknologi yang digunakan. Dengan meratanya penggunaan lahan dan teknologi maka berarti pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga juga akan menjadi merata. Karena pendapatan dari kegiatan bertani masih merupakan sumber pendapatan paling besar dalam pembentukan pendapatan rumah tangga. Kesimpulan yang sama juga ditemukan oleh hasil studi Jhonston dan Clark (1985:210) dan Syukur (1988:54) di pedesaan Sulawesi Selatan.

Berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga yang tidak berstatus miskin. Dengan tingkat penggunaan lahan yang lebih luas tetapi distribusi penguasaanya agak timpang. Pengunaan teknologinya cukup tinggi tetapi sangat bervariasi. Kondisi awal seperti ini mengakibatkan tingkat pemerataan pendapatan pada rumah tangga bukan berstatus miskin akan menjadi rendah. Hasil temuaan dalam studi ini konsisten dengan hasil studi yang

dilakukan oleh Dapartemen Tenaga Kerja dalam Kustiah (1983) yang menyatakan bahwa semakin miskin satu daerah maka semakin merata distribusi pendapatannya. Demikian pula sebaliknya.

Ditemukan perbedaan yang signifikan antara pendapatan rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif dengan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif. Hal ini disebabkan cukup besarnya sumbangan mata pencaharian alternatif terhadap pendapatan rumah tangga. Dengan relatif besarnya sumbangan kegiatan di luar pertanian mengakibatkan tingkat pemerataan pendapatan dalam kelompok rumah tangga tersebut cenderung lebih timpang jika dibandingkan dengan pemerataan pendapatan pada kelompok rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan alternatif.

Rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif hanya memiliki satu sumber pendapatan yaitu dari kegiatan bertani. Pendapatan yang berasal dari kegiatan bertani cenderung lebih merata. Seandainya, terjadi perbedaan pendapatan, perbedaan tersebut berasal dari faktor luas penguasaan lahan dan penggunaan teknologi. Hasil temuan ini relevan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Collier (1979) dalam Wihite (1984) dan hasil studi Sinaga dan White (1984). Temuan tersebut menyatakan sumbangan di luar pertanian bukan hanya memperkecil tingkat ketimpangan akan tetapi malah memperbesar ketidakmerataan pendapatan antar rumah tangga.

Tidak berpengaruhnya secara berarti distribusi penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan merupakan temuan yang perlu didiskusikan secara lebih mendalam. Hasil studi memberikan petunjuk bahwa dewasa ini distribusi penguasaan lahan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan. Karena masih adanya faktor-faktor lain yang turut mempengaruhinya.

Hasil temuan ini tidak konsisten dengan pendapat Todaro (1986:306) yang menyatakan bahwa dibeberapa negara yang struktur pemilikan tanahnya tidak merata merupakan penyebab ketidakmerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga temuan Syahruddin (1980:36) di pedesaaan Sumatera Barat yang menyatakan terdapat hubungan berarti antara distribusi penguasaan lahan dengan distribusi pendapatan di pedesaan Sumatera Barat.

Tidak konsistennya hasil studi ini dengan kedua pendapat di atas barangkali disebabkan, telah terjadinya pergeseran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di pedesaan dewasa ini. Pergeseran tersebut terlihat dari kemajuan teknologi pertanian, perkembangan pranata sosial, ekonomi dan politik.

Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruhnya distribusi penguasaan lahan terhadap distribusi pendapatan di Sumatera Barat. Faktor tersebut antara lain:

(1) Dengan berkembangnya kegiatan di luar pertanian, akibatnya pendapatan rumah tangga bukan hanya berasal dari kegiatan bertani. Hasil studi menunjukkan bahwa proporsi pendapatan di luar kegiatan bertani memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap total pendapatan rumah tangga. Hal ini adalah salah satu faktor yang memicu terjadinya ketimpangan pendapatan antara rumah tangga.

(2) Belum berfungsinya kelembagaan ekonomi desa secara optimal, mengakibatkan belum semua rumah tangga dapat memanfaatkan kelembaagaan tersebut dengan baik. Hal ini diperkuat oleh hasil temuan yang menyatakan semakin akses sekelompok rumah tangga terhadap kelembagaan ekonomi akan semakin kecil peluang bagi rumah tangga tersebut berada dalam kemiskinan. Rumah tangga yang dapat memanfaatkan kelembagaan ekonomi dengan baik akan mampu meningkatkan pendapatan rumah tanganya melalui fasilitas yang diberikan. Demikian pula sebaliknya bagi rumah tangga yang tidak dapat memafaatkannya. Dengan perbedaan aksesibilitas terhadap kelembagaan akan menyebabkan terjadinya ketimbangan pendapatan antar rumah tangga. Rumah tangga yang akses terhadap kelembagaan, maka pendapatan rumah tangganya cenderung menjadi tinggi. Demikian pula sebaliknya bagi rumah tangga yang tidak akses terhadap kelembagaan ekonomi yang ada. Namun masih banyaknya rumah tangga yang tidak akses terhadap kelembagaan ekonomi yang ada. Hal ini, akan ikut memperburuk distribusi pendapatan antar rumah tangga di pedesaan. Temuan studi sesuai dengan temuan yang dilakukan

oleh Sinaga dan White (1984), Hagul (1986) dan Kasyrino (1979). Temuan tersebut menyimpulkan, kemiskinan buatan akan terjadi akibat peranan kelembagaan ekonomi yang tidak optimal dan sebagian anggota masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi secara merata. Terjadinya hal demikian, karena tidak diciptakan iklim kondusif agar seluruh lapisan dapat mengakses kelembagaan ekonomi yang ada.

(3) Tingginya tingkat keragaman pengunaan teknologi antar rumah tangga di beberapa kecamatan. Di sisi lain, hasil studi menunjukkan bahwa penerapan teknologi sangat berkontribusi dalam meningkatkan output pertanian. Demikian juga terhadap pendapatan rumah tangga. Dengan tidak meratanya tingkat penggunaan teknologi antar rumah tangga dan antar kecamatan akan mengakibatkan tingkat pendapatan yang diperoleh cenderung pula tidak marata. Karena teknologi adalah input dalam kegiatan pertanian.

Hasil temuan studi ini cukup konsisten dengan temuan Mintoro (1983:45). Temuan tersebut menyimpulkan bahwa pada desa-desa yang kegiatan di luar pertaniannya masih belum terbuka maka distribusi penguasaan lahan akan berpengaruh nyata terhadap distribusi pendapatan. Sementara bagi desa-desa yang kegiatan luar pertaniannya sudah terbuka maka distribusi penguasaan lahan tidak berpengaruh nyata terhadap pemerataan pendapatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kemiskinan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor saling mengait satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain:

(1) Luas penguasaan lahan. Besar atau kecilnya lahan yang dikuasai oleh sebuah rumah tangga sangat menentukan untuk terlepasnya sebuah rumah tangga dari belenggu kemiskinan. Semakin luas lahan yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga semakin kecil peluang rumah tangga tersebut berada dalam kemiskinan. Demikian pula sebaliknya semakin kecil lahan yang dikuasai akan semakin rentan rumah tangga tersebut dengan kemiskinan. Di Pedesaan lahan masih merupakan faktor produksi utama bagi rumah tangga. Karena pada umumnya kepala rumah tangga bekerja sebagai petani tradisional dan subsisten.

Tingkat penguasaan lahan rata-rata rumah tangga dan penguasaan lahan perkapita di desa penelitian relatif rendah. Distribusinya masuk ke dalam katagori sedang. Distribusi penguasaan lahan perkapita cenderung lebih merata dengan tingkat keragaman yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan penguasaaan lahan rata-rata rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa di pedesaan Sumatera Barat tidak terjadi polarisasi penguasaan lahan pada sekelompok orang.

Relatif sempitnya penguasaan lahan di Sumatera Barat berkaitan erat dengan kondisi geografis daerah. Daerah ini diapit oleh gugusan bukit barisan. Dengan kondisi demikian itu, masih cukup banyak ditemukan masyarakat yang mengolah lahan pada kemiringan di atas 40 ^{o}.

(2) Tingkat teknologi yang diadopsi oleh masing-masing rumah tangga, menyangkut dengan kemampuan rumah tangga untuk membayar sarana produksi pertanian. Seperti pupuk, racun, bibit unggul dan mekanisasi pertanian. Semakin konsisten sebuah rumah tangga menggunakan teknologi semakin terhindari mereka dari kemiskinan. Namun sampai sekarang tingkat adopsi teknologi yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga ternyata masih cukup rendah jika dibandingkan dengan yang direkomendasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Akibatnya produktivitas lahan perhektar cenderung menjadi rendah.

Disisi lain tingkat keragaman adopsi teknologi antara kecamatan cukup tinggi. Ada kecamatan yang tingkat adopsi teknologinya cukup tinggi tetapi merata. Ada pula kecamatan tingkat adopsi teknologinya rendah tetapi keragamannya cukup tinggi. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan teknologi pertanian di pedesaan Sumatera Barat belum telaksana secara merata. Terjadinya hal ini barangkali disebabkan oleh perbedaan pendapatan rumah tangga, geografis daerah dan belum efektifnya penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Karena belum efektifnya penyuluhan yang dilakukan mengakibatkan keterlambatan dalam mengubah sikap mental masyarakat, terutama dalam mengadopsi teknologi pertanian..

(3) Secara teoritis tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan sebuah rumah tangga. Ternyata dalam studi ini tidak ditemukan pengaruh yang signifikan. Tidak berpengaruhnya pendidikan terhadap kemiskinan diduga disebabkan beberapa faktor yang bersifat ekonomis dan sosiologis. Faktor tersebut adalah : (a) tidak beragamnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, (b) skala usaha yang ada di pedesaan masih kecil dan tradisional, (3) masih berkembangnya sikap kolektif dan paternalistik di pedesaan dan (4) kurang relevannya kurikulum pendidikan formal dengan kebutuhan pedesaan. Tetapi, yang membesarkan hati adalah semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga semakin kecil peluang rumah tangga tersebut untuk berada dalam kemiskinan. Demikian pula sebaliknya.

Tingkat pendidikan masyaraka di pedesaan Sumatera Barat relatif masih rendah. Sangat sedikit kepala rumah tangga yang berpendidikan di atas SMTP. Pada umumnya kepala rumah tangga hanya berpendidikan Sekolah Dasar dan masih ditemukan juga di antaranya kepala rumah tangga yang tidak pernah menduduki bangku pendidikan.

(4) Tingkat kesehatan yang dimimili oleh kepala rumah tangga akan menentukan aksesibitas ekonomi rumah tangga. Kepala rumah tangga yang sehat akan memiliki banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Agar mereka keluar dari keadaan kemiskinan. Dengan demikian kesehatan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk terhindarnya sebuah rumah tangga dari

kimiskinan. Di desa penelitian masih cukup banyak ditemukan masyarakat yang menderita sakit, meskipun telah ada Pusat Kesahatan Masyarakat dan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu. Akibat menderita sakit masyarakat telah kehilangan hari kerja rata-rata 5,61 hari selama tahun 1996. Hal ini, tentu akan berakibat terhadap pendapatan rumah tangga. Semakin banyak hari sakit berarti semakin banyak pula pendapatan masyarakat yang hilang.

(5) Tinggi atau rendahnya aksesibilitas kelembagaan sangat menentukan sebuah rumah tangga dalam kemiskinan. Rumah tangga yang memiliki aksesibilitas rendah menjadikan rumah tangga tersebut rentan dengan kemiskinan. Sementara, rumah tangga yang memiliki aksesibilitas tinggi memiliki peluang relatif kecil terhadap kemiskinan. Ternyata hampir separoh rumah tangga di pedesaan tidak akses terhadap kelembagaan ekonomi yang ada. Akibatnya kelompok tersebut tidak memperoleh manfaat dari kelembagaan yang ada. Dengan demikian, timbul kesan, bahwa kelembagaan ekonomi yang ada di pedesaan hanya diakses oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tersebut antara lain; petani berlahan luas dan elit-elit desa.

Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang dan relatif jauhnya jarak kelembagaan yang ada dengan tempat tingggal mereka. Di samping itu, persyaratan formal kelembagaan terlalu berat bagi rumah tangga yang memiliki sosial ekonomi rendah.

(6) Mata pencaharian alternatif yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga sangat menentukan kemiskinan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga yang berasal dari pekerjaan alternatif cukup besar kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif berpeluang lebih kecil untuk berada dalam kemiskinan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif. Mata pencaharian alternatif berkaitan erat dengan luas penguasaan lahan. Semakin sempit lahan yang dimiliki semakin besar kemungkinan anggota rumah tangga melakukan pekerjaan alternatif. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian mata pencaharian alternatif merupakan katup pengaman bagi rumah tangga yang memiliki lahan sempit.

Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif cenderung mempunyai pendapatan relatif besar karena mereka telah melaksanakan pola nafkah ganda. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengandalkan pendapatan pada satu sumber penghasilan dari bertani. Kegiatan luar pertanian yang banyak dilakukan oleh responden yaitu: buruh tani /industri, jasa perdagangan, industri kecil, tukang, montir. Lebih separoh dari responden penelitian telah melakukan pekerjaan alternatif. Pekerjaan tersebut mereka dilakukan dengan alasan tidak mencukupi penghasilan dari kegiatan bertani.

Dengan adanya mata pencaharian alternatif menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif distribusi pendapatannya cenderung lebih timpang jika

dibandingkan dengan distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif. Tejadinya perbedaan distribusi pendapatan tersebut disebabkan oleh sumber mata pencaharian dari kedua kelompok rumah tangga tersebut telah berbeda. Rumah tangga yang tidak memiliki mata pencaharian alternatif hanya mengandalkan pendapatan dari satu sumber pendapatan yaitu bertani. Sementara rumah tangga yang memiliki mata pencaharian alternatif memiliki dua sumber pendapatan dengan tingkat keragaman produktivitas yang cukup tinggi.

Rumah tangga yang bukan berstatus miskin distribusi pendapatannya cenderung lebih timpang jika dibandingkan dengan rumah tangga yang berstatus miskin. Hal ini di samping disebabkan oleh perbedaan distribusi penggunaan faktor input dalam kegiatan pertanian. Di samping itu ditentukan juga oleh mata pencaharian diluar pertanian (alternatif) yang ditekuninya. Rumah tangga tangga miskin cenderung memilih mata pencaharian alternatif yang bersifat padat tenaga kerja dengan produktivitas rendah. Sementara rumah tangga yang tidak berstatus miskin memilih pekerjaan alternatif yang agak bersifat padat modal seperti industri, pengolahan, jasa perdagangan dengan produktivitas relatif tinggi.

Distribusi penguasaan lahan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan. Tidak signifikannya pengaruh tersebut diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) telah berkembangan

pekerjaan di luar pertanian dalam berbagai pekerjaan dengan produktivitas yang berbeda-beda, (2) belum berfungsinya kelembagaan ekonomi yang ada secara optimal. Akibatnya belum semua masyarakat dapat mengakses kelembagaan tersebut dengan baik, dan (3) tidak meratanya tingkat adopsi teknologi antar rumah tangga pada beberapa kecamatan di Sumatera Barat.

B. Saran-Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di pedesaan Sumatera Barat. Untuk itu kepada beberapa instansi terkait dan masyarakat melalui studi ini disarankan sebagai berikut:

1. Berhubung masih rendahnya tingkat teknologi rata-rata yang diadopsi oleh rumah tangga. Terutama penggunaan bibit, pupuk dan racun, sementara luas lahan rata-rata yang dikuasai oleh rumah tangga pada umumnya juga sempit. Untuk itu melalui Dinas Pertanian tanaman pangan disarankan agar dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan secara intensif terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan intensifikasi pertanian. teknologi usaha tani.
2. Kontribusi kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan relatif masih rendah terhadap total pendapatan rumah tangga. Pada hal ketiga kegiatan tersebut cukup didukung oleh potensi alam yang ada. Untuk itu kepada Departemen Pertanian agar dapat membina masyarakat secara lebih intensif ke arah kegiatan tersebut. Di samping itu juga membantu masyarakat dalam pengadaan bibit terutama untuk

kegiatan peternakan yang membutuhkan investasi cukup besar bagi masyarakat desa.

3. Berhubung masih banyaknya rumah tangga yang belum akses terhadap kelembagaan ekonomi yang ada di pedesaan. Untuk itu kepada instansi terkait antara lain: Departemen Koperasi, Perbankan di sarankan:
   a. Untuk dapat memberikan motivasi dan pengertian kepada masyarakat menganai pemanfaatkan kelembagaan ekonomi yang ada;
   b. Menyederhanakan sistem birokrasi dan administrasi yang telah ada. Agar masyarakat mampu mengakses kelembagaan yang ada sesuai dengan keberadaan mereka.
   c. Perlu dipertimbangkan penetapan lokasi kelembagaan agar mudah dicapai oleh masyarakat dari berbagai desa.
4. Tingkat kesehatan sangat signifikan untuk menghindarkan masyarakat dari kemiskinan, namun masyarakat desa masih sangat rentan dengan berbagai penyakit. Untuk itu disarankan kepada Dinas Kesehatan agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disamping itu juga memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama mengenai kesehatan lingkungan dan perbaikan gizi rumah tangga. Agar masyarakat terhindar dari penyakit, karena masyarakat desa pada umumnya belum mengerti tentang hal itu.
5. Mata pencaharian alternatif cukup besar sumbangannya terhadap pendapatan rumah tangga dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sementara kegiatan luar pertanian yang

dilakukan oleh masyarakat dewasa ini masih terbatas kepada kegiatan dengan produktivitas rendah. Oleh sebab itu Departemen Perindustrian agar dapat membina rumah tangga di pedesaan untuk mengembangkan industri kecil yang sesuai dengan potensi masing-masing desa. Dengan demikian potensi masyarakat desa yang bependidikan relatif tinggi akan dapat diarahkan kepada kegiatan produktif di sektor industri kecil.

6. Dalam jangka pendek disarankan untuk mengintensifkan pembinaan pendidikan informal yang berorientasi kepada kebutuhan masing-masing kelompok dalam masyarakat. Dengan pendidikan tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan pengetauan dan keterampilan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan.
7. Mengentaskan masalah kemiskinan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah. Namun perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak terutama masyarakat. Oleh karena itu kepada masyarakat di pedesaan disarankan:
   a. Di Pedesaan masyarakat miskin berada pada posisi yang lemah dan mereka cenderung dijadikan sebagai objek dalam pembangunan. Akibatnya masyarakat miskin terbiasa menunggu uluran tangan dari pemerintah. Oleh karena itu, agar masyarakat miskin lebih kuat dan mempunyai visi lebih luas, sebaiknya mereka harus membentuk suatu lembaga masyarakat miskin. Dengan adanya lembaga tersebut mereka akan dapat berfikir dan berbuat lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan

mereka. Dengan kondisi tersebut masyarakat miskin akan memiliki posisi tawar-menawar yang lebih kuat dengan pihak pemerintah dan diikut sertakan dalam setiap proses pembangunan.

b. Di lokasi penelitian masih ditemukan organisasi tradisional, seperti arisan tenaga kerja (julo-julo), yang pada umumnya beranggota kepala rumah tangga yang berstatus miskin. Selama ini kegiatan arisan tersebut masih terbatas kepada kegiatan tukar menukar tenaga secara resiprokal. Pada hal lembaga tersebut berpotensi untuk dikembangkan. Untuk itu kepada masyarakat yang terlibat dengan kegiatan tersebut disarankan agar dapat mengembangkan kegiatan arisan tersebut ke arah yang lebih produktif seperti mendirikan kolam ikan, peternakan dan perkebunan bersama.

c. Di pedesaaan Sumatera Barat sudah sejak lama berkembang kegiatan pemeliharaan ternak dengan cara bagi hasil atau yang disebut dengan paduo. Untuk itu bagi masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan, agar dapat menginvestasikan dananya dalam bentuk pembelian ternak dan kemudian disalurkan kepada rumah tangga miskin. Di Pedesaan Sumatera Barat, hal tersebut akan sangat memungkinkan dilakukan karena didukung oleh beberapa beberapa faktor: (1) padang rumputnya yang cukup luas, (2) keterampilan masyarakat dalam memelihara sapi yang cukup tinggi, dan (3) resikonya rendah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku Teks

Adelman, T and Morris (1973). Economic Growth and Social Equity in Developing Countries. Stanford: Stanford University Press

Arief, Siritua (1993). Metodologi Penelitian Ekonomi Jakarta : UI Press

Arikunto, Suharsini (1992) Prosesdur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rinika Cipta Press.

Basri, Faisal (1995). Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi Peluang dan kendala. Jakarta: Penerbit Airlangga

Chitambar, J.B (1982). Introductory Rural Siciology New Delhi: Wiley Eastren Limited.

Deuster, Paul R (1982). Revulusi Hijau Di Desa Sumatera Barat dan Desa Selawesi Selatan Bogor: Yayasan Obor Mas Yayasan Agro Ekonomika.

Djojohadikusumo, Sumitro (1994) Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Penerbit Gramedia

Domodar Gujarati (1985). Basic Econometrics. Tokyo: McGraw Hill, Inc.

Esmara, Hendra (1986) Perencanaan dan pembangunan Indonesia Jakarta: Gramedia

Gunawan Wiradi (1969). Ketenagakerjaan Dalam Struktur Agraris di Pedesaan Jawa. Jakarta ; UI Press

Hagul, Peter (1986). Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Yogyakarta : Yayasan Dian Desa.

Hayami dan Ruthan (1976). Agriculture Development an International Prespective. London: John Hopkin Press.

Hanafiah (1989). Stategi Pembangunan Wilayah Pedesaan Kerangka Pemikiran Bagi Pembangunan Desa terpadu. Bogor: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB Bogor

Hasibuan, Nurimansyah (1989). Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi Teori dan Kebijaksanaan. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya

PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

Hosmer, David W and Stanley Lemeshow (1989). Applied Logistic Regression. New York: Awelly Interscience Publication.

Jhinghan, M.L (1978) The Economics of Development and Planing (With Special Refrence To India) New Delhi: Vikas Publising House PVT LTD.

Johnston, Bruce F dan Wiliam C. Clark (1982). Program Pembangunan Pedesaan: Tinjauan Kritis Pengalaman Masa Lalu. Jakarta: Yayasan Obor Mas

Kasyrino, Faisal (1986). Dinamika Pembangunan Pedesaan Jakarta: Bina Aksara

----------(1989). Strategi Pembangunan Desa. "Kertas kerja Disampaikan pada Seminar Menggerakan dan Memamfaatkan Potensi Sumberdaya Wilayah Untuk Membangunan Desa" di Padang

Kikuchi, Masao (1977). Polarzation of Alaguna Vilage. Dynamic of Agrarian Change. Los Banos: International Rice Research Institute.

Komalig, Aske (1989). Perkembangan Struktur Kesempatan Kerja Di Pedesaan. Jakarta: Penerbit Rajawali

Kian Wie, The (1983). Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan Beberapa Pendekatan Alternatif. Jakarta: LP3S

Konsnopuranto, Haryoto (1985). Kesehatan Lingkungan Jakarta: Universitas Indomesia Press

Kustiah (1980). Distribusi Manfaat Pembangunan Pedesaan. Jakarta: PT Penebar Swadaya

Maddala, G.S. (1989). Introduction To Econometrics. New York: Macmillian Publishing Company.

Malasis (1975). Agriculture And Development Proces. Washington: Unesco Press.

Maning, Chris (1984). Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

May, J M (1958). The Ecology of Human Diseas New York: M.P Publishing Co.

Meier, GM and Badwin (1960). Economic Development: Theory, History and Policy. New York: John Wiley & Son, Inc.

Meier, Gerald M (1981). Leading Issues in Economic Development Studies In International Poverty. Oxford : Oxford University Prees

Morley, David (1974). Pediatrics in the Developing World. London: Butter Worths

Nasir, Moh (1985). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Navis, A. (1983). Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial Politik. Padang: Genta Singgalang Press.

Oberai, A.S (1988). Changes in The Sructure of Employment With Economic development. Geneva: International Labour Office.

Pakpahan, Agus (1989) Aspek Kelembagaan Dalam Pembangunan Pertanian. Bogor: Pusat Studi Dinamika Pedesaan

Parsudi, Suparlan (1993). Kemiskinan Perkotaan Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Perneo, Ernesto M (1994). Urban Poverty in Asia A Survey of Critical Issues. Oxford: Oxford University Press.

Quibria, M.G (1996). Rural Poverty in Asia: Indonesia, Republic of Korea, Philippenes and Thailand. Manila: Asian Development Bank.

Sajogyo (1977). Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. Bogor: Pusat Agro Ekonomika

--------- (1982). Bunga Rampai Perekonomian Desa Bogor : Yayasan Obor Indonesia

---------- (1991). Kemiskinan dan Pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Bogor : PSP-IPB

Salim, Emil (1984). Kebijaksanaan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan Jakarta: Indayu Press

---------- (1986). Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta: UI Press.

Samuelson and William D.Norhdaus (1985). Economics. Terjemahan Peter Salim. New York: McGraw-Hill

Scoot, James. C(1967). The Moral Economy of The Peasant Rebellion and Subsistence in The Southes Asia London: Yale University Press, Ltd

Simajuntak Payaman (1982). Sumberdaya Manusia Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Lembaga

Soedjatmoko (1984). Dimensi-Dimensi Kemiskinan Struktural Kemiskinan. Jakarta: Percerakan Mata Angin Penerbit FE UI

Soetrisno, Lukman (1988). Problem Pertanian di Indonesia dan Sumbangan Organisasi Swasta Untuk Memecahkannya Yogyakarta : UGM Press.

Squire, Lyn (1982). Employmen Policy in Development Countries. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta:UI Press

Sudjana (1992). Teknik Analisis Koreleasi dan Regresi Bandung: Penerbit Tarsito

Sukirno, Sadono (1985). Ekonomi Pembangunan Proses. Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta : Penerbit FE Universitas Indonesia.

Sumardjan, Selo dan Alfian (1984). Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Jakarta : PT Sangkala Pulsar.

Todaro, Michle.P (1985) Economic Development In The Third World. Terjemahan Burhanuddin Abdulah "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.

White, Benjamin (1967). Production and Reproduction in Rural Java. New York : Columbia University.

Wiliamson, Jeffrey.G (1975). Regionan Inequality and The Process of National Development: A Description of The Pattrens. Chicago: Chicago University Press.

Zastrow, Charles (1982). Introduction to Social Welfare Institution: Social Problem. Service and Curent Issues. Illinois: The Dorsey Press.

DISERTASI, HASIL PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Ananta, Aris (1986). Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta: Fakultas Pascasarja Universitas Indonesia

Bappeda Sumatera Barat (1993). Sumatera Barat Dalam Angka. Padang

Biro Pusat Statistik (1993). Status dan Daftar Desa Miskin Provinsi Sumatera Barat. Jakarta

Biro Pusat Statistik (1991). Sensus Penduduk 1990. Jakarta

Biro Pusat Statistik (1992). Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin dan Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/ Kotamadya. Jakarta

Biro Pusat Statistik (1994). Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia Tahun 1990 dan 1993. Jakarta

Biro Pusat Statistik (1994). Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1990. Jakarta

Colier, WL dan dan A.T Borowo (1973). Comparison of Input Use and Yield of Various Rice Varities by Large Farmer and Representative Farmer. Bogor; Pusat Agro Ekonomika

Direktorat Pembangunan Masyarakarat Desa Sematera Barat (1994). Evaluasi Desa Miskin Di Provinsi Sumatera Barat. Padang

Prabowo, Dibyo (1995). Diversifikasi Pedesaann Jakarta: Centes for Policy and Implementation Stuidies.

Imam Zadjuli, Suroso (1995). Anatomi Kemiskinan Di Jawa Timur. Makalah Di Seminarkan pada Seminar Sehari Tentang Anatomi Kemiskinan, Kendala dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Surabaya.

Karimi, Syafruddin (1988). Penguasaan Tanah dan Kemiskinan Di Sumatera Barat. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.

Lains Alfian (1977). Regional Concentration In Expantion of Rice Production in Indonesia. Disertasi Ph.D pada University of Philipines

---------- (1987). Peranan Kualitas Sumberdaya Penduduk Dalam Pembangunan di Indonesia. "Pidato Pengukuhan Guru Besar ILmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

---------- (1990). Respon Penawaran Petani Padi di Indonesia. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.

Latif, Kamila (1990). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Rumah Tangga: Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Padang: Fakultas Pascasarjana Univiversitas Andalas

Mintoro, A (1983). Distribusi Pendapatan. Bogor: Studi Dinanamika Pedesaan

Mubiyarto (1993). Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan "Makalah Dalam Seminar Kongres ISEI di Surabaya.

Nasution, Lutfi Ibrahim (1987). Teori Titik Balik Evolusi Menuju Adaptasi Perencanaan Pembangunan Dengan Pendekatan dari Bawah. Bogor: Kerjamasama IPB-Departemen Dalam Negeri

Syahruddin (1980). Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan. Padang: Pusat penelitian Universitas Andalas.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA
KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN
DI PEDESAAN SUMATERA BARAT

---

1. Kode responden .....

2. Umur Bapak/ibu ..... tahun

3. Alamat .....

4. Pernah Bapak/ibu mengikuti pendidikan formal / bersekolah

   a. Ya b. Tidak

5. Jika Ya, apakah jenjang pendidikan tersebut ?

   a. Tamat SD

   b. Jika tidak tamat SD sampai kelas berapa.....

   c. Tamat SMTP/sederajat

   d. Jika tidak tamat SMTP sampai kelas berapa.....

   e. Tamat SMTA/sederajat

   f. Jika tidak tamat SMTA sampai kelas berapa.....

   g. Perguruan Tinggi

   h. Jika tidak tamat PT sampai tingkat berapa.....

6. Jika tidak tamat apa sebabnya .....

   .....

7. Di samping mengikuti pendidikan formal/sekolah, apakah Bapak ibu juga pernah mengikuti kursus, penataran atau pelatihan ?.

   a. Ya b. Tidak

8. Jika, Ya, sebutkan nama kursus, penataran dan pelatihan tersebut dan apa nama instansi yang melaksanakannya ?.

N a m a K u r s u s	Instansi Pelaksana	Lama/hari
1.	:	:
2.	:	:
3.	:	:

9. Apakah pekerjaan Bapak/ibu sekarang .....

10. Di samping pekerjaan di atas apakah Bapak/ibu juga memiliki pekerjaan sampingan ?.

    a. Ya b. Tidak

11. Jika Ya, apakah pekerjaan sampingan tersebut ?.

    a. Berdagang b. Buruh c. Pembantu rumah tangga

    d. Sopir e. Industri kerajinan

    f. .....

12. Apakah alasan Bapak/ibu memiliki pekerjaan sampingan tersebut ?.

    a. Tidak mencukupi penghasilan di bidang pertanian

    b. Memanfaatkan waktu senggang

    c. Sempitnya lahan pertanian yang dimiliki

13. Apakah anggota keluarga (yang tinggal serumah) dengan Bapak/ibu juga memiliki pekerjaan sampingan ?.

    a. Ya b. Tidak

14. Jika Ya, apakah pekerjaan tersebut

    .....

15. Siapakah anggota keluarga Bapak/ibu tersebut ?.

    a. Anak b.Istri

    c. Suami d. .....

16. Berapakah jumlah angota keluarga Bapak/ibu ..... orang

17. Jumlah anggota keluarga tersebut terdiri dari:

    a. Anak Kandung..... orang

    b. Anggota lainnya ..... orang

18. Berapa orang diantaranya yang telah bekerja atau menghasilkan.... .. orang

19. Diantara yang anggota keluarga Bapak/ibu yang masih bersekolah:

    SD ..... orang, SMP..... orang,

    SMTA ..... . orang PT..... orang.

20. Jenjang pendidikan yang pernah diikuti oleh anggota keluarga Bapak ibu yang sudah tidak bersekolah ?.

    a. Tidak tamat SD ..... orang

    b. Tamat SD ..... orang

    c. Tamat SMTP ..... orang

    d. Tidak tamat SMTP .... orang

    e. Tamat SMTA ..... orang

    f. Tidak tamat SMTA ..... orang

    g. Tamat Perguruan Tinggi ..... orang

    h. Tidak tamat Perguruan Tinggi .... orang

21. Berapakah besarnya penghasilan Bapak/ibu dan anggota keluarga yang berasal dari pekerjaan sampingan/ di luar pertanian tersebut ?.

a. Satu hari ..... rupiah atau

b. Satu minggu ..... rupiah atau

c. Satu bulan ..... rupiah

22. Besarnya penghasilan keluarga Bapak/ibu yang berasal dari kegiatan pertanian dalam satu tahun ?.

a. Sawah ..... rupiah

b. Ladang ..... rupiah

c. Plawija ..... rupiah

d. Tanaman Pekarangan ..... rupiah

e. Beternak ..... rupiah

f. Perikanan/kolam..... rupiah

e. Dan Lain-lain ..... rupiah

23. Penghasilan yang berasal dari sewa ..... rupiah/tahun

24. Penghasilan yang berasal dari kiriman dari rantau..... rupiah/tahun

25. Luas lahan yang Bapak/ibu olah pada musim tanam sebelum ini.

Sawah (1)	Pengairan (2)	Ladang (3)
a. Milik Sendiri ..... M^2	a b c	Milik Sendiri ..... M^2
b. Sewa.....M^2	a b c	Sewa M^2
c. Bagi Hasil .....M^2	a b c	Bagi Hasil .....M^2

Keterangan: Jawaban untuk kolom 2 (irigasi)

a. Irigasi teknis b. Semi teknis d. Tadah hujan

26. Pada musim tanam yang baru lalu, apakah Bapak/ibu menggunakan pupuk, bibit unggul, racun hama, zat perangsang tumbuh (saprodi) ?.

    a. Ya b. Tidak

27. Jika Ya, berapakah banyaknya yang Bapak/ibu gunakan ?.

Jenis Saprodi	: Banyaknya		: Harganya
Bibit	:	Kg	: Rp.
Pupuk	:	Kg	: Rp
Racun hama	:	L	: Rp
Zat perangsang tumbuh	:	L	: Rp
Racun rumput	:	L	: Rp

28. Jika Bapak ibu tidak menggunakan saprodi tersebut, apakah sebabnya.....
    .....
    .....

29. Untuk mempermudah pekerjaan dalam mengolah sawah, apakah Bapak/ibu menggunakan alat bantu, berupa mesin ?.

    a. Ya b. Tidak

30. Jika Ya, alat bantu apa yang Bapak ibu gunakan

    a. Traktor tangan b. Perontok gabah

    c. .....

31. Alat bantu (mesin) tersebut milik siapa ?.

    Traktor Tangan : a. Milik Sendiri b. Disewa

    Perontok Gabah : a. Milik Sendiri b. Disewa

32. Jika di sewa siapa pemiliknya ?.

Traktor Tangan:	Perontok Gabah
a. KUD	a. KUD
b. Milik Pribadi	b. Milik Pribadi

33. Dalam musim tanam yang baru lalu berapa Bapak/ibu mengeluarkan biaya untuk sewa alat bantu tersebut ..... rupiah

34. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ibu tentang penggunaan alat bantu tersebut ?.

    a. Dari segi biaya .....

    .....

    .....

    b. Dari segi penggunaan tenaga kerja .....

    .....

    .....

    .....

35. Jika Bapak/ ibu tidak menggunakan alat bantu (mesin), apakah sebabnya.....

    .....

    .....

36. Selama satu tahun belakang ini, pernah Bapak/ibu menderita sakit ?.

    a. Pernah tetapi tetap bekerja

    b. Pernah dan istirahan bekerja

    c. Tidak pernah

37. Berapa lama Bapak/ibu menderita sakit ?

    a. Menderita sakit, tetapi tetap bekerja ..... hari

    b. Menderita sakit dan istirahat bekerja ..... hari

38. Apakah jenis penyakit yang Bapak/ibu derita ?

    a. .....

    b. .....

    c. .....

39. Bagaimanakah cara Bapak/ibu menanggulangi penyakit tersebut ?

    a. Di bawa ke dokter/Puskesmas

    b. Diobati sendiri secara tradisional

    c. Diobati sendiri dengan jalan membeli obat di toko

    d. Di bawa ke dukun

40. Jika Bapak/ibu tidak mengobatkan penyakitnya ke dokter/Puskesmas, apakah sebabnya:

    a. .....

    b. .....

    c. .....

41. Dalam satu tahun kemaren berapa kali Bapak ibu berobat ke Puskesmas ..... kali

42. Berapakah jarak dari tempat tanggal Bapak/Ibu ke Puskesmas atau klinik kesehatan terdekat..... km

43. Adakah alat transportasi untuk Bapak/ibu ke Puskesmas atau ke klinik kesehatan terdekat tersebut ?

    a. Ada b Tidak

44. Jika tidak ada dengan apakah Bapak/ibu pergi ke Puskesmas atau ke klinik tersebut ?.....

45. Apakah Bapak/ibu mengenal lembaga-lembaga di bawah ini?

KUD : a. Ada b Tidak

Bank Rakyat Indonesia (BRI) : a. Ada b. Tidak

d. Kelompok Tani : a. Ada b. Tidak

46. Jika Bapak/ibu mengenal lembaga tersebut, adakah Bapak ibu memanafaatkannya ?

KUD	BRI	Kelompok Tani
a. Selalu	a. Selalu	a. Selalu
b. Kadang-Kadang	b. Kadang	b. Kadang
c. Jarang	c Jarang	c. Jarang
d. Tidak Pernah	d. Tidak Pernah	d. Tidak Pernah

47. Jika jawaban Bapak/ibu tidak apa sebabnya

a. KUD .....

.....

.....

b. BRI .....

.....

.....

.....

c. Kelompok Tani.....

.....

.....

.....

48. Jika Bapak/ibu membutuhkan dana untuk suatu kepentingan, Bapak/ibu tentu mendapatkannya dari lembaga-lembaga di bawah ini:

K U D

a. Selalu

b. Kadang-Kadang

c. Jarang

d. Tidak Pernah

B R I

a. Selalu

b. Kadang-Kadang

c. Jarang

d. Tidak Pernah

49. Jika tidak pernah apakah sebabnya ?

a. KUD .....

.....

.....

.....

b. BRI .....

.....

.....

.....

50. Jika Bapak/Ibu tidak memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan di atas dari siapa Bapak/ibu mendapatkannya ?

a. .....

b. .....

c. .....

51. Untuk memenuhi kebutuhan akan pupuk, bibit, racun dan sebagainya Bapak/ibu mendapatkannya melalui KUD

a. Selalu b. Kadang- Kadang

c. Jarang e. Tidak Pernah

52. Jika tidak pernah apakah sebabnya .....

.....

.....

53. Hasil pertanian yang diperoleh setelah panen di jual melalui KUD

a. Selalu b. Kadang- Kadang

c. Jarang d. Tidak Pernah

54. Pengolahan Gabah dilakukan melalui KUD

a. Selalu b. Kadang- Kadang

c. Jarang d. Tidak Pernah

55. Untuk membantu petani dalam melakukan usahatani, Bapak/Ibu mendapat bimbingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan melalui wadah kelompok tani

a. Selalu b. Kadang- Kadang

d. Jarang d. Tidak Pernah

Dependent Variable.. YPKPT PENDAPATAN PER KAPITA

Beginning Block Number 0. Initial Log Likelihood Function

-2 Log Likelihood 1046.5202

* Constant is included in the model.

Beginning Block Number 1. Method: Enter

Variable(s) Entered on Step Number
1.. LSLH2
LSLH3
TKNLG TEKNOLOGI
PNDDK1
PNDDK2
PNDDK3
KES KESEHATAN
AKSES1
AKSES2
AKSES3
MPALT MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF

Estimation terminated at iteration number 3 because
Log Likelihood decreased by less than .01 percent.

	Chi-Square	df	Significance
-2 Log Likelihood	731.362	745	.1450
Model Chi-Square	253.533	15	.0000
Improvement	253.533	15	.0000
Goodness of Fit	772.412	745	.2524

Classification Table for YPKPT

		Predicted tdk miskin 0	miskin 1	Percent Correct
Observed tdk miskin	0	227	122	65.04%
miskin	1	72	339	82.48%
			Overall	74.47%

---------- Variables in the Equation ----------

Variable	B	S.E.	Wald	df	Sig	R	Exp(B)
LSLH2	-.3926	.2102	3.4672	1	.0626	-.0377	.6753
LSLH3	-1.8934	.4199	18.2827	1	.0001	-.1165	.1839
TKNLG	-1.0E-05	3.6152E-06	8.8916	1	.0032	-.0799	1.0000
PNDDK1	.1149	.3370	.1164	1	.7330	.0000	1.1216
PNDDK2	-.3167	.4054	.6066	1	.4361	.0000	.7293
PNDDK3	-1.0064	.6541	2.3876	1	.1239	-.0187	.3655
KES	.8801	.1885	21.7306	1	.0000	.1374	2.4111
AKSES1	-.0525	.3488	.0226	1	.8800	.0000	.9487
AKSES2	-.5140	.2164	5.6422	1	.0175	-.0533	.5981
AKSES3	-1.6260	.2625	38.2742	1	.0000	-.1860	.1967
MPALT	-.7238	.1893	14.3192	1	.0001	-.1106	.4825
Constant	1.6238	.3825	22.5532	1	.0000		

DATA DISTRIBUSI PENG. LAHAN RTM DAN RTBM

HEADER DATA FOR: B:LAHAN LABEL: PERBEDAAN DISTRIBUSI PENGUASAAN LAHAN
NUMBER OF CASES: 8 NUMBER OF VARIABLES: 2

	PLRTM	PLRTBM
1	.3448	.3887
2	.2037	.3373
3	.3128	.1399
4	.3464	.2383
5	.2412	.3161
6	.3311	.3769
7	.2174	.3518
8	.3536	.2734

---------- HYPOTHESIS TESTS FOR MEANS ----------

HEADER DATA FOR: B:LAHAN LABEL: PERBEDAAN DISTRIBUSI PENGUASAAN LAHAN
NUMBER OF CASES: 8 NUMBER OF VARIABLES: 2

DIFFERENCE BETWEEN TWO GROUP MEANS: POOLED ESTIMATE OF VARIANCE

PERBEDAAN DISTRIBUSI PENG. LAHAN RTM DGN RTBM

	GROUP 1	GROUP 2
MEAN =	.2939	.3028
STD. DEV. =	.0629	.0830
N =	8	8

DIFFERENCE = -.0089
STD. ERROR OF DIFFERENCE = .0367

T = -.2429 (D.F. = 14)

GROUP 1: PLRTM
GROUP 2: PLRTBM

PROB. = .4058

DATA DISTRIBUSI PENDAPATAN RTM DAN RTBM

HEADER DATA FOR: B:PENDAPAT LABEL: PERBEDAAN DISTR. PENDPT.
NUMBER OF CASES: 8 NUMBER OF VARIABLES: 2

	PRTM	PRTBM
1	.1872	.2401
2	.1748	.2832
3	.1757	.2523
4	.1700	.2369
5	.2352	.2636
6	.1753	.2261
7	.1774	.1791
8	.1702	.1610

---------- HYPOTHESIS TESTS FOR MEANS ----------

HEADER DATA FOR: B:PENDAPAT LABEL: PERBEDAAN DISTR. PENDPT.
NUMBER OF CASES: 8 NUMBER OF VARIABLES: 2

DIFFERENCE BETWEEN TWO GROUP MEANS: POOLED ESTIMATE OF VARIANCE

PERBEDAAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

	GROUP 1	GROUP 2
MEAN =	.1832	.2328
STD. DEV. =	.0217	.0369
N =	8	8

DIFFERENCE = -.0496
STD. ERROR OF DIFFERENCE = .0151

T = -3.2735 (D.F. = 14) GROUP 1: PRTM
GROUP 2: PRTBM

PROB. = 2.774E-03

DATA DISTRIBUSI PENDPTN ALTER DAN NON ALTER

HEADER DATA FOR: B:ALTER LABEL: DESA DISTRIBUSI PENDAPATAN
NUMBER OF CASES: 8 NUMBER OF VARIABLES: 2

	ALTER	NOM ALT
1	.3616	.3435
2	.3436	.2858
3	.2516	.1575
4	.3332	.2241
5	.3419	.2203
6	.3279	.1698
7	.3360	.3074
8	.2703	.1900

---------- ANALYSIS OF VARIANCE ----------

HEADER DATA FOR: B:ALTER LABEL: DESA DISTRIBUSI PENDAPATAN
NUMBER OF CASES: 8 NUMBER OF VARIABLES: 2

ONE-WAY ANOVA

GROUP	MEAN	N
1	.321	8
2	.237	8
GRAND MEAN	.279	16

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
BETWEEN	.028	1	.028	9.165	9.047E-03
WITHIN	.043	14	3.0412E-03		
TOTAL	.070	15			